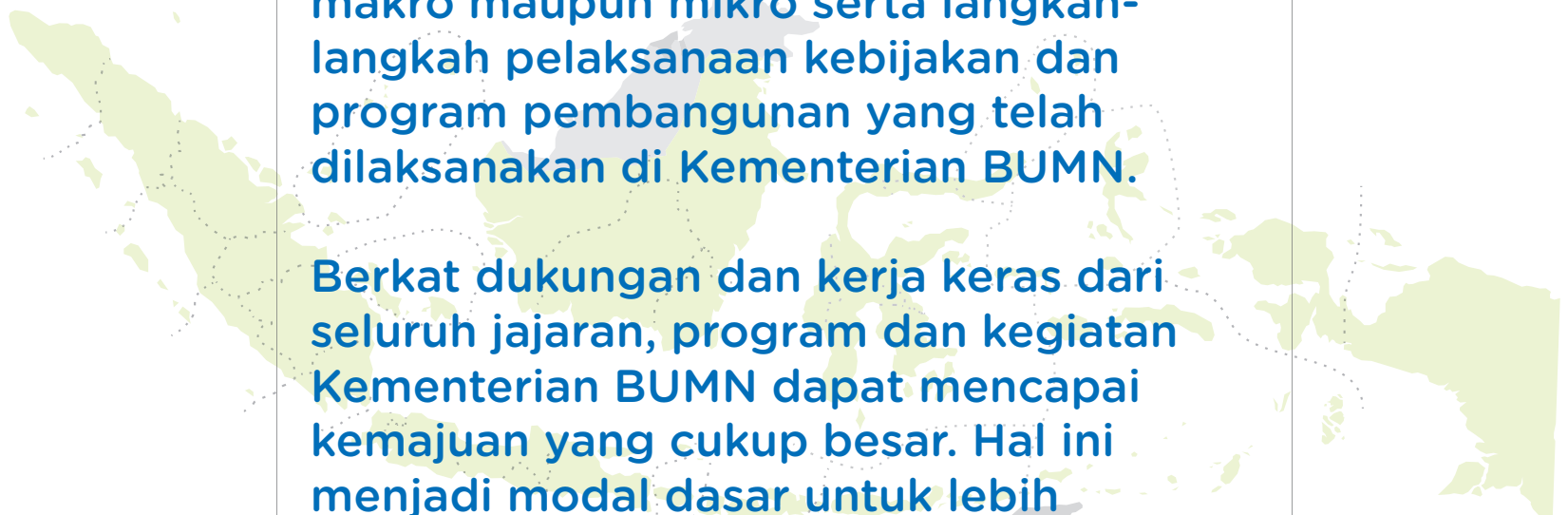




Peningkatan Peran Strategis, BUMN Hadir untuk Negeri

Laporan Tahunan Kementerian BUMN tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kinerja 2 Tahun Kementerian BUMN

Sebagai *Agent of Development*, BUMN telah terlibat dalam proyek pembangunan guna mendukung realisasi program-program Pemerintah. Keterlibatan tersebut, baik pada proyek infrastruktur yang dalam dua tahun (2015-2016) nilainya mencapai Rp282,3 triliun, maupun di bidang maritim, energi, serta proyek lainnya.

Secara umum, dari target tahun 2016, realisasi seluruh proyek strategis rata-rata telah mencapai 67%, dengan rincian: maritim (89%), infrastruktur (62%), energi (54%), dan proyek lainnya (37%).

ASET (Rp miliar)

Realisasi	2015	5.760.229
Realisasi	2016	6.469.929
Target	2017	7.035.778

Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)

Realisasi	2015	149.766
Realisasi	2016	176.177
Target	2017	197.470

EKUITAS (Rp miliar)

Realisasi	2015	1.990.517
Realisasi	2016	2.266.454
Target	2017	2.392.294

Belanja Modal/Capex (Rp miliar)

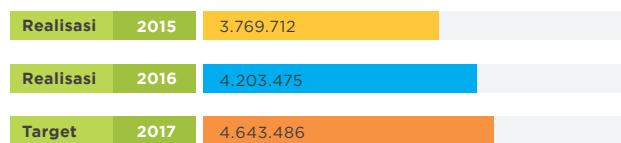
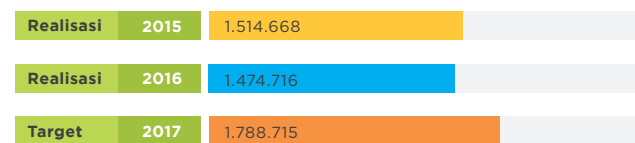
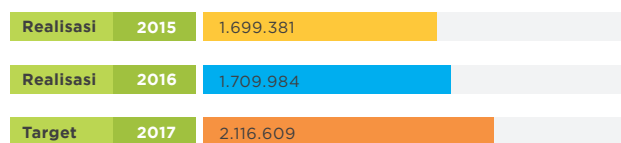
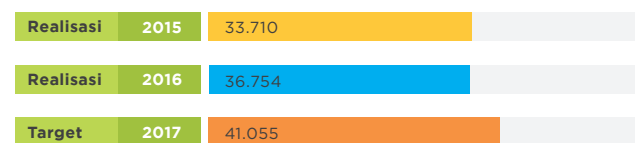
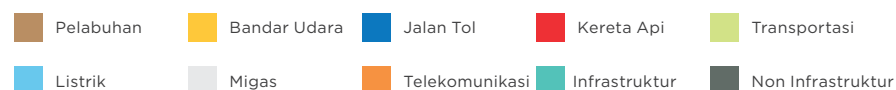
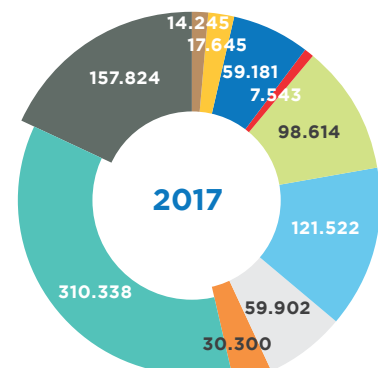
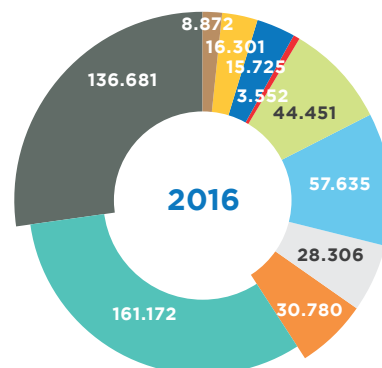
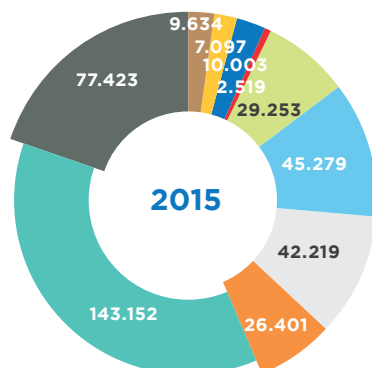
Realisasi	2015	220.575
Realisasi	2016	293.026
Target	2017	468.162

EBITDA (Rp miliar)

Realisasi	2015	335.085
Realisasi	2016	391.167
Target	2017	429.414

Kontribusi Pajak BUMN (Rp miliar)

Realisasi	2015	175.905
Realisasi	2016	162.966
Target	2017	165.568

LIABILITAS (Rp miliar)**Beban Operasional/Opex (Rp miliar)****Pendapatan Usaha (Rp miliar)****Kontribusi Dividen Perusahaan Negara yang
Dibina di Kementerian BUMN (Rp miliar)****Belanja Modal/Capex
(Rp miliar)**



Visi dan Misi

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara, Kementerian BUMN memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kementerian BUMN menetapkan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional
- Meningkatkan Kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional

Roadmap BUMN 2015-2019

BUMN Sebagai Agen Pembangunan

BUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung realisasi program pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tentang pentingnya peran BUMN dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan jumlah BUMN sebanyak 118 pada tahun 2016 dan di seluruh sektor industri baik yang terbuka (*listed*) maupun tertutup, potensi BUMN memberikan sumbangsih bagi negara secara maksimal sangat besar. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia yang memiliki populasi penduduk dan sumber daya sangat besar, serta pasar ekonomi yang sangat potensial.

Selain itu, dengan peran serta BUMN, harapan Indonesia menjadi “*Regional Economic Powerhouse*” juga dapat diwujudkan. Karena itulah, Kementerian BUMN telah menyusun “Mimpi BUMN” yang diwujudkan dalam sebuah roadmap. Roadmap yang disusun dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Keterkaitan dengan Cita-Cita Pemerintah

Penyusunan *roadmap* ini dilandaskan atas cita-cita pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu TRISAKTI:

BERDAULAT

Indonesia berdaulat secara politik

MANDIRI

Indonesia yang mandiri secara ekonomi

BERKEPRIBADIAN

Indonesia yang berkepribadian secara sosial

Untuk mewujudkan jalan perubahan tersebut, telah dirumuskan Sembilan agenda prioritas yang disebut dengan NAWACITA.

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita yang menjadi cita-cita luhur membangun bangsa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan berbagai target kualitatif dan kuantitatif.

Target Kualitatif

- Mengejar peningkatan daya saing
- Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental
- Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas
- Mengurangi ketimpangan antar wilayah
- Memulihkan kerusakan lingkungan
- Memajukan kehidupan bermasyarakat

Target Kuantitatif

- Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,1% di tahun 2014 menjadi 8% di tahun 2019.
- PDB per Kapita naik dari Rp43,32 juta di tahun 2014 menjadi Rp71,97 juta di tahun 2019.
- Inflasi turun menjadi 3,5% di tahun 2019 dari 7,3% di tahun 2014.
- Tingkat kemiskinan turun menjadi 5-6% di tahun 2019 dari kisaran 11% di tahun 2014.
- Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2019 menjadi 16% dari posisi 2014 yang berada di kisaran 11%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka di kisaran 4-5% dari posisi 2014 yang di kisaran 6%.

Strategi BUMN

BUMN sebagai agen pembangunan ikut berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian Nawacita yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan *roadmap* yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN sebagai sebuah “Mimpi BUMN”, berlandaskan pada harapan pencapaian Nawacita tersebut. Sebagai implementasi strategis, telah disusun strategi pencapaian *roadmap*, yaitu melalui empat pilar.

- 4 Pilar Strategis

Arah pengembangan BUMN didasarkan pada empat pilar strategis yang membentuk strategi: sinergi di antara BUMN, hilirisasi dan kandungan

lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, serta kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

- Restrukturisasi Organisasi

Roadmap juga fokus pada penguatan BUMN melalui skema *Stand Alone*, *Merger/Konsolidasi* dan *Holding* untuk menciptakan sinergi yang optimal.

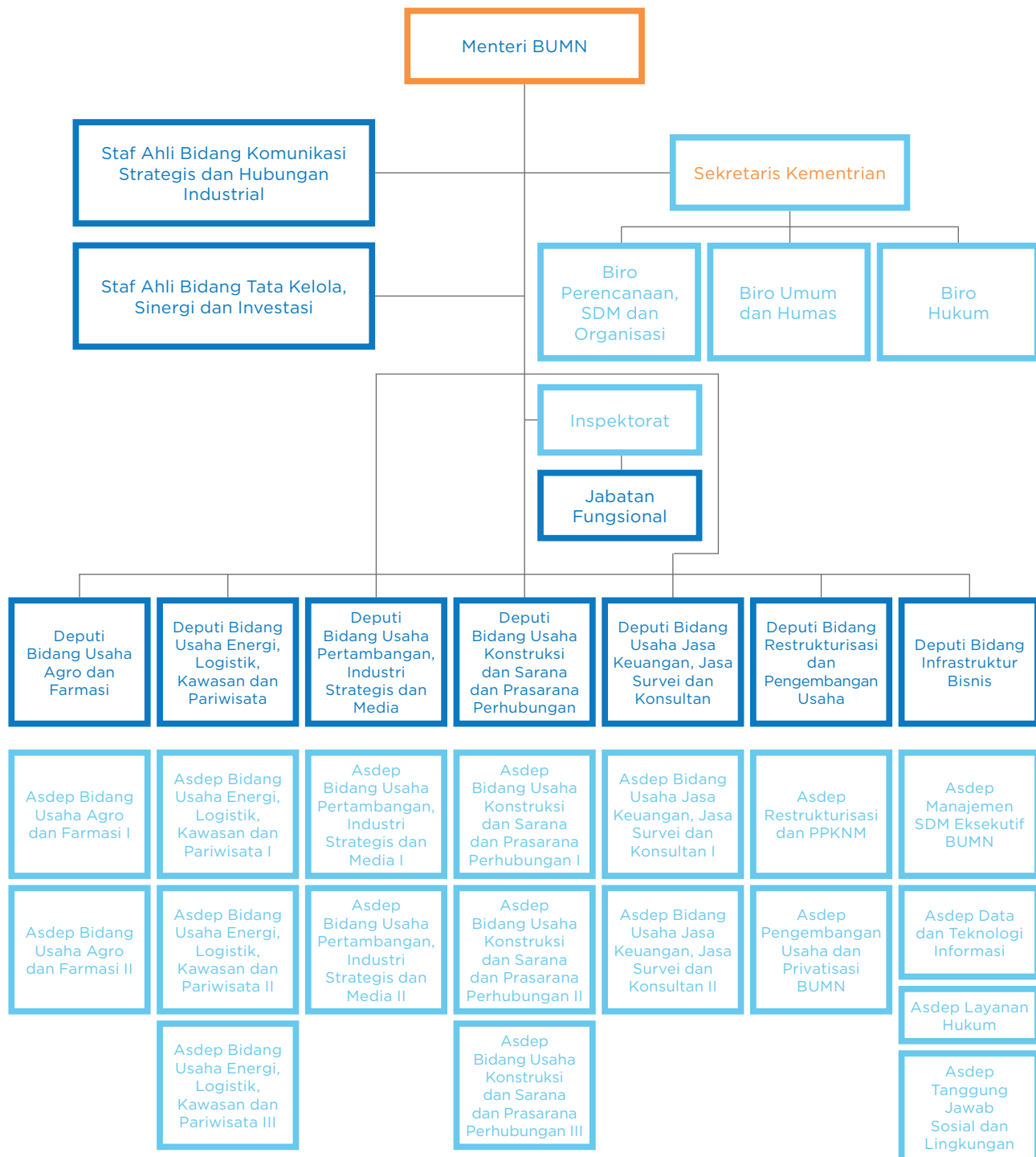
- *Roadmap* Sektoral

Roadmap disusun per tema dan per sektor sesuai dengan fokus pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN. Total terdapat 15 tema/sektor yang menjadi fokus ke depan.

FRAMEWORK ROADMAP BUMN



Struktur Organisasi Kementerian BUMN



Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN

Tugas:

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

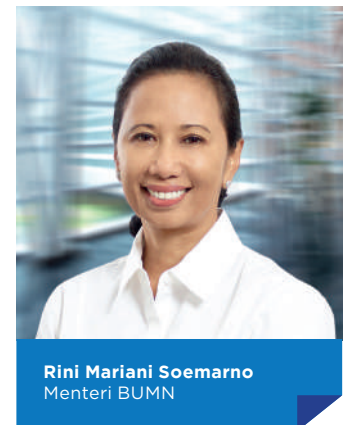
- Perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

Profil Pejabat Kementerian BUMN

Rini Mariani Soemarno lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958, menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001 hingga tahun 2004. Beliau juga pernah menjadi Staf Ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1998, serta pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional di tahun yang sama.

Sarjana Ekonomi dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini adalah termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan profesional. Peraih penghargaan Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada ini, mengawali karirnya di dunia industri sebagai General Manager Finance Division PT Astra International pada tahun 1989. Selanjutnya beberapa jabatan puncak di berbagai perusahaan besar pernah diembannya. Di antaranya sebagai Direktur Keuangan Astra Internasional (1990-1998), Komisaris Bank Universal (1990), Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors (1993), Komisaris Bursa Efek Jakarta (1995), Komisaris PT Astra Agro Lestari (1995), Presiden Direktur PT Astra International (1998-2000). Ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2001-2004) serta berkecimpung di berbagai usaha (2005-2014).

Hingga akhirnya pada 26 Oktober 2014, Rini Mariani Soemarno diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga sekarang.



Rini Mariani Soemarno
Menteri BUMN

Profil Pejabat Kementerian BUMN

Imam Apriyanto Putro lahir di Cilacap, 22 Maret 1964, menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 18 Maret 2013 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya/IV d. Sebelumnya lulusan S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII ini, pada 1 Oktober 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 pernah menjabat sebagai Asdep Riset dan Informasi di Kementerian BUMN. Kemudian pada 7 Maret 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. Lalu pada 9 Januari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 menjabat sebagai Plh. Deputy Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik.



Imam Apriyanto Putro
Sekretaris Kementerian
Badan Usaha Milik Negara

Wahyu Kuncoro lahir di Surakarta, 31 Oktober 1969, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya/IV d. Sebelumnya lulusan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Usaha Produksi Pertanian (2002-2006), Kepala Bidang Usaha Perkebunan II.B (2006-2010), Bidang Usaha Industri Primer IIIa (2010-2012), Kepala Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Ia (2012-2013), Asdep Bidang Usaha Jasa III (2013-2014), Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi (2014-2015), Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.



Wahyu Kuncoro
Deputy Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi

Edwin Hidayat Abdullah lahir di Jakarta, 28 April 1971, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Lulusan Lee Kuan Yew Fellowship Programme di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS Singapura dan Kennedy School of Government, Harvard University (2004-2005), serta Ideas Fellow, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat (2008), juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk. Beliau memiliki sederet riwayat pelatihan di antaranya Chartered Financial Analysis Level I (CFA), Basic LNG Operations (Beijing), Negotiating Leadership (NUS-Harvard University), Crisis Management (NUS-Harvard University), Privatization (NUS-Harvard University), dan E-Governance (NUS-Harvard University).



Edwin Hidayat Abdullah
Deputy Bidang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan dan
Pariwisata

Fajar Harry Sampurno lahir di Blitar, 18 April 1966, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Selain itu lulusan S3 dari American University, Iowa City, Amerika Serikat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Beberapa jabatan penting pernah diembannya antara lain Vice President BPIS (2000-2001), Komisaris PT Dahana (2000-2001), Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha PT Dahana (2002-2011), Direktur Utama PT IKI (2012), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT Dahana sejak tahun 2012 hingga pertengahan 2015.



Fajar Harry Sampurno
Deputy Bidang Usaha
Pertambangan, Industri
Strategis dan Media

Pontas Tambunan lahir di Jakarta, 16 Februari 1961, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya/IV d. Sebelumnya lulusan S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi Bangunan (2002-2006), Asdep Urusan Usaha Prasarana Angkutan (2006-2010), lalu menjabat sebagai Asdep Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I (2010-2012).



Pontas Tambunan
Deputy Bidang Usaha Konstruksi
dan Sarana dan Prasarana
Perhubungan

Gatot Trihargo lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1960, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 10 Juni 2015 hingga sekarang, dengan pangkat Pembina Utama Madya/IV d. Sebelumnya lulusan S3 Ilmu Manajemen Universitas Padjajaran ini, menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Informasi sejak 14 Februari 2006 sampai dengan 20 Mei 2008, Kepala Bidang Data sejak 21 Mei 2008 sampai dengan 30 September 2010, Asdep Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 17 Maret 2013, Deputy Bidang Usaha Jasa sejak 18 Maret 2013 sampai dengan 4 Mei 2014, dan Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain sejak 5 Mei 2014 sampai dengan 9 Juni 2015.



Gatot Trihargo
Deputy Bidang Usaha Jasa
Keuangan, Jasa Survei dan
Konsultan

Aloysius Kiik Ro lahir di Kupang, 29 April 1961, menjabat sebagai Deputy Bidang Usaha Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak 27 Juli 2015 hingga sekarang. Sebelumnya lulusan S3 Finance University of Kentucky, Amerika Serikat ini, sempat menjabat sebagai Asisten Deputy Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN (2003-2005), Direktur Bisnis PT Danareksa (Persero) sejak 14 Juli 2005 sampai dengan 31 Maret 2015, dan Direktur Keuangan PT ANTAM Tbk sejak 1 April 2015 sampai dengan 26 Juli 2015.



Aloysius Kiik Ro
Deputy Bidang Usaha
Restrukturisasi dan
Pengembangan Usaha

Hambra lahir di Maluku, 10 Oktober 1968, menjabat sebagai Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Sebelumnya lulusan S2 Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada ini, menjabat sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (2002-2006), Kepala Bagian Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan (2006-2010), Kepala Bagian Perundang-undangan (2010-2012), Kepala Biro Hukum sejak 3 September 2012 sampai dengan 29 Januari 2014, Plt. Inspektur sejak 30 Januari 2014 sampai dengan 5 Mei 2014, Kepala Biro Hukum sejak 6 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2015, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial sejak 27 Juli 2015 sampai dengan 8 Februari 2016.



Hambra
Deputy Bidang
Infrastruktur Bisnis

Sambutan Menteri BUMN



“

Sebagai entitas ekonomi milik negara, BUMN sebagaimana telah diamanatkan Presiden Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kontribusi BUMN kepada masyarakat ini tertuang dalam bentuk layanan publik dan realisasi program prioritas nasional, baik yang berupa pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 118 BUMN yang hadir di tengah masyarakat.

”

Rini Mariani Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka dalam tahun 2016 Kementerian BUMN dapat mengimplementasikan kebijakan dan melaksanakan berbagai program serta kegiatan dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengamanatkan agar BUMN dapat berperan aktif dalam pengembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar keuntungan. Selain itu, BUMN juga ditugaskan untuk memberikan layanan publik,

mengisi kegiatan-kegiatan usaha yang dibutuhkan masyarakat, serta membina ekonomi masyarakat kecil atau golongan lemah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan melaksanakan program serta kegiatan, falsafah Trisakti dan Nawa Cita yang memuat 9 (Sembilan) agenda prioritas pemerintah telah menjadi landasan utama. Berdasarkan hal tersebut Kementerian BUMN secara terus menerus mengarahkan segenap kemampuan dan seluruh sumber daya BUMN untuk menciptakan dan menguatkan kedaulatan untuk mewujudkan penguatan ekonomi nasional, melalui cara pandang “membangun Indonesia” (Indonesia Centris). Untuk mewujudkan hal tersebut, BUMN telah membangun daerah perbatasan, daerah terpencil maupun daerah yang terisolasi mulai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, guna terus mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara.

Sambutan Menteri BUMN

total aset

Rp6.469 triliun
atau naik 12%

pendapatan usaha

Rp1.709 triliun
atau naik 1%

EBITDA

Rp391 triliun
atau naik 17%

laba bersih

Rp176 triliun
atau naik 18%

Sebagai entitas ekonomi yang dimiliki oleh Negara, BUMN sebagaimana telah diamanatkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, memiliki tanggung jawab besar agar keberadaannya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. BUMN harus selalu hadir di tengah masyarakat, yang tertuang dalam bentuk pelayanan publik dan realisasi pelaksanaan program-program serta kegiatan prioritas nasional, baik berupa pembangunan secara *hard skill* maupun *soft skill*, melalui 118 BUMN dan 25 Eks BUMN yang modal awalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bapak Presiden Joko Widodo sudah menekankan agar BUMN mampu menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) hingga 100 tahun ke depan atau lebih sehingga kelak BUMN dapat menjadi kebanggaan dan dapat diwariskan kepada anak cucu bangsa. Kunci untuk mencapai keberlangsungan usaha adalah dengan mengedepankan integritas dan profesionalisme serta memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga kegiatan usaha yang dijalankan BUMN dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang pada ujungnya meningkatkan nilai investasi permanen Pemerintah.

Pada tahun 2016, Total Asset yang dimiliki BUMN mencapai sebesar Rp6.469 triliun atau naik 12% dari tahun 2015 dengan jumlah ekuitas mencapai sebesar Rp2.226 triliun atau naik 14% dari tahun 2015. Ekuitas BUMN tersebut menggambarkan nilai investasi permanen pemerintah yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir masa Pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 205% meskipun hal tersebut juga ada kontribusi revaluasi aset.

Selanjutnya Pendapatan Usaha BUMN pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp1.709 triliun atau naik 1%, dengan EBITDA mencapai sebesar Rp391 triliun atau naik 17% dan perolehan total Laba Bersih BUMN mencapai sebesar Rp176 triliun yaitu naik sebesar Rp26 triliun atau 18% dari tahun 2015 sebesar Rp149 triliun. Dengan kemampuan BUMN dalam memperoleh keuntungan tersebut, maka BUMN mempunyai kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang, dan tentunya dengan tetap mengedepankan azas kesetaraan dan keadilan.

Selanjutnya dalam tahun 2016, BUMN telah membukukan Belanja Modal (*capex*) sebesar Rp293 triliun, dengan rincian Belanja Modal Infrastruktur mencapai sebesar Rp225 triliun dan Belanja Modal Non-infrastruktur mencapai sebesar Rp68 triliun. Peningkatan Belanja Modal pada tahun 2016 tersebut mencapai 33% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp220 triliun. Jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan BUMN pada masa Pemerintahan baru ini mencapai Rp518 triliun dengan nilai investasi proyek yang sudah dan sedang dilaksanakan mencapai Rp723 triliun.

Indikator-indikator keuangan pokok tersebut, akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2017, Total Asset BUMN diproyeksikan mencapai sebesar Rp7.036 triliun, pendapatan usaha diproyeksikan sebesar Rp2.116 triliun, EBITDA diproyeksikan sebesar Rp430 triliun dan Laba Bersih diproyeksikan mencapai sebesar Rp196 triliun. Adapun jumlah Ekuitas BUMN diproyeksikan mencapai Rp2.393 triliun, yang menggambarkan nilai Investasi Permanen Pemerintah meningkat 7% dari tahun 2016. Selanjutnya Belanja Modal BUMN pada tahun 2017 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp468 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 57% dibandingkan tahun 2016.

ekuitas
Rp2.234 triliun
atau naik 12%

nilai investasi
permanen Pemerintah
meningkat **205%**
selama 2015-2016

belanja modal
Rp298 triliun

Di sisi kontribusi kepada APBN, dalam tahun 2016 BUMN tercatat telah menyetorkan dividen sebesar Rp36,7 triliun atau sedikit mengalami penurunan 1% dari tahun 2015 sebesar Rp37,2 triliun. Sedangkan dari perpajakan, BUMN telah menyeter sebesar Rp163 triliun atau turun sebesar 7% dari tahun 2015 sebesar Rp166 triliun. Total setoran BUMN kepada APBN dari pajak dan dividen pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp199,2 triliun. Di masa mendatang Kementerian BUMN dan BUMN mempunyai komitmen untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan dari APBN dan terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi kepada APBN antara lain dengan kenaikan target dividen sekitar 10% pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp41 triliun.

Tak hanya itu saja, BUMN juga telah berkontribusi yang besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar mencapai 25,2% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Prestasi ini tentu sangat membanggakan mengingat jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI hanya sekitar 4% yaitu 20 (dua puluh) perusahaan dan 6 (enam) anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 538 perusahaan. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu Telkom, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMN di bidang infrastruktur, energi, pangan, konektivitas dan lain-lain. Terkait dengan infrastruktur dasar, BUMN berperan dalam melaksanakan proyek-proyek strategis yang telah dirancang pemerintah. Selama kurun waktu tahun 2015-2016, total proyek infrastruktur strategis yang telah dikerjakan oleh BUMN mencapai Rp304 triliun, antara lain di bidang pelabuhan, bandar udara, kereta api, jalan tol, energi, elektrifikasi, dan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya program terkait dengan konektivitas laut, sedang dilakukan pengembangan 24 (dua puluh empat) pelabuhan strategis yang menjadi bagian dari program Tol Laut sedang dikerjakan, dimana 9 (sembilan) pelabuhan di antaranya terletak di Indonesia bagian timur. Program pengembangan sembilan pelabuhan tersebut akan meningkatkan kapasitas dari semula 822.000 TEUs menjadi 2.000.000 TEUs atau meningkat sebesar 140%.

Sementara itu untuk program terkait dengan konektivitas udara, selama tahun 2015-2016 juga sudah dilakukan pengembangan kapasitas pada 9 (sembilan) bandara sehingga bisa melayani 65 juta penumpang per tahun pada tahun 2016, yang berarti mengalami kenaikan 121% dibandingkan tahun 2014. Ke depan, kapasitas kesembilan bandara ini akan terus ditingkatkan sehingga bisa mencapai 92 juta penumpang di tahun 2019. Pada sisi pengangkutan penumpang, pada tahun 2016 Garuda Group sudah mengangkut 35 juta penumpang dengan 707 penerbangan per hari. Jumlah penumpang yang bisa diangkut oleh Garuda Group akan mencapai 60 juta orang pada tahun 2019, dengan 1.151 penerbangan per hari. Dengan semakin membaiknya infrastruktur konektivitas udara di wilayah Timur, maka kenaikan terbesar jumlah penerbangan adalah ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yaitu mencapai sebesar 35%.

Dalam rangka mendukung konektivitas darat, sepanjang tahun 2016, PT KAI telah mengangkut penumpang sebanyak 352 juta orang, yang berarti dalam masa Pemerintahan yang baru ini mengalami pertumbuhan signifikan yaitu sebesar 21% dibandingkan tahun 2014. Peningkatan ini juga merupakan dampak dari pembukaan 9 (sembilan) rute baru dan perpanjangan 2 (dua) rute lama, yang dikerjakan pada kurun waktu 2014-2016. PT KAI juga telah mengaktifkan kembali layanan di 3 (tiga) jalur perlintasan yang sempat vakum, dengan trek sepanjang 61 (enam puluh satu) kilometer.

Sambutan Menteri BUMN

Belanja modal Infrastruktur

Rp161 triliun

Belanja modal Non-Infrastruktur

Rp137 triliun

setoran pajak

Rp163 triliun

dividen

Rp36,7 triliun

Pada tahun 2016, terobosan yang dilakukan oleh BUMN dalam hal ini BUMN Kontraktor dan Jalan Tol juga untuk memecah kebuntuan untuk mengambil beberapa proyek infrastruktur yang selama ini mangkrak seperti jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Terobosan tersebut mampu mengakselerasi realisasi pembangunan jalan tol sehingga terdapat 342 kilometer jalan tol baru yang siap dioperasikan pada tahun 2017 ini. Capaian tersebut juga akan melengkapi ruas tol baru yang sudah dioperasikan pada 2015-2016 sepanjang 171 kilometer, sehingga panjang tol yang sudah dioperasikan oleh BUMN sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 568 kilometer, dengan target panjang tol yang dioperasikan BUMN pada akhir tahun 2019 mencapai 2.048 kilometer.

Terobosan untuk mengembangkan infrastruktur jalan tol tersebut tidak terlepas dari kontribusi BUMN Perbankan juga secara nyata telah ikut memberikan dukungan pembiayaan/pendanaan, terutama kepada BUMN yang melaksanakan berbagai proyek infrastruktur yang membutuhkan dana atau pembiayaan yang besar. Di samping itu, untuk memecah kebuntuan terkait dengan keterbatasan APBN dalam rangka pembebasan lahan, BUMN Kontraktor dan Jalan Tol telah menyediakan dana talangan sehingga pembebasan lahan dapat berjalan.

Selanjutnya untuk memperkuat kemandirian energi nasional, BUMN telah berinvestasi di sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan kilang bahan bakar minyak (BBM) untuk membangun industri hilir yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai macam produk turunan. Untuk mencukupi kebutuhan BBM di dalam negeri, di tengah semakin menipisnya jumlah cadangan minyak dan gas nasional, BUMN dalam hal ini Pertamina telah melakukan beberapa akuisisi sumur minyak di luar negeri (antara lain di Aljazair, Libya dan Qatar) untuk mengamankan pasokan minyak mentah. BUMN juga terus mendorong inovasi-inovasi di bidang energi terbarukan, misalnya pembangkit listrik tenaga angin dan studi pengembangan untuk mengolah batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME).

Sebagai bentuk dari keadilan sosial dalam pemerataan kesempatan memperoleh BBM, BUMN pun telah mewujudkan program “BBM Satu Harga” pada tahun 2016, sehingga harga BBM di Jawa dan di Papua bisa sama, sebuah capaian yang pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. Program ini sedang terus didorong sehingga juga dapat dirasakan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia yang akan diwujudkan dalam tahun 2017. Program satu harga ini juga akan dikembangkan untuk produk-produk yang lainnya, seperti semen, beras, gula dan minyak goreng melalui aktivitas sinergi BUMN dengan harapan bisa diwujudkan sebelum akhir tahun 2019.

Untuk menerangi masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, BUMN terus meningkatkan pembangunan infrastruktur kelistrikan, seperti pembangkit listrik, transmisi dan gardu induk. Pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 MW dan panjang transmisi 45.000 Km. Sampai dengan tahun 2016, persentase kemajuan pembangunan pembangkit sampai 20 Oktober 2016 yaitu mencapai 14.686 MW atau 41,96% dari target, sedangkan pembangunan jaringan transmisi kemajuannya sudah mencapai 49,74% atau setara 22.880 kilometer. Selanjutnya untuk pembangunan gardu induk telah mencapai 23,75% atau sebesar 25.650 MVA.

Pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk dilakukan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi yang sudah mencapai level 88,1% pada akhir tahun 2016. Peningkatan elektrifikasi akan terus diupayakan untuk mampu mencapai level di atas 91% pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga level 97% di tahun 2019.

Di bidang peningkatan ekonomi kerakyatan, BUMN menjalankan program Inklusi Keuangan, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank-bank BUMN selama ini terlibat aktif dalam penyaluran kredit-kredit kecil tersebut, dengan dukungan asuransi BUMN yaitu Askrindo dan Jamkrindo

nilai kapitalisasi pasar
25,2% di Bursa Efek
Indonesia

pengembangan
24 pelabuhan
strategis

2 juta TEUs/tahun
kapasitas pelabuhan
KTI dari 822 juta
TEUs/tahun

khususnya dalam penjaminan KUR. Pada tahun 2016 jumlah KUR yang telah tersalur mencapai sebesar Rp96 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 4,3 juta UMKM. Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2017 sebesar Rp110 triliun atau naik 15% dibandingkan dengan penyaluran tahun 2016.

Ke depan, Kementerian BUMN telah merencanakan program agar bank-bank BUMN dapat melakukan pergeseran proporsi pemberian KUR kepada sektor yang produktif dari sebesar 17% pada tahun 2016 menjadi sebesar 40% pada tahun 2017 dengan sebaran yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Program inklusi keuangan yang lain dilaksanakan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program “MEKAAR” yang merupakan program pembinaan khusus untuk ibu-ibu prasejahtera produktif non-bankable yang saat ini telah mencapai 432.364 nasabah pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 target nasabah “MEKAAR” diproyeksikan mencapai 2 juta. Satu hal yang patut dicatat dalam pembinaan program “MEKAAR” tersebut adalah para peserta mendapat pendampingan karakter, seperti kedisiplinan, kebersamaan, menghargai kebhinekaan, dan semangat nasionalisme.

Selanjutnya BUMN juga terlibat dalam mekanisme dan pelaksanaan distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang merupakan program Pemerintah. Program Bansos melalui Bank BUMN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kebijakan transaksi *non-cash*, dimana penerima Bansos akan menerima Kartu Bansos yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui *e-warong* yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Sosial.

BUMN juga telah bersinergi untuk membantu UMKM naik kelas lewat pembangunan Rumah Kreatif BUMN (RKB). Melalui program RKB UMKM didorong untuk merubah pola bisnis dari konvensional menjadi modern (*go modern*), dan selanjutnya menuju era digital (*go digital*), dan terus menuju penjualan secara

online (*go online*) dan pada akhirnya menuju global (*go global*). Pada tahun 2016 ini RKB didirikan di 100 Kabupaten/Kota dimotori oleh 7 (tujuh) BUMN) yaitu 4 Bank BUMN, Pertamina, PLN dan Telkom. Pada tahun 2017 seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 514 ditargetkan berdiri RKB dengan dukungan 25 (dua puluh lima) BUMN. Pada akhir tahun 2016 telah terdaftar 2.000 UMKM dan 2.275 UMKM yang listed di Blanja.Com dan pada akhir tahun 2017 ditargetkan 200 Ribu UMKM dengan 100 Ribu UMKM listed. Selanjutnya pada tahun 2019 target RKB mencapai 750 Ribu UMKM dengan 350 Ribu UMKM yang listed di Blanja.Com.

Bentuk sinergi lain yang dibangun BUMN antara lain adalah dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan 10 Destinasi Wisata Unggulan dengan target untuk menggaet 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019, Selain itu, BUMN juga bersinergi melalui Program “BUMN Hadir untuk Negeri” untuk membangun Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dan sejumlah rumah tinggal wisata (*homestay*) yang telah dijalankan di 20 desa di sekitar Candi Borobudur. Pembangunan Balkondes juga dilakukan di daerah-daerah wisata, seperti di desa Pingge dan Panglikuran Bali dan ke depan akan dilakukan di desa Ende Sasak Mataram serta desa-desa lainnya. BUMN juga bersinergi untuk melakukan pembinaan melalui penyediaan sarana dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar, serta pemberian pendidikan *softskill* kepariwisataan dan keterampilan pengelolaan usaha turisme bagi masyarakat di sekitar *homestay*.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, salah satu peran BUMN dalam memperkuat ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, keterjangkauan dan kestabilan harga, serta kualitas beberapa komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Upaya peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari bagaimana BUMN meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk maksud tersebut, BUMN juga menggagas diluncurkannya Kartu Tani yang mana dengan

Sambutan Menteri BUMN

pengembangan
9 bandara
berkapasitas
65 juta pax/tahun

pembangunan
342 kilometer
jalan tol baru

mewujudkan
“BBM Satu Harga”

kartu tersebut para petani dapat kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan pembiayaan terkait dengan aktivitas pertanian dan untuk biaya hidup selama masa musim tanam. Kartu Tani tersebut akan berisi data petani baik lahan maupun masa tanam sehingga akan diketahui dengan mudah kapan para petani akan memanen. Kartu Tani tersebut merupakan bagian sinergi antara bank-bank BUMN (Himbara) dengan Bulog, Pertani, SHS, Pupuk Indonesia. Pada tahap awal, tahun 2016, Kartu Tani diimplementasikan kepada para petani tebu, dan pada tahun 2017 dilakukan distribusi Kartu Tani untuk 1,4 juta petani di daerah Jawa Tengah dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi Kartu Tani ini terus akan dilaksanakan sehingga seluruh petani di Indonesia pada akhirnya dapat memanfaatkan Kartu Tani untuk menopang aktivitas pertanian.

Selain itu, dalam program pangan, BUMN harus berperan lebih nyata dan optimal agar ketersediaan dan harga komoditas lebih terjamin di masyarakat. Perum Bulog misalnya, telah memperluas implementasi “Rumah Pangan Kita” (RPK) dan outlet yang tersebar di berbagai daerah. Sampai dengan tahun 2016 telah dibuka 6.369 RPK dengan target pada tahun 2017 mencapai 30.000 RPK melalui pola kemitraan dan tambahan 150.000 outlet kerjasama dengan agen bank-bank BUMN. Pembukaan RPK ini untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. RPK akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah-wilayah perbatasan, antara lain di Kaltara dan Papua.

Pada tahun 2015-2016, BUMN juga melakukan revitalisasi pabrik gula guna meningkatkan kapasitas produksi yang dimiliki menuju swasembada gula Nasional. Revitalisasi pabrik gula dibutuhkan mengingat banyak mesin pabrik yang sudah tua dan tidak efisien. Program revitalisasi dilakukan dengan jalan memetakan pabrik gula yang perlu dipertahankan, perlu dibesarkan dan yang akan ditutup. Revitalisasi pabrik gula ini tidak akan mempengaruhi petani tebu, mengingat BUMN akan

menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pabrik gula untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Revitalisasi ini akan menghasilkan peningkatan kapasitas produksi giling tebu di 9 pabrik gula dari 1,2 juta ton menjadi 2,1 juta ton pada tahun 2018 dari bahan baku tebu sebesar 25 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tebu 25 juta ton dilakukan dengan memperbaiki produktivitas tebu dari 76 ton per ha menjadi 95 ton per ha dan luas areal meningkat dari 257.182 ha pada tahun 2016 menjadi 268.974 ha pada tahun 2017. Hasil revitalisasi Pabrik Gula tersebut diharapkan mampu untuk mengembangkan energi terbarukan berupa produksi listrik Kogenerasi sebesar 90 MW dan Ethanol sebanyak 100 KLPD. Disamping itu terdapat potensi pendapatan yang berasal dari produksi Bio-fertilizer dari Filtercake pabrik gula tebu dan produk turunan pabrik ethanol seperti Liquid CO₂, Purified Yeast dan Bio Gas.

Walau demikian, kami menyadari bahwa BUMN sektor pangan belum optimal dalam menjalankan tugas sebagai stabilisator harga pangan, terutama beras dan gula. Kementerian BUMN terus akan mendorong BUMN sektor pangan bisa lebih berperan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, pendistribusian pangan dan stabilisasi harga pangan sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Selain menjalankan lini bisnis utama, sejak dua tahun terakhir ini BUMN melakukan program sosial kemasyarakatan secara terkoordinasi melalui Program “BUMN Hadir untuk Negeri” yang dilaksanakan di 34 Provinsi. Program ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya, program Siswa Mengenal Nusantara, Bedah Rumah Veteran, BUMN Mengajar, Pembangunan MCK, Penyediaan Sarana Air Bersih, Pembangunan Tempat Penitipan Anak di Pasar Tradisional, Pembinaan Mantan Atlet dan Eks-Narapidana, pelaksanaan Upacara HUT-RI yang dipimpin oleh Direktur Utama BUMN di setiap propinsi, dan pembinaan Desa Tertinggal yang ditargetkan sebanyak 71 Desa di seluruh Indonesia.

pembangunan
pembangkit **14.686 MW**,
transmisi **22.880 Km**, dan
gardu induk **25.650 MVA**

Rp96 triliun
penyaluran KUR
untuk **4,3 juta**
nasabah UMKM
nasabah

432.364 orang
nasabah “Mekaar”
tahun 2016 menjadi
2.000.000 orang
di tahun 2017

Program “BUMN Hadir untuk Negeri” di samping dilakukan sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan, beberapa diantaranya juga dirancang untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan insan BUMN, yaitu program Siswa Mengenal Nusantara, Bedah Rumah Veteran, BUMN Mengajar, dan Upacara HUT-RI yang dipimpin oleh Direktur Utama BUMN di setiap propinsi.

Berpedoman pada *roadmap* pengembangan BUMN 2014-2019, sederet torehan pencapaian yang sudah diraih BUMN hingga akhir tahun 2016 adalah prestasi yang patut disyukuri bersama, akan tetapi masih banyak target yang harus dikejar dengan kerja keras. Untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing BUMN sehingga mampu berkompetisi pada level nasional, regional maupun internasional. Dengan tantangan kondisi perekonomian, terutama perekonomian global, termasuk di dalamnya negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok, masih terus berupaya memulihkan perekonomiannya. Untuk itu, seluruh kekuatan ekonomi di dalam negeri, terutama BUMN sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus terus dijaga dan diberdayakan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

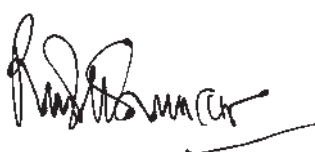
Berbagai pencapaian besar di tahun 2016 ini tidak dapat dicapai tanpa kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan segenap karyawan BUMN yang telah bekerja keras dengan tulus ikhlas untuk mencapai target-target perusahaan, termasuk menuntaskan penugasan pemerintah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian BUMN yang telah memberikan dedikasi dan dukungan sehingga program-program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik.

Sederet tugas besar sudah menanti kita di tahun 2017. Kita harus bersinergi dan berkomitmen sebagai grup BUMN seperti mengejar prioritas yang ada di Roadmap BUMN diantaranya mendorong 6 BUMN masuk ke Fortune 500 Global di tahun 2019. Kita juga ingin meningkatkan kontribusi BUMN terhadap Negara menjadi Rp 635 triliun.

Akhirnya, kami juga berharap kepada seluruh insan Kementerian BUMN dan BUMN untuk menjunjung tinggi integritas, terus bekerja secara profesional, memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/ GCG*), sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Marilah kita wariskan BUMN ini kepada anak cucu bangsa di masa mendatang. Selamat bekerja dan berkarya bagi Indonesia negeri tercinta.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera
Om shanti shanti shanti om



Rini Mariani Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara

Tinjauan Kinerja 2016



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA



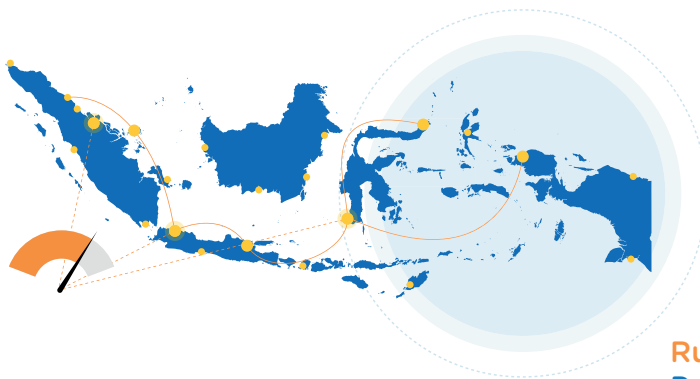
Konektivitas



Konektivitas Laut

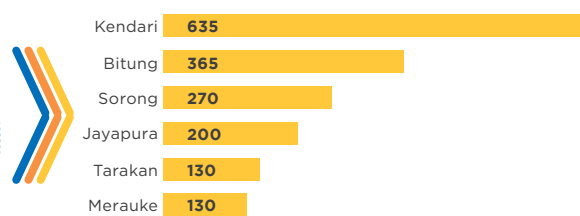
Mewujudkan Poros Maritim Guna
Merajut Indonesia Melalui Laut

Target: Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis
Nilai Proyek: Rp70 triliun

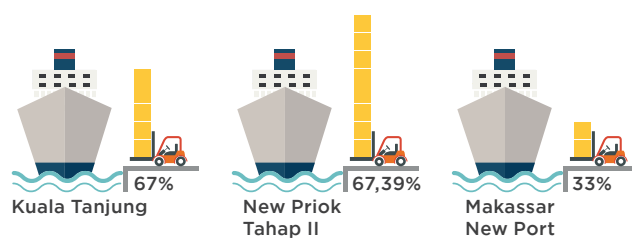


**Meningkatkan Konektivitas
Indonesia Timur**

Mengembangkan 9 Pelabuhan
 Nilai 6 proyek besar (Rp miliar)



Progres sampai dengan 2016



Rute Tol Laut 2016
Pelni melayani 6 Rute Tol Laut



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Saat menyampaikan sambutan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur tahun 2015, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastruktur antarpulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Jalan antarpulau ini harus benar-benar dapat direalisasikan untuk mempercepat transportasi antar pulau di Indonesia.

Konektivitas Laut

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Jokowi memaparkan lima pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.

Kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Terakhir, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini penting demi menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.

Satu di antara pilar penting Poros Maritim adalah konektivitas melalui “tol laut”. Dalam rangka mendukung program tol laut pemerintah yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional serta membawa Indonesia menjadi negara kelautan terdepan di dunia, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), melakukan upaya-upaya dalam perbaikan hard and soft infrastructure, konfigurasi ulang pelabuhan serta penambahan alat bongkar muat yang dapat meningkatkan kapasitas di Pelabuhan.

Dari identifikasi terhadap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2015 hanya 6 pelabuhan yang dapat menerima kapal dengan kapasitas lebih dari 1.000 TEU, yaitu Belawan, Jakarta, Makassar, Gorontalo dan Bitung. Peningkatan kapasitas dan produktivitas pelabuhan merupakan factor penting yang dapat meningkatkan investasi ke Indonesia dan membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara

Sejak peletakan batu pertama (*groundbreaking*) langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Januari 2015, *progress* pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung Tahap I, yaitu terminal multipurpose sampai semester II tahun 2016 sudah mencapai 64,46%. PT Pelindo I (Persero), menargetkan Kuala Tanjung sudah dapat beroperasi pada semester II-2017.

Proyek yang akan menelan investasi sebesar US\$400 juta tersebut direncanakan menjadi pintu gerbang perdagangan Indonesia wilayah Barat atau disebut sebagai International Hub Port. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai International Hub Port telah dicanangkan pemerintah dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang menjadi bagian dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Performa pelabuhan Kuala Tanjung ini bisa disetarakan dengan Singapura, yang dapat disinggahi kapal-kapal Ultra Large Container Vessel (ULCV) berkapasitas 18.000 TEUs. Kedalaman dermaganya 17 meter di bawah permukaan laut.

Pelabuhan ini akan dikembangkan dengan model *industrial gateway port*, yaitu pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. PT Pelindo I (persero) menggandeng operator Pelabuhan Belanda, yakni Port of Rotterdam (POR) selaku pemberi jasa konsultasi. Jasa konsultasi POR akan dilakukan dalam dua cakupan, yaitu konsultasi pengembangan SDM Pelindo I dan konsultasi pengembangan konsep area industri Kuala Tanjung.

Pembangunan Kuala Tanjung dibagi dalam empat tahap. Pertama, dibangun Terminal Multipurpose, yang terdiri dari dermaga sepanjang 400 meter, dengan panjang trestle 2,7 km, dilengkapi tangki timbun kapasitas 145.000 ton dan kontainer yard yang memiliki berkapasitas 400.000 TEU's (Twenty Foot Equivalent Unit atau TEUs at Unit). Terminal ini dapat melayani curah cair hingga 3 juta ton per tahun, curah kering 1,5 juta ton dan untuk peti kemas sekitar 450 hingga 500 ribu Teus.



Tahap kedua, penambahan dermaga menjadi 1.000 meter dan pembangunan kawasan industrial seluas 1.000 Ha, pada tahun 2016-2018. Sedangkan tahap ketiga pembenahan kegiatan peningkatan transshipment seluruh kegiatan bongkar muat dari Kuala Tanjung ke berbagai pelabuhan di dunia (tahun 2017-2019). Tahap empat, pembangunan Kawasan Kuala Tanjung sebagai area pemukiman dan menjadi kota pelabuhan yang modern (City Port), pada tahun 2021-2023.

Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan menjadi pelabuhan terbesar di Sumatera Utara dengan luas 1.900 hektare. Sesudah pelabuhan itu disatukan dengan kawasan industri di sekitarnya, total luas lahan mencapai 5.500 hektare.

Ke depan, Pelabuhan Kuala Tanjung akan terkoneksi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun yang berjarak sekitar 15 Km. Kawasan seluas 4.000 Ha itu juga direncanakan terhubung melalui jalur transportasi darat berupa jalur kereta api Kuala Tanjung – Sei Mangkei. Selain itu, ada akses jalan tol Tebing Tinggi - Kuala Tanjung - Sei Mangkei.

Pembangunan dan Pengembangan Kendari New Port

Kendari New Port atau disingkat KNP merupakan rencana pelabuhan baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang masuk dalam salah satu rangkaian rencana pembangunan dan pengembangan 9 pelabuhan yang dikelola PT Pelindo IV. Pelabuhan ini disiapkan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur kepelabuhanan yang optimal, yang antara lain untuk: menambah kapasitas pelayanan pelabuhan, mempercepat konektivitas antarwilayah, serta memangkas biaya logistik dalam kerangka konsep Tol Laut. S

esuai perencanaan, KNP ditargetkan sudah mulai beroperasi pada 2019 mendatang dengan kapasitas sebesar 300.000 TEUs dengan luas mencapai 10 ha. Akhir tahun 2016, proses lelang sudah dimulai dan segera dilakukan pengerjaan fisik untuk container yard dan reklamasi. Alokasi anggaran sebesar Rp935 miliar, dengan rincian Rp635 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kas internal Rp300 miliar, pembangunan KNP tersebut seiring dengan estimasi pertumbuhan arus petikemas yang masuk Kendari. Dengan demikian, kapasitas pelabuhan diproyeksi bakal mencapai titik jenuh

Konektivitas Laut

pada beberapa tahun ke depan. Saat ini, kapasitas pelabuhan eksisting di Kendari hanya berkisar 100.000 TEUs/tahun dengan luas 2,3 ha.

Pembangunan Makassar New Port

Pembangunan Makassar New Port (MNP) bertujuan untuk memindahkan sebagian kegiatan yang ada di Pelabuhan Makassar saat ini, sehingga efektivitas bongkar muat barang dapat lebih meningkat. Keberadaan MNP akan ikut menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara luas dan Indonesia secara umum.

Pembangunan MNP itu sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Infrastruktur. Sejak pelaksanaan ground breaking Makassar New Port tanggal 22 Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan Makassar New Port Paket A hingga akhir tahun 2016 telah mencapai 30,02% dan ditargetkan rampung pada tahun 2018. Total alokasi anggarannya mencapai Rp1,8 triliun, yang dibagi tiga paket: Rp328 miliar (Paket A), Rp1,055 triliun (Paket B) dan Rp228 miliar (Paket C).

Untuk mendukung pelabuhan tersebut, pemerintah juga membangun akses jalan di sisi laut. Pembebasan lahan telah dilaksanakan secara simultan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Secara fisik, MNP diwujudkan dalam beberapa tahap. Saat ini adalah tahap IA yang meliputi pembangunan jalan sisi darat dilanjutkan sisi laut. Sebagaimana diketahui, tahap IA meliputi pembangunan jalan, dermaga sepanjang 320 meter, dengan kedalaman -14 m LWS, lapangan kontainer seluas 16 ha, dilengkapi peralatan berupa 3 Unit CC, 9 unit RTG, head truck and chassis, power plant dan pendukung dari sisi IT.

Secara keseluruhan, total kapasitas pelabuhan Makassar akan mencapai 4,2 juta TEUs/tahun, dengan panjang dermaga 2.850 meter dan lapangan penumpukan 171 ha. Seperti program Tol Laut yang lain yang mengedepankan konektivitas, pelabuhan MNP ini juga akan terkoneksi dengan jalur Rel kereta api Makassar-Pare-Pare dan Kawasan Industri Makassar (Kima). Proyek MNP adalah proyek Sinergi antara BUMN dan Pemerintah Daerah (provinsi

maupun kota) telah berjalan dengan baik untuk mewujudkan Makassar New Port dapat selesai sesuai jadwal yang ditargetkan.

Pengembangan Pelabuhan Bitung

Pemerintah menyiapkan Bitung-Sulawesi Utara menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik dan simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditas di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan. Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Proyek ini digarap oleh PT Pelindo IV (Persero). Sesuai rencana, proyek pembangunan tahap 1 telah dimulai pertengahan tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada 2017. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp506,50 miliar, dengan skema pembiayaan Rp365 miliar menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Rp141,50 miliar dari kas internal Perseroan.

Selain merehabilitasi Pelabuhan Bitung, pihak Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN pengelola pelabuhan akan menambah dermaga dengan panjang 250 meter dan mereklamasi seaway seluas 5 hektar. Ke depan, akan ada peningkatan kapasitas lapangan penumpukan dari yang saat ini sebanyak 300.000 TEUs/tahun, menjadi kurang lebih 700.000 TEUs/tahun. Jika digabung dengan lapangan penumpukan yang ada di Pelabuhan Bitung konvensional yang memiliki luas sekitar 7,5 hektare, maka total daya tampung yang tersedia bisa mencapai antara 1,2 juta hingga 1,5 juta TEUs per tahun.

Pelabuhan ini akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Selain itu, keberadaan pelabuhan hub internasional Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan (batubara, minyak bumi dan kayu lapis).

Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung sepanjang 39 kilometer sebagai infrastruktur penunjang. Dukungan lain yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dukungan air baku, yakni saat ini sedang dilakukan pembangunan Waduk Kuwil di Minahasa Utara dan pengendalian banjir di Kota Manado.

Pengembangan Pelabuhan Jayapura

PT Pelindo IV (Persero) telah mulai mengembangkan Pelabuhan Jayapura dan akan difungsikan mendukung program Tol Laut pemerintah. Pelabuhan Jayapura merupakan salah satu pelabuhan kelolaan Pelindo IV (Persero) yang masuk dalam perencanaan revitalisasi 9 pelabuhan yang ditargetkan rampung 2018 dan beroperasi secara penuh pada tahun selanjutnya. Sesuai rencana, Pelindo IV menyiapkan anggaran Rp200 miliar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pada awal April 2016 yang lalu, rangkaian pengembangan pelabuhan Jayapura juga telah dimulai melalui pembukaan jalur pelayaran langsung (direct call) ke negara tujuan ekspor China dengan memberangkatkan 40 kontainer komoditi kayu olahan. Pengembangan infratraktur maupun supratraktur di pelabuhan Jayapura akan dilakukan secara simultan agar ke depannya mampu memangkas ongkos logistik di wilayah timur khususnya di Papua.

Pengembangan Pelabuhan Tarakan

Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), merupakan salah satu pelabuhan yang akan dijadikan proyek Tol Laut. Pelabuhan ini akan dihubungkan dengan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. PT Pelindo IV (Persero) mengalokasikan belanja modal yang bersumber dari dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp130 miliar untuk membangun lapangan penumpukan peti kemas di pelabuhan Tarakan. Perseroan juga akan menggelontorkan investasi dari kas internal sebesar Rp203,80 miliar

untuk pengembangan pelabuhan Tarakan secara komprehensif. Pengerjaan juga meliputi reklamasi lahan di sekitar pelabuhan dan memindahkan terminal penumpang serta menambah panjang dermaga 150 meter dari yang existing saat ini 381 meter.

Khusus untuk lapangan penumpukan petikemas yang akan dibangun nantinya akan memiliki daya tampung 146.000 TEUs/tahun. Sejauh ini, lapangan penumpukan yang ada di pelabuhan Tarakan hanya berkapasitas 46.000 TEUs per tahun, dengan rerata trafik per tahun yaitu 37.000 TEUs. Saat ini luas lapangan petikemas di Pelabuhan Tarakan hanya 1,2 ha, akan diperbesar dengan cara direklamasi seluas 5,3 ha. Sementara itu, rencana pemindahan lokasi terminal penumpang di pelabuhan Tarakan akan berada di bagian depan kawasan pelabuhan, yang mana terminal penumpang existing agak menjorok ke belakang.

Jalur Konektivitas melalui PELNI

BUMN melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) membuka 3 rute baru pelayaran. Ketiga rute tersebut yaitu rute Jakarta-Sumatera Bagian Barat, Surabaya-Kalimantan Bagian Timur, serta rute Surabaya-Maluku.

Diharapkan, penambahan rute dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Di antara rute baru itu misalnya, pelayaran menuju Padang, Sumatera Barat dibuka sejak tahun 2016. Selain ke Padang, rute KM Lawait juga lanjut ke Gunung Sitoli dan Sibolga.

Pelayaran kapal ke Padang sebelum tiket pesawat murah dilayani Pelni secara rutin dan terjadwal dengan kapal Pelni, namun seiring makin menurunnya jumlah penumpang akibat LCC pesawat udara, pelayaran dihentikan sekitar 5 tahun silam. Pelni melayani rute ke Padang, Sumatera Barat hanya setahun sekali sesuai permintaan masyarakat. Kerinduan warga Padang-Gunung Sitoli dan Sibolga yang tinggal di Jabodetabek, Jawa Barat dan kota lainnya di Jawa akan terobati bila mudik dengan kapal Pelni.

Konektivitas Laut

Pengembangan Pelabuhan New Priok

Pembangunan Terminal New Priok adalah proyek pembangunan pelabuhan terbesar di Indonesia saat ini. Pelabuhan dengan nilai total investasi sebesar Rp24,8 triliun ini diproyeksi akan menjadi Pelabuhan laut terbesar di Asia Tenggara, yang dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas 3 terminal peti kemas dan 2 terminal produk migas, serta tahap dua meliputi 4 terminal peti kemas. Terminal-terminal tersebut direncanakan beroperasi pada tahun 2016, 2023, 2024 dan 2027. Masing-masing terminal petikemas didesain untuk kapasitas 1,5 juta TEUs/tahun. Sementara untuk terminal produk diproyeksikan berkapasitas 10 juta meter kubik per tahun. Pembangunan tahap II meliputi pembangunan 4 terminal petikemas dengan total kapasitas 6 juta TEUs/tahun.

Pembangunan New Priok ini telah banyak menarik minat investor, mengingat sifatnya yang sangat strategis dalam sektor kemaritiman Indonesia, khususnya untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang sejalan dengan visi pemerintah. New Priok akan menjadi mata rantai jaringan logistik nasional yang berperan besar sebagai katalisator harga karena akan memiliki andil besar dalam menurunkan biaya logistik. Secara beriringan, kapasitas dan efisiensi dari jaringan logistik nasional Indonesia akan meningkat dan memiliki level produktivitas yang sebanding dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Pelabuhan ini juga akan meningkatkan kemampuan dalam melayani kapal kontainer yang lebih besar karena memungkinkan kapal kontainer kelas Triple E melewati Indonesia tanpa perlu transshipment di pelabuhan lain. Hingga saat ini, kapal Triple E merupakan kelas terbesar dari kapal kontainer dengan kemampuan membawa hingga 12.000 – 15.000 TEUs. Sementara saat ini, fasilitas terminal pelabuhan existing di Pelabuhan Tanjung Priok hanya melayani kapal dengan kapasitas maximum 6.000 TEUs.

Dari seluruh terminal yang akan dibangun, saat ini Terminal Peti Kemas 1, dengan nilai investasi sebesar Rp4,2 triliun sudah dioperasikan dan telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 September 2016. Terminal Peti Kemas 1 Pelabuhan Kalibaru siap menampung kapal kontainer berukuran besar. Didesain untuk bersandar kapal kontainer berkapasitas hingga 18.000 TEUs adalah kerja sama PT Pelindo II (Persero) dengan Mitsui, Port Singapore Authority, dan Nippon Yusen Kaisha tersebut memiliki lapangan terminal petikemas seluas 32 ha, dengan kapasitas 1,5 juta TEUs/tahun. Total panjang dermaga 450 meter dan akan bertambah menjadi 850 meter. Sementara kedalamannya mencapai -14 meter LWS dan akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter LWS.

Pelabuhan New Priok ini beroperasi secara komersial dengan dukungan kesiapan operasional terminal petikemas. Kesiapan tersebut dari sisi infrastruktur, suprastruktur, sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate, serta sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah. Instansi yang terlibat antara lain Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.

Pelabuhan New Priok ini beroperasi secara komersial dengan dukungan kesiapan operasional terminal petikemas. Kesiapan tersebut dari sisi infrastruktur, suprastruktur, sistem informasi di sisi dermaga, lapangan dan gate, serta sinkronisasi proses pelayanan antara terminal dengan instansi-instansi pemerintah. Instansi yang terlibat antara lain Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, maupun dengan para pelaku usaha logistik dan pemilik barang.

Pelabuhan yang diproyeksi akan menjadi bandar laut terbesar di Asia Tenggara itu dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk migas. Adapun tahap dua meliputi empat terminal peti kemas. Dari seluruh terminal yang akan dibangun, saat ini baru Terminal Peti Kemas 1 yang siap dioperasikan.

Pembangunan Pelabuhan Seget, Sorong

Pembangunan pintu gerbang Tol Laut wilayah timur Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di Pelabuhan Seget, Kabupaten Sorong Distrik Seget, Provinsi Papua Barat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pembangunan Pelabuhan Seget harus segera dimulai dan dipercepat. Menurut PT Pelindo II (Persero), sebagai pengelola Pelabuhan Seget, pihaknya sedang melakukan pembebasan lahan dan mempersiapkan penunjang pembangunan lainnya.

Pelabuhan dan kawasan industri ini diperkirakan membutuhkan areal seluas 7.500 hektar ini dan direncanakan akan memiliki kapasitas untuk menampung petikemas yang cukup besar. Pada tahap awal Pelabuhan Sorong akan dibangun dengan kapasitas 500.000 TEUs/tahun, pelabuhan ini akan terintegrasi itu meliputi Pelabuhan Kota Sorong, Pelabuhan Arar sebagai spoke dan Seget sebagai hub. Pembahasan final tentang master plan rencana pembangunan pelabuhan induk secara terintegrasi di wilayah Sorong itu telah dilakukan pada 24 Oktober 2015.

Untuk membiayai pembangunan Pelabuhan Seget, Pelindo II telah menerbitkan obligasi berdenominasi mata uang asing (global bond) senilai Rp20,8 triliun. Selain untuk Pelabuhan Seget senilai Rp3 triliun, dana yang didapat dari penjualan surat utang ini juga akan digunakan untuk proyek pelabuhan lain.

Pelabuhan Seget diarahkan untuk menjadi pelabuhan internasional yang akan menjadi poros transportasi laut di kawasan Pasifik untuk jalur Australia, Jepang, Fiji serta Asia Tenggara. Sedangkan, Pelabuhan Kota Sorong yang dikelola PT Pelindo IV akan dikembangkan dengan menambah dermaga dan lapangan penumpukan petikemas. Sementara untuk pelabuhan Arar, yang dikelola Kementerian Perhubungan, akan akan dikembangkan menjadi pelabuhan multipurpose pendukung pengangkutan hasil industri yang sudah ada saat ini, yaitu semen dan curah aspal.

Pengembangan Pelabuhan Merauke

PT Pelindo IV (Persero) Cabang Merauke telah mulai mengembangkan Pelabuhan Merauke dan akan difungsikan mendukung program Tol Laut pemerintah. Pengembangan yang dimaksud adalah pembangunan dermaga berukuran 75x30 meter dan proyek pemasangan Fix Crane di Pelabuhan Merauke. Anggaran proyek bersumber dari dana Penyertaan Modal (PMN) PT Pelindo IV sebesar Rp124,5 miliar. Jika dermaga pelabuhan Merauke ini ditambah menjadi 75 meter, maka total panjang dermaga adalah 333 meter. Karenanya, dermaga ini dipastikan mampu menampung 3-4 kapal berukuran 70 meter dengan bobot 4.000-6.000 GT. Pengembangan tahap 1 ini dikonsentrasikan di sisi kiri pelabuhan, guna menambah mobilisasi armada. Seperti diketahui, jasa pengangkut logistik dan mobilisasi armada saat ini mulai bergeliat.

Pelaksanaan Tol Laut

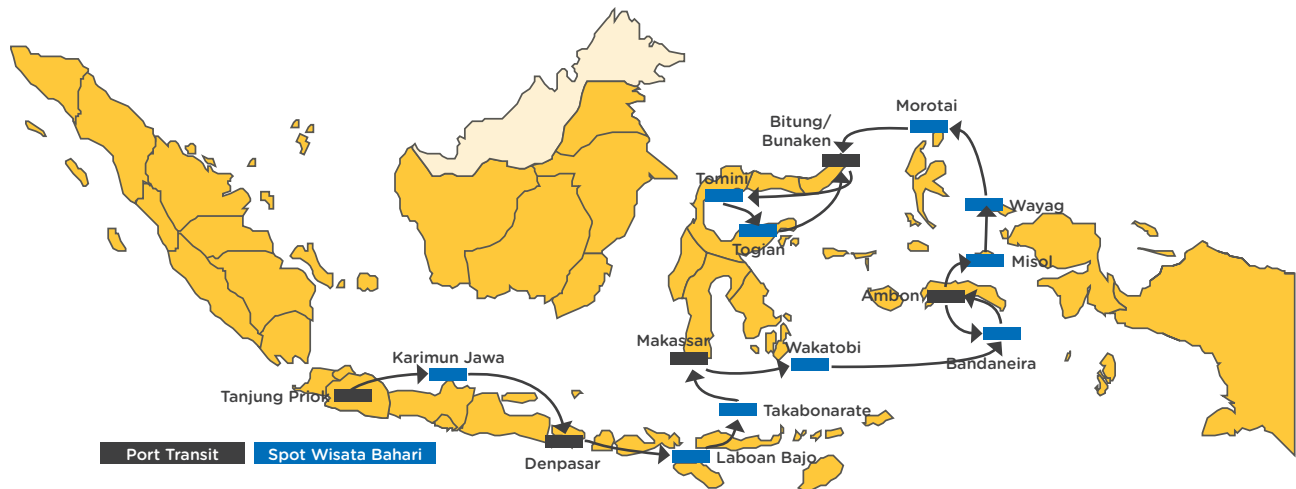
Hingga tahun 2016, pelaksanaan Tol Laut sudah berjalan untuk enam trayek. Tujuan dari Tol Laut adalah menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok di Indonesia timur dan barat.

Tol laut tidak hanya terkait dengan pengadaan pelayaran yang rutin, namun juga termasuk pengiriman barang dari pelabuhan ke distributor dan konsumen (*port to door*) untuk memperlancar kegiatan distribusi barang. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah TRV (*turn round voyage*) kapal-kapal Tol Laut masih belum mencapai target. Misalnya Trayek 1: hingga bulan ke 10 hanya melayani 8 kali pelayaran dari target 10 kali dan Trayek 5: hingga bulan ke-5 hanya tercapai 4 kali, dari target seharusnya 8 kali.

Selain itu, Untuk pelabuhan tujuan dengan kekuatan dermaga yang terbatas, perlu dilakukan pengiriman barang general cargo (*non container*). Dengan demikian, kegiatan bongkar muat dapat dilakukan lebih fleksibel memperhitungkan beban maksimal dengan memperhitungkan daya dukung dermaga.

PT Pelni sebagai pelayaran di jalur hub, sedangkan PT ASDP akan berperan dalam jalur spoke. Khusus untuk PT ASDP melayani 195 rute lintasan dengan

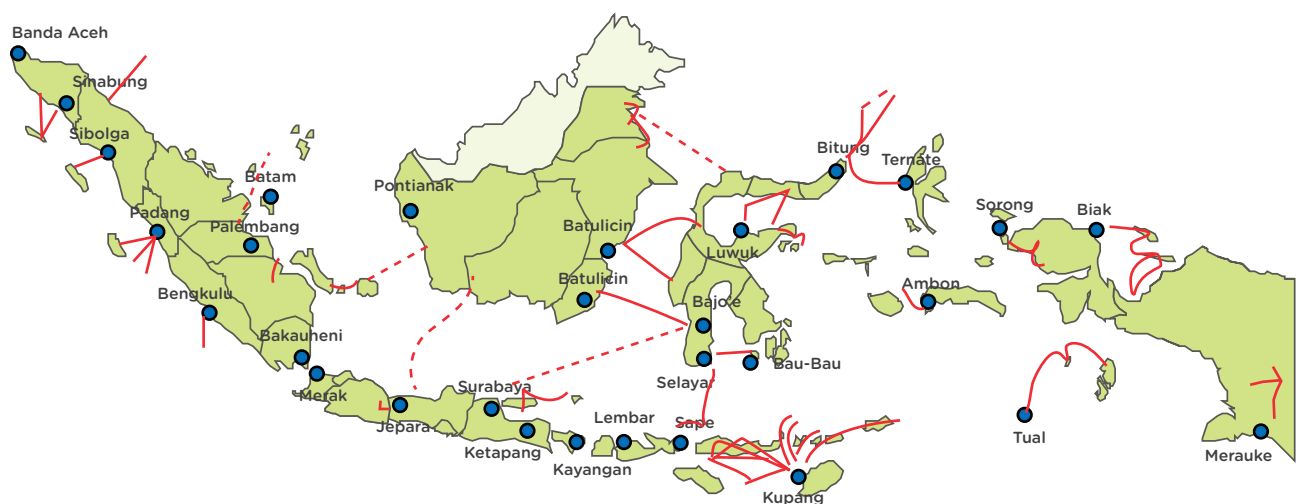
sebagian besar 143 rute lintasan tersebut adalah rute perintis di seluruh daerah di Indonesia.



BUMN melalui PT Angkutan Sungai Dan Penyebrangan (PT ASDP) telah menjadi jembatan yang menghubungkan antara jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan (sungai/ danau), berperan dalam memperbaiki performa logistik nasional dengan menjalankan peran pada sisi coastal shipping.

Dalam mendukung wisata maritim kedua perusahaan berupaya mendorong pembangunan industri pariwisata maritim, PT Pelni telah membuka pelayanan paket wisata bahari pada 10 destinasi wisata yang telah ditetapkan kementerian pariwisata.

Demikian juga dengan PT ASDP telah menyiapkan 8 Unit kapal penyebrangan dilintasan-lintasan menuju lokasi wisata antara lain Danau toba, Raja Ampat, Karimun Jawa, Belitung, dan Nias.



Konektivitas Darat

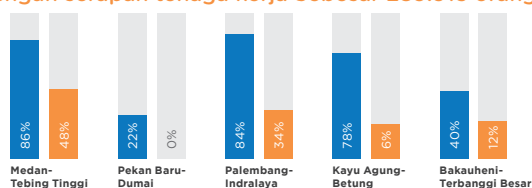
Menghidupkan Tol yang Mangkrak dan Mengatasi Kendala Pendanaan Tol

Menyulam Ruas Jakarta-Surabaya

PT Waskita Karya & PT Jasa Marga mengambil alih 8 ruas tol mangkrak. Nilai Investasi Rp54,22 triliun

Panjang Tol Trans
Jawa Bertambah2x
LipatMendobrak Tantangan
Finansial Tol Trans Sumatra

Menghadapi kendala dalam pendanaan, proyek tetap berjalan dengan sinergi antara PT Hutama Karya dan PT Sarana Multigriya Infrastruktur untuk membiayai pembebasan tanah. PT Hutama Karya juga diperbolehkan menalangi biaya tersebut. Nilai investasi Rp56 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 289.913 orang.

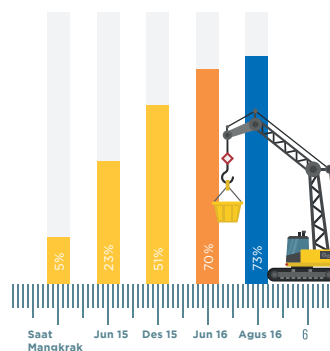


Visi dan misi Nawacita untuk membangun konektivitas dalam rangka menunjang produktivitas, daya saing dan kesejahteraan. Saling sambung antarwilayah juga dilakukan di darat melalui proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan tol yang merupakan satu di antara proyek prioritas pemerintah.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol akan mendatangkan efek berantai. Konektivitas yang tercipta melalui pembangunan jalan tol akan mempercepat distribusi hasil pertanian dan industri ke berbagai tempat.

Urai Kebuntuan
Tol Becakayu

Pekerjaan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang sempat mangkrak sejak 1997 kini mulai terlihat



Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi

Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dan masuk agenda pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan jalan tol yang memiliki panjang 61,7 kilometer tersebut dibagi menjadi 7 seksi. Seksi I dan II Ruas Medan-Perbarakan-Kualanamu sepanjang 17,8 km dibangun oleh Pemerintah. Sisanya, Ruas Parbarakan-Tebing Tinggi sepanjang 44 km dibangun oleh PT Jasa Marga Kualanamu Tol. Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas tol ini adalah Rp4,072 triliun dengan biaya tanah Rp441 miliar dan biaya konstruksi sebesar Rp1,759 triliun. Hingga Tahap 1 2016, progress pembebasan lahan mencapai 86%, dengan prosentase pekerjaan konstruksi sebanyak 48%.

Jalan tol ini dalam rancangannya terkoneksi dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). Jalan tol juga akan menghubungkan Kota Medan dengan Bandara Kualanamu. Selain itu, jalan tol ini pun akan menghubungkan kota Medan dengan kawasan industri Kuala Tanjung dan kawasan pariwisata Danau Toba.

Pembangunan Ruas Tol Medan-Binjai

Jalan Tol Medan-Binjai adalah ruas tol sepanjang 16,8 kilometer yang akan menghubungkan dua kota di Sumatera Utara, yaitu Medan dan Binjai. Jalan tol ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.048 km yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh dan termasuk dalam 8 proyek prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 5 tahun masa kepemimpinannya 2014-2019.

Ruas tol Medan-Binjai terbagi ke dalam 3 seksi: Seksi I Tanjung Mulia-Helvetia, Seksi II Helvetia-Semayang, Seksi III Semayang-Binjai. Kebutuhan biaya investasi untuk membangun ruas ini mencapai Rp1,69 triliun, biaya konstruksi mencapai Rp1,2 triliun dan biaya pembebasan lahan sekitar Rp495 miliar.

Sejak peletakan batu pertama (*groundbreaking*) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 27 Januari 2015, hingga semester I tahun 2016 progres pengadaan lahan sudah mencapai 82% dan pekerjaan konstruksi mencapai 33%. PT Hutama Karya (Persero) selaku BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol, menargetkan pada tahun 2018 jalan tol Medan-Binjai bisa beroperasi seluruhnya. Jalan tol Medan-Binjai akan membagi beban kendaraan dengan Jalan Medan-Binjai yang merupakan salah satu ruas terpadat Jalan Raya Lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh.

Pembangunan Ruas Tol Pekanbaru-Dumai

Ruas Tol Pekanbaru-Dumai merupakan proyek Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 135 km yang membelah 5 wilayah di Provinsi Riau, antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Jalan tol ini merupakan 1 dari 3 jalan tol terpanjang di rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera.

Jalan tol Pekanbaru-Dumai dibagi dalam 6 bagian (seksi), yakni Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas-Kandis Selatan, Seksi III Kandis Selatan-Kandis Utara, Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan, Seksi V Duri Selatan-Duri Utara, dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Ruas terpendek adalah seksi I sejauh 9,2 kilometer, sementara seksi lainnya di atas 20 kilometer.

Dari catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kebutuhan dana untuk memuluskan proses pembebasan lahan di proyek jalan tol ini mencapai Rp974 miliar, sementara biaya konstruksinya diperkirakan mencapai Rp9,532 triliun. Untuk urusan biaya investasi, diperkirakan kebutuhan totalnya mencapai Rp17,347 triliun. PT Hutama Karya, selaku BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol, akan menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menalangi biaya pembangunan Tol Trans Sumatra itu.

Meski belum dilakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*), proyek jalan tol ini sudah mulai berjalan, terutama untuk pembebasan lahan sebanyak 22%. PT Hutama Karya menargetkan pada tahun 2019 jalan tol Pekanbaru-Dumai bisa beroperasi seluruhnya.

Pembangunan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar

Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,41 km yang sedang dalam tahap pembangunan, rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan.

Pembangunan dibagi dalam 4 Seksi: Seksi 1 yang dikerjakan PT PP (Persero) Tbk, Seksi 2 pekerjaan konstruksinya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Seksi 3 ditangani PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Seksi 4 dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sejak dilakukan *groundbreaking* oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, progress pengadaan lahan ruas tol terpanjang di Jalur Trans Sumatera ini sudah mencapai 40%, dengan pekerjaan konstruksi per Semester I-2016 sebesar 12%. Ditargetkan selesai tahun 2018.

Konektivitas Darat

Total biaya konstruksi dan pembebasan lahan yang diperlukan dalam pembangunan ruas tol ini berturut-turut adalah Rp12,220 triliun dan Rp1,196 triliun.

Jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan bagian dari rangkaian jalan tol Trans Sumatera 2.048 km yang menghubungkan Bakauheni hingga Aceh di mana, sepanjang 666,5 km yang terdiri dari 8 Ruas Jalan Tol bakal menjadi Prioritas selama periode 5 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2014-2019.

Pembangunan Tol Kayuagung-Betung

Tol Kayuagung-Betung merupakan salah satu megaprojek Trans Sumatera sepanjang 111,69 kilometer. Jalan tol ini membentang dari Kayuagung (Ogan Komering Ilir) sampai Betung (Banyuasin), keduanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pembangunan akan terdiri dari 3 seksi dengan total biaya konstruksi Rp9,843 triliun. Adapun rincian jalan tol Kapal Betung itu meliputi, Kayu Agung-Jakabaring sekitar 33,50 km (seksi I), Jakabaring-Musilandas sekitar 33,90 km (seksi II) dan Musilandas-Betung sekitar 44,29 km (seksi III). Sejak pencaanangan pembangunan dilakukan pada 23 November 2015 silam, progress pembebasan lahan tahap 1 mencapai 78%, dengan pekerjaan konstruksi baru mencapai 6 persen. Pengoperasian ruas tol ini secara keseluruhan ditargetkan pada tahun 2018.

Jalan tol tersebut akan dibangun oleh perusahaan swasta, yaitu PT Sriwijaya Markmore Persada. Perusahaan ini bertindak sebagai pihak unsolicited atau pemrakarsa proyek, pelaksana FS (feasibility study), basic design, AMDAL, hingga menyiapkan dana. Namun proyeknya tetap milik pemerintah pusat.

Pembangunan Tol Palembang-Indralaya

Tol Palembang-Indralaya atau disingkat tol Palindra terletak di Desa Ibul Besar III, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang seluas 22 km yang dibagi dalam 3 seksi: Seksi I, Palembang-Pemulutan sepanjang 7,10 km, Seksi II Pemulutan-KTM Rambutan sepanjang 5,70 km, serta Seksi III dari KTM Rambutan-Indralaya (9,3 km).

Proyek tol ini digarap oleh PT Hutama Karya (Persero), yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp3,4 triliun. Dana tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sejak dimulainya groundbreaking jalan Tol Palembang-Indralaya oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 April 2015, progres pengadaan lahan sudah mencapai 84%, dengan pekerjaan konstruksi per Semester I-2016 sebesar 34%. Khusus seksi I (ruas Palembang-Pemulutan) sudah dapat dioperasikan pada awal 2017.

Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo

Jalan tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 45 Km dibangun dengan biaya investasi sebesar Rp3,3 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun. Tarif ruas tol ini sebesar Rp525/Km untuk kendaraan golongan I, Rp788/Km untuk kendaraan golongan IIa dan Rp1.050/km untuk kendaraan golongan IIb. Diperkirakan ruas tol ini akan mulai dioperasikan pada tahun 2019.

Jalan Tol Ruas Pasuruan-Probolinggo akan melewati 3 Kota/Kabupaten, 7 kecamatan, serta 28 Desa/Kelurahan. Total panjang tol di 3 daerah itu mencapai 31,3 kilometer. Rinciannya, Kabupaten Pasuruan 8 km, Kabupaten Probolinggo 22,075 km dan Kota Probolinggo 1,225 km, dengan kebutuhan lahan mencapai 271,17 hektare.

PT Transjawa Paspro Jalan Tol adalah pihak swasta yang menggarap proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3,3 triliun tersebut. Saat ini, progres sampai tahap 1, pengadaan lahan baru mencapai 17%, dengan pekerjaan konstruksi sebanyak 2%.

Pembangunan ruas tol ini diharapkan bisa memudahkan akses lalu lintas bagi masyarakat, sebagai alat penunjang aktivitas masyarakat maupun industri baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Pembangunan Ruas Tol Becakayu

Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai Kalimalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Jalan tol ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 oleh PT Kresna



Kusuma Dyandra Marga, namun terhenti dua tahun kemudian akibat krisis moneter yang melanda.

Tol Becakayu memiliki total panjang 21,04 km terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi I (Kasablanka-Jaka Sampurna) dan Seksi II (Jaka Sampurna-Duren Jaya). Panjang Seksi I adalah 11 km, dan Seksi II 10,04 km.

Ruas tol Becakayu ini menelan biaya investasi Rp7,2 triliun, biaya konstruksi Rp4,785 triliun, biaya pembebasan tanah Rp449 miliar, dan masa konsesi 45 tahun (sejak SPMK). Investor dan pengelola Tol Becakayu adalah PT Waskita Toll Road, anak usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memegang 60 persen saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.

Sejak jalan tol ini dilanjutkan pembangunannya bulan Januari 2015, progres pengerjaan konstruksi sudah mencapai 73%. Jalan tol ini ditargetkan akan selesai akhir tahun 2017. Bahkan sebagian ruas tol Seksi I, yaitu ruas Jakasampurna-Universitas Borobudur sepanjang 8 km ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2017.

Pembangunan Ruas Tol Pejagan-Pemalang

Proyek pembangunan ruas Tol Pejagan-Pemalang yang merupakan bagian dari Trans Jawa, rencananya sepanjang 57,5 kilometer. Jalan tol tersebut, akan melewati 4 daerah di Jawa Tengah,

yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang.

Ruas Tol Pejagan-Pemalang terbagi dalam 4 seksi. Seksi I & II (Pejagan-Brebes Timur), seksi III (Brebes Timur-Tegal Timur) dan seksi IV (Tegal Timur-Pemalang). Jalan tol ini dibangun dan dikelola oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi PT Waskita Karya Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road.

Jumlah dana investasi untuk membangun jalan tol Pejagan-Pemalang ini adalah Rp5,52 triliun, dengan rincian biaya pembebasan tanah sebesar Rp1,026 triliun dan Rp3,21 triliun untuk keperluan konstruksi. Sampai tahap 1 bulan Agustus 2016, progres pengadaan lahan/tanah ruas Pejagan-Pemalang sudah mencapai 79%, dengan proses pengerjaan 36%. Khusus untuk ruas tol Seksi I & II Pejagan-Brebes Timur sepanjang 20 km, telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2016 yang lalu.

Pemerintah berharap ruas jalan tol ini bisa membuat pergerakan barang bisa lebih mudah dan lebih efisien. Serta bisa digunakan pada musim mudik Lebaran 2017 nanti, guna menghindari tragedi Tol Brexit (Pintu Tol Brebes Timur) pada musim mudik Lebaran tahun 2016 yang lalu.

Konektivitas Darat

Pembangunan Ruas Tol Semarang-Solo

Jalan Tol Semarang-Solo adalah jalan tol di Provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang, Salatiga dan Surakarta. Jalan tol ini melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo.

Tol ini mulai dibangun tahun 2009 oleh PT Jasa Marga dengan total lintasan sepanjang 72,64 km dan sampai saat ini pembangunannya masih berlangsung. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jalan Tol Semarang dengan Jalan Tol Solo-Ngawi yang juga telah mulai konstruksi.

Kegiatan konstruksi dan layanan jalan tol Semarang-Solo terdiri atas 5 seksi antara lain, Seksi I ruas Semarang-Ungaran sepanjang 10,8 km telah dioperasikan sejak 17 November 2011. Seksi II Ruas Ungaran-Bawen sepanjang 12 km telah dioperasikan sejak 11 April 2014. Seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,5 km saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan sebagian konstruksi. Seksi IV ruas Salatiga-Boyolali sepanjang 24,4 km saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan. Terakhir seksi V ruas Boyolali-Solo sepanjang 7,64 km saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan.

Jika dilihat secara keseluruhan, progress pengadaan lahan sudah mencapai 89% dan pengerjaan konstruksi mencapai 48%. Ruas tol Semarang-Solo diharapkan dapat mempermudah akses menuju Jawa Tengah dan sekitarnya.

Pembangunan Ruas Tol Pemalang-Batang-Semarang

Jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang merupakan bagian jaringan jalan tol Trans Jawa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Panjang ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang masing-masing adalah 39,2 kilometer dan 75 kilometer. Total investasi untuk kedua ruas tol tersebut mencapai Rp15,85 triliun.

Pengerjaan ruas Pemalang-Batang dilaksanakan oleh PT Pemalang-Batang Tol Road yang pemegang sahamnya terdiri dari PT Waskita Toll Road (60%) dan PT Sumber Mitra Jaya (40%) dengan keseluruhan biaya investasi sebesar Rp4,8 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK).

Sementara pengerjaan jalan tol Batang-Semarang dilakukan oleh PT Jasamarga Semarang-Batang dengan komposisi pemegang sahamnya adalah PT Jasa Marga (60%) dan PT Waskita Toll Road (40%) dengan keseluruhan biaya investasi sebesar Rp11,05 triliun serta masa konsesi selama 45 tahun sejak penerbitan SPMK.

Sejak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang dan Batang-Semarang pada tanggal 17 Juni 2016 yang lalu, progres pengadaan lahan/tanah ruas Pemalang-Batang sudah mencapai 16% dan ruas Batang-Semarang 28%, dengan proses pengerjaan masih belum terlaksana (0%). Agar keduanya dapat diselesaikan pada 2018, maka pelaksanaan konstruksinya dilakukan paralel dengan pengadaan tanah.

Jalan tol Batang-Semarang merupakan proyek jalan tol pertama yang menggunakan mekanisme penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII/IIGF) termasuk penjaminan untuk dana talangan dalam rangka pengadaan tanah jalan tol. Fasilitas tersebut diharapkan akan menurunkan risiko investasi, meningkatkan bankability proyek sehingga meningkatkan minat sektor swasta dan perbankan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Keberadaan 2 jalan tol tersebut diharapkan mampu memberikan andil yang cukup signifikan dalam melayani pergerakan manusia, barang dan jasa khususnya di jalur Pantai Utara Jawa Tengah.

Pembangunan Tol Ruas Solo-Ngawi

Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen (Provinsi Jawa Tengah) dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi memiliki total panjang 90,10 kilometer yang diusahakan oleh PT Solo Ngawi Jaya, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan masa pengembalian investasi selama 35 tahun sejak penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Agar layak secara finansial, sebagian ruas tol dibangun dengan biaya APBN. Ruas tersebut adalah Ruas Colomadu-Karanganyar 20,9 km.

Sejak pencahangan pembangunan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 April April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, progres pengadaan lahan sudah mencapai 97%, dengan pekerjaan konstruksi telah 30%. Ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2017. Total investasi pembangunan ruas tol ini sebesar Rp5,14 triliun.

Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Tol tersebut juga memiliki tingkat kelayakan marginal sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial.

Ke depan, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dan memberikan manfaat penyerapan tenaga kerja baik selama masa konstruksi maupun setelah beroperasi.

Pembangunan Tol Ruas Ngawi-Kertosono

Pembangunan Jalan Tol Ngawi-Kertosono merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang melewati Kabupaten Jombang, Madiun, Magetan, Nganjuk, dan Ngawi, yang keseluruhannya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Seperti Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono dengan total panjang 87,02 km juga dilaksanakan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya, anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dengan masa konsesi 35 tahun. Agar layak secara finansial, sebagian ruas tol dibangun dengan biaya APBN. Ruas tersebut adalah pada Ruas Ngawi-Kertosono (Seksi Saradan-Kertosono) sepanjang 37,5 km.

Sejak dilakukan pencahangan pembangunan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 30 April April 2015, di Ngawi, Jawa Timur, progress pengadaan lahan sudah mencapai 87%, dengan progress pekerjaan konstruksi mencapai 19%. Ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2017. Nilai investasinya sebesar Rp3,83 triliun.

Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto

Jalan Tol Surabaya Mojokerto (Sumo) merupakan bagian dari proyek Tol Trans Jawa sepanjang 36,27 kilometer. Jalan bebas hambatan ini akan mendukung target pemerintah untuk menyambung seluruh ruas Tol dari Merak sampai Surabaya pada 2018.

Tol tersebut dibangun dalam 5 seksi: Seksi IA Waru-Sepanjang, Seksi IB Sepanjang-Western Ring Road (WRR), Seksi II WRR-Driyorejo, Seksi III yaitu Driyorejo-Krian, dan Seksi IV Krian-Mojokerto. Adapun traffic Tol Sumo yang sudah beroperasi, per hari mencapai 2.000-3.000 kendaraan.

Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) seksi IV sepanjang 18,47 kilometer telah rampung pada 2016. Presiden Joko Widodo yang meresmikan pembukaan jalan tol yang lama terkendala pembebasan lahan tersebut.

Pemegang proyek jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp3,79 triliun ini adalah PT Marga Nujayasumo Agung dengan konsesi selama 42 tahun. Biaya pembebasan lahan dan konstruksinya berturut-turut adalah Rp557 miliar dan Rp1,83 triliun. Per Tahap 1, sekitar 92% lahan sudah dibebaskan untuk mendukung pembangunan ruas tol ini. Progres konstruksinya sudah mencapai 66% untuk operasi seksi IA dan seksi IV. Pembangunan Ruas Tol Mojokerto-Surabaya diperkirakan akan selesai tahun 2017. Pasalnya, seksi IA, IB, II, III, dan IV ruas tol ini dibangun serentak.

Konektivitas Udara

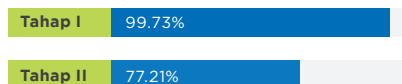
Modernisasi Bandara dan
Transportasi PendukungTerminal 3,
Bandara Soetta,
Tangerang

Penyelenggara:
PT Angkasas Pura II

Target Penyelesaian:
Maret 2017

Nilai proyek:
Rp4,7 triliun

Progress

Bandara Kulon Progo,
Yogyakarta

Progres Okt 16
Pembebasan lahan 50%

Nilai Proyek:
Rp9,3 triliun

Penyelenggara:
PT Angkasa Pura I

- 15 juta penumpang/tahun
- 300 ribu penerbangan/hari

Target Penyelesaian: Oktober 2019

Bandar udara adalah jendela dunia. Sebab bandara merupakan pintu gerbang Indonesia untuk dunia internasional.

Jaringan koneksi udara sangat penting keberadaannya, mengingat persinggungan fisik antara Indonesia dengan dunia internasional dilakukan melalui bandara. Untuk mendukungnya, kesiapan bandar udara dan transportasi pendukung yang menyokongnya sangat penting. Karena itulah, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) giat mengembangkan proyek infrastruktur transportasi tersebut.

Sejak tahun 2015, kegiatan pembangunan infrastruktur transportasi termasuk untuk mendukung konektivitas udara telah berjalan. Dari

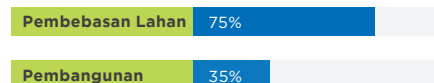
Kereta Penunjang Bandara:
Memastikan Waktu Tempuh ke Bandara

KA Basoetta

Penyelenggara:	Nilai Proyek:	Jumlah Stasiun:
PT KAI	Rp2,5 triliun	12 Stasiun

Target Penyelesaian: Juni 2017

Progres



KA Bandara Minangkabau

Penyelenggara:	Nilai Proyek:	Jumlah Stasiun:
PT KAI	Rp200 miliar	3 Stasiun

Target Penyelesaian: Juni 2017

pembangunan dan pengembangan bandara hingga jalur transportasi darat pendukungnya. Berikut ini adalah di antara proyek yang telah berjalan.

Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) diproyeksikan sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Operator 13 bandara di Indonesia Timur, PT Angkasa Pura I menargetkan pembangunan Bandara Kulon Progo Yogyakarta bakal dimulai pada Juli 2017 dengan nilai investasi sekitar Rp9,3 triliun. Progres pembangunan Kulon Progo per Oktober 2016 masih tahap pembebasan lahan sebesar 50%.



Bandara tersebut nantinya akan memiliki daya tampung sebanyak 15 juta penumpang/tahun dengan landas pacu sepanjang 3.600 meter. Angkasa Pura I memperkirakan pergerakan pesawat di Kulon Progo mencapai 300 penerbangan/hari. Selain itu, Kulon Progo juga bakal menampung sebanyak 28 pesawat berbadan lebar atau widebody jenis B777. Adapun, Kulon Progo bakal menjadi bagian dari rencana Angkasa Pura I dalam mengembangkan Airport City.

Peletakan batu pertama (*groundbreaking*) direncanakan akan dimulai pada Januari 2017. Proyek ini ditargetkan pembangunan bandara baru ini akan rampung pada Oktober 2019.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membidik 5 negara ASEAN untuk membuka pasar wisatawan baru lewat bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo yang mulai dibangun 2017 mendatang. Negara-negara yang jadi sasaran wisatawan baru itu adalah Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Laos.

Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta

Dalam rangka meningkatkan akses menuju bandara, saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) tengah mempercepat pembangunan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (KA Basoetta). Proyek ini dikerjakan oleh PT Railink yang merupakan perusahaan patungan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).

AP II sendiri untuk proyek Kereta Bandara bertanggung jawab membangun fasilitas Stasiun Bandara. Sedangkan PT KAI bertanggung jawab membangun prasarana kereta seperti rel dan stasiun di pusat kota Jakarta seperti Stasiun Sudirman Baru dan renovasi Stasiun Manggarai.

Proyek senilai Rp2,5 triliun ini tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditargetkan, KA Basoetta akan mulai beroperasi pada Juni 2017.

Progres pembebasan lahan sampai saat ini telah mencapai 75% dari 36,3 kilometer jalur sepanjang Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta. Sebagian besar jalur Kereta Bandara Soekarno-Hatta menggunakan rel kereta yang telah ada, yakni dari Stasiun Manggarai hingga Batuceper. Sisanya sepanjang 12,1 kilometer akan dibangun jalur baru mulai dari Stasiun Batuceper hingga Stasiun Terintegrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan pekerjaan konstruksinya telah mencapai 35%.

PT Railink memprediksi setiap rangkaian kereta bisa mengangkut 272 penumpang. Dalam sehari ada sekitar 124 kereta yang dioperasikan mulai pukul 04.00 WIB -24.00 WIB. Perjalanan menuju bandara dari stasiun Manggarai diprediksi memakan waktu sekitar 50 menit. Adapun rencana tarif kereta bandara Soekarno Hatta ini sekitar Rp150.000. Lebih mahal 50% dari tarif kereta bandara Kualanamu yakni Rp100.000 dikarenakan menilik nilai investasinya yang besar dan juga lintasannya yang lebih panjang.

Konektivitas Udara

Menurut rencana, KA bandara akan beroperasi setiap 15 menit dengan frekuensi 124 *trainset* (rangkaian kereta) per hari. Setiap *trainset* memiliki kapasitas 274 tempat duduk. Dengan begitu, kapasitas KA bandara yang tersedia kelak mencapai 33.976 tempat duduk setiap harinya. Stasiun-stasiun tersebut juga akan dilengkapi dengan *automatic movement system* untuk mengangkut penumpang dari stasiun bandara ke terminal-terminal di Soekarno-Hatta.

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta merupakan terminal bandara yang besar dan canggih untuk melayani rute internasional. Pembangunan Terminal 3 ini sejalan dengan rencana mengubah citra Soekarno Hatta Airport dari bandara destinasi akan diubah menjadi bandara transit internasional.

Proyek perluasan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sedang berjalan. Kepastian pengerjaan ini setelah ditetapkannya konsorsium pemenang proyek senilai Rp4,7 triliun tersebut. Ditargetkan bisa rampung keseluruhannya pada bulan Maret 2017.

Sejak 20 Februari 2013, Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II (Persero) telah menetapkan Konsorsium Kawahapejaya Indonesia sebagai pemenang pekerjaan Perluasan Gedung Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Konsorsium ini terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Hyundai Engineering Co. LTD., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Jaya Teknik Indonesia, dan PT Indulexco.

Saat ini progres pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tahap I sudah mencapai sekitar 99,73% dengan pekerjaan yang tersisa hanya menyelesaikan interior dan *commisioning* atau ujicoba. Sedangkan, progress Tahap telah mencapai 77,21%.

Menurut pihak PT Angkasa Pura II (Persero), terminal baru ini dibangun dengan konsep kearifan lokal yang terdiri dari *art*, *culture*, dan *culinary*, di mana ini akan menjadi *competitive advantage* dari Bandara Soekarno-Hatta.

Terminal seluas 422.804 meter persegi ini juga dilengkapi fasilitas terkini demi peningkatan pelayanan kepada penumpang pesawat, seperti penanganan bagasi secara otomatis (*baggage handling system*), *check in area* berbentuk delapan pulau, area parkir dengan kapasitas 2.600 kendaraan, 2.600 sepeda motor, serta jembatan layang yang terhubung dengan kereta bandara.

Terminal 3 Ultimate tahap I dirancang memiliki kapasitas daya tampung sekitar 15 juta penumpang per tahun. Kapasitas tersebut akan bertambah menjadi 25 juta penumpang per tahun bila pembangunan Terminal 3 tahap II selesai. Dengan kapasitas di waktu sibuk mencapai 5.000 penumpang.

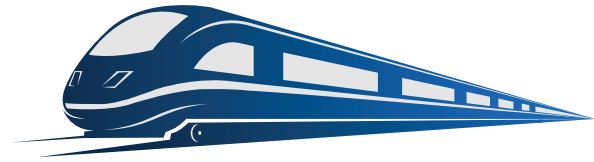
KA Bandara Internasional Minangkabau

Untuk mendukung Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan revitalisasi jalur kereta api ke bandara tersebut. Proyek yang digarap oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini akan menelan biaya sekitar Rp200 miliar dan ditargetkan selesai pada tahun 2017.

Saat berkunjung ke Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk menyambung area Stasiun dengan Bandara akan menggunakan *sky bridge* atau jembatan. Presiden pun meminta, jika semua bandara di Indonesia harus memiliki transportasi penghubung dengan kota.

Saat ini, bandara yang sudah memiliki transportasi penghubung berbasis kereta api hanya Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara. Sedangkan untuk Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang masih dalam pengerjaan. Pembangunan jalur kereta api menuju bandara ini memanfaatkan jalur yang sudah ada, yaitu dari Stasiun Padang menuju Stasiun Duku.

Transportasi Publik



Menghadirkan Transportasi Publik yang Modern dan Andal

Light Rail Transit & High Speed Train Digulirkan.

Jakarta

Realisasi 6.5%

Target 5.8%



Lintas Pelayanan

6x

Palembang

Realisasi 12.6%

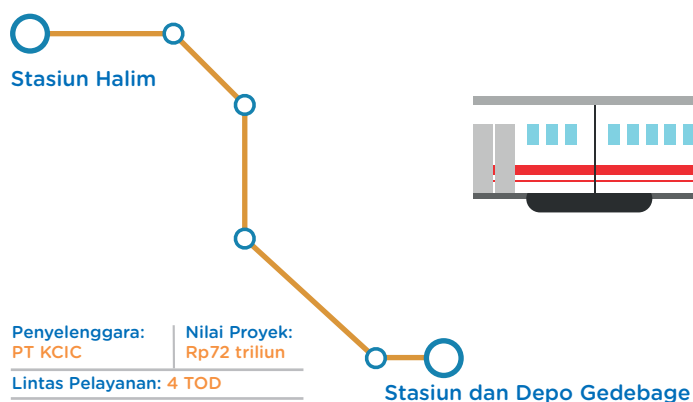
Target 12.3%



Lintas Pelayanan

5x

Koridor Ekonomi Jakarta-Bandung



Memperoleh izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan

60% lahan telah siap pelaksanaan konstruksi dari total trase 142,3 km

Transportasi Publik

Pada kesempatan penyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha, yaitu penghargaan di bidang perhubungan darat, di Istana Negara, Desember 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di sektor perhubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, aktivitas sosial, dan demokrasi. Oleh karena itu, Presiden menyatakan Pemerintah harus menyediakan sistem transportasi publik yang diinginkan masyarakat.

Presiden mengingatkan pentingnya langkah perbaikan dalam pelayanan transportasi publik, khususnya transportasi darat. Hal itu penting mengingat rakyat membutuhkan sarana transportasi dalam berbagai kegiatan seperti ke sekolah, ke tempat bekerja dan untuk distribusi barang.

Selain itu, masyarakat membutuhkan moda transportasi massal yang terjangkau. Kota-kota di Pulau Jawa sudah terhubung dengan moda transportasi kereta api, yang merupakan moda transportasi massal dan terjangkau. Selanjutnya adalah kota-kota di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Presiden telah mengingatkan bahwa memberikan pelayanan transportasi publik yang terbaik adalah kewajiban pemerintah. Untuk itulah, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dan rel kereta api di berbagai daerah, agar hubungan antar daerah lebih cepat dan efisien.

Menindaklanjuti amanat Presiden tersebut, Kementerian BUMN melalui Badan Usaha Milik Negara sedang merealisasikan sejumlah proyek transportasi publik. Di antaranya adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta Light Rail Transit (LRT) di Jakarta dan Sumatera Selatan.

Koridor Ekonomi Jakarta-Bandung

Dalam upaya meningkatkan konektivitas Jakarta dan Bandung, BUMN membangun kereta cepat dari Halim, Cikarang, Karawang, Walini, Kopo dan penghentian akhir di Gedebage. Kota-kota tersebut merupakan bagian dari Transit Oriented Development (TOD) proyek kereta cepat dengan

panjang rel sekitar 142,3 kilometer. Hingga Agustus 2016, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengantungi izin dari Kementerian Perhubungan dan 60% lahan telah dibebaskan untuk pelaksanaan konstruksi. Proyek yang akan menelan biaya sekitar Rp72 triliun ini, ditargetkan bisa selesai triwulan I-2019.

Pelaksana proyek ini adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), yang merupakan anak usaha patungan antara BUMN Indonesia dan BUMN China. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sendiri adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Pekerjaan konstruksi, rel hingga persinyalan akan dilakukan oleh Indonesia, sedangkan pengadaan *rolling stock* atau kereta dipasok dari China. Untuk pembiayaan proyek, 75% dari total investasi US\$ 5,5 miliar dibiayai oleh China Development Bank (CDB) sisanya disokong modal sendiri dari konsorsium BUMN China-Indonesia yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pembangunan proyek transportasi massal kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja baru di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya.

Jakarta Light Rail Transit

Jakarta Light Rail Transit atau disingkat Jakarta LRT adalah sebuah sistem Mass Transit dengan kereta api ringan (LRT) yang dibangun untuk menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan LRT Jakarta didasarkan pada Peraturan Presiden No. 98/2015 yang direvisi dalam Perpres No. 65/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yang diundangkan pada 3 Agustus 2016.

Sejak mulai peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 9 September 2015, progres pengerjaan proyek LRT Jakarta telah mencapai 6,5%, yang melampaui target semula sebesar 5,80% per Oktober 2016. Dibangun oleh PT Adhi Karya (persero), BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, dengan nilai proyek Rp34,29 triliun. Proyek LRT Jakarta ini ditargetkan selesai menjelang Asian Games 2018.

Rencananya, lintasan LRT Jakarta terdiri dari lintasan Cawang-Bekasi Timur, Cawang-Cibubur dan Cawang-Dukuh Atas. Akan memiliki 7 koridor, antara lain: Koridor 1 Kebayoran-Kelapa Gading, Koridor 2 Pulomas-Tanah Abang, Koridor 3 Joglo-Tanah Abang, Koridor 4 Puri Indah-Tanah Abang, Koridor 5 Pesing-Kelapagading, Koridor 6 Ancol-Kemayoran, Koridor 7 Bandara Soetta-Kemayoran.

Pembangunan proyek kereta ringan alias Light Rail Transit (LRT) merupakan salah satu bagian dari grand design sistem transportasi massal Jabodetabek. LRT nantinya akan terintegrasi dengan MRT, KRL, TransJakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) hingga Kereta Bandara. Dengan interkoneksi LRT dan Kereta Bandara, waktu tempuh Bogor-Bandara Soekarno Hatta yang tadinya bisa 3 jam, dapat dipangkas menjadi hanya 1 jam.

Selain manfaat transportasi, LRT rupanya juga memiliki sejumlah manfaat untuk pembangunan The Greater Jakarta atau popularitasnya disebut Jabodetabek. Di bidang pemukiman, LRT menstimulus munculnya kawasan hunian yang mengusung konsep transit oriented development (TOD). Yaitu pemukiman yang dikembangkan dengan mengacu pada jejaring atau sistem transportasi sebagai solusi.

Dengan berkembangnya pemukiman di sepanjang jalur LRT, maka kepadatan di Jakarta dapat diurai. Kota-kota satelit yang dilintasi LRT pun, mampu mengimbangi kebutuhan pertumbuhan Jakarta. Termasuk menjadi solusi pada masalah-masalah kota seperti mengurai kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi.

Di bidang lingkungan, berkembangnya kota-kota mandiri di sepanjang jalur LRT juga bermanfaat dalam peremajaan kota sehingga mereduksi polusi serta memberikan kualitas hidup yang lebih baik.

Light Rail Transit (LRT) Sumsel

Light Rail Transit atau LRT Sumsel adalah sebuah sistem MassTransit dengan kereta api ringan yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring di Sumatera Selatan. Pembangunan alat transportasi tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Pembangunan LRT ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelahnya, diharapkan keberadaan jalur transportasi ini dapat mengurangi kemacetan di kota Palembang. Pembangunan LRT di Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

LRT di Sumatera Selatan memiliki trase sepanjang 23,5 km yang membelah Kota Palembang dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang sampai dengan Kabupaten Banyuasin.

Pembangunan LRT di Sumatera Selatan menggunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan PT Waskita Karya sebagai pelaksana pembangunannya. Total investasi sekitar Rp12,6 triliun. Sejak dibangun bulan November 2015, progres pembangunan mencapai 12,6% (per Oktober 2016). LRT ini ditargetkan beroperasi pada bulan Juni 2018. Untuk tenaga kerja, diperkirakan sebanyak 1.657 orang terserap untuk proyek ini.

Selain membangun LRT, Sumsel juga tengah membangun jalan layang Simpang Keramasan dan jalan layang Simpang Bandara-Tanjung Api Api yang ditargetkan selesai pada akhir 2017 mendatang. Dua jalan layang itu dibangun guna mendukung Asian Games 2018 dan sebagai upaya memecah kepadatan jalan serta mengurangi kemacetan Kota Palembang.

Komunikasi Indonesia

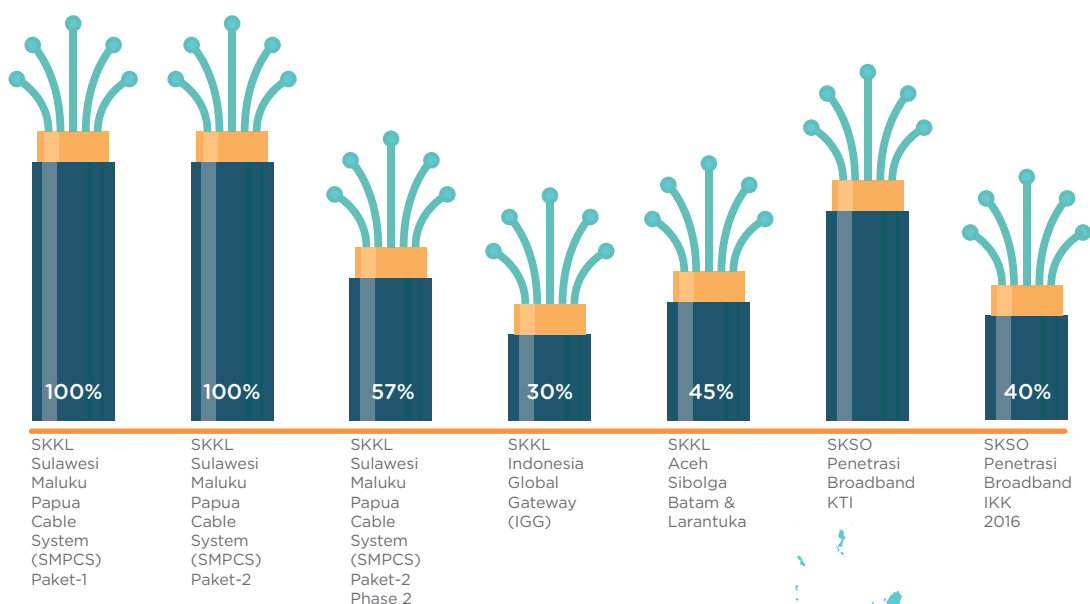
Mewujudkan Satu Indonesia melalui Jaringan Serat Optik

Merajut serat optik
untuk Indonesia Timur

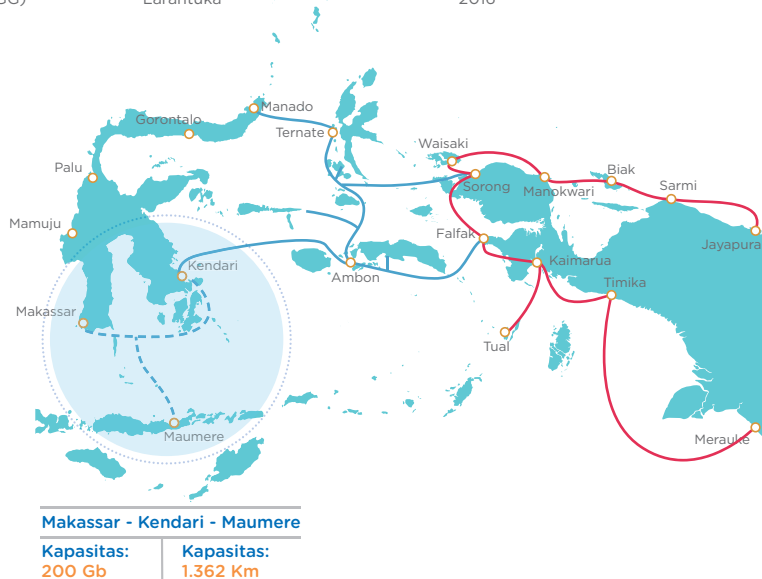
7 Proyek
Strategis

16.561 km
Panjang Kabel Serat Optik

Rp6,48 triliun
Nilai Investasi



Proyek Sulawesi-Maluku-Papua
Pembangunan serat optik Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) yang dikerjakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menghubungkan Kawasan Timur Indonesia yang menjangkau 8 provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, NTT, Papua Barat dan Papua) dan 34 Ibu Kota kabupaten (IKK).



Masyarakat Indonesia yang tersebar di negara dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi akan semakin mudah terhubung melalui jaringan telekomunikasi. Saat ini pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengembangkan proyek pembangunan infrastruktur, yang antara lain terkait dengan jaringan telekomunikasi melalui serat optik.

Proyek ini merupakan wujud dari komitmen “BUMN Hadir untuk Negeri”. Pemerintah, diwakili oleh BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat untuk

memenuhi segala kebutuhannya, melalui fasilitas komunikasi.

Dengan jaringan komunikasi yang tersebar dari Barat hingga Timur, membuat masyarakat Indonesia semakin terhubung. Pemanfaatan waktu, baik untuk kegiatan sosial maupun bisnis, akan makin efisien. Dengan demikian, pemanfaatan biaya juga menjadi lebih rendah yang pada akhirnya diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SKKL Indonesia Global Gateway (IGG)

Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Indonesia Global Gateway atau IGG adalah sebuah sistem kabel optik bawah laut yang akan menghubungkan pulau Sumatera, Batam, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi dengan Singapura. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) menunjuk NEC Corporation (NEC) dalam proyek pengembangan Sistem Kabel Gateway Global Indonesia ini. Nilai kontrak dari kerja sama itu diperkirakan sekitar 20 miliar yen atau setara US\$ 196 juta.

Proyek sistem kabel optik bawah laut ini sudah mencapai progres 30%. Proyek diperkirakan bakal rampung pada awal tahun 2018.

Infrastruktur IGG terdiri dari kabel berkecepatan 100 Gigabit per detik (Gbps) x 80 panjang gelombang atau *wavelength* (wl) x 4 pasang serat atau fiber

pair (fp) optik, sepanjang lebih kurang 5.300 kilometer, yang menghubungkan kota-kota di Indonesia, seperti Dumai, Batam, Jakarta, Madura, Bali, Makassar, Balikpapan, Tarakan, dan Manado dengan Singapura.

Apabila proyek IGG selesai, sistem kabel ini bukan hanya meningkatkan kecepatan koneksi di antara kota-kota tersebut tapi juga menyediakan koneksi kabel bawah laut internasional langsung dari Eropa ke Dumai dan dari pantai Barat Amerika Serikat ke Manado.

Sejak membangun kabel bawah laut Telkom Telkom pada 1991, NEC terus mendukung perluasan jalur koneksi domestik di Indonesia. Kontribusi terakhir NEC di Indonesia adalah saat mereka membangun sistem kabel optik bawah laut Papua Cable System (SMPCS).

SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System

Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) adalah Sistem Komunikasi Kabel Laut yang terbentang di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, menjangkau 8 provinsi dan 34 ibukota kabupaten di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi yang dijangkau meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

Dalam pembangunannya, kabel ini terdiri dari 2 paket yakni Paket 1 sepanjang 5.617 km dan Paket 2 sepanjang 3.155 km. SMPCS merupakan program lanjutan dari pembangunan Mega Proyek

Palapa Ring dan salah satu proyek jangka panjang PT Telkom mewujudkan Indonesia Digital Network (IDN).

Dalam pembangunan SMPCS, Telkom menggandeng dua perusahaan asing yakni Alcatel Submarine Network (ASN) dari Perancis dan NEC Corporation dari Jepang. Pembangunan SKKL SMPCS ini telah diresmikan pada tanggal 10 Mei 2015 oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Nilai investasi yang dikucurkan pada proyek ini sebesar Rp3,6 triliun.

Komunikasi Indonesia



Berdasarkan arah aliran jaringannya, SKKL SMPCS memiliki 3 jalur utama yaitu Manado-Ambon-Fakfak-Timika, Manado-Sorong-Biak-Jayapura, dan Ambon-Kendari, serta 13 cabang meliputi: Jailolo, Ternate, Labuha, Sorong, Mangole, Sanana, Namlea, Masohi, Banda Neira, Bula, Manokwari, Sarmi dan Kaimana.

SMPCS akan memperluas konektivitas dan meningkatkan kapasitas layanan data di daerah-daerah yang selama ini belum dilayani secara memadai. Keberadaan *SMPCS penting untuk meningkatkan akses broadband* untuk semua.

Dengan beroperasinya SMPCS ini, pemerataan akses komunikasi dan informasi dapat segera terwujud. Sekitar 4,3 juta pelanggan layanan telekomunikasi suara dan data di Maluku dan Papua yang sebelumnya dilayani dengan satelit dengan lebar pita yang masih terbatas, akan dilayani oleh sistem jaringan tulang punggung pita lebar serat optik dengan kualitas layanan yang tidak berbeda dengan di Pulau Jawa.

SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System Paket 1 Phase 2

Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) Paket 1 Phase 2 merupakan proyek ekstensi dari rute SMPCS tahap pertama yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pembangunan serat optik lanjutan ini ada di 3 wilayah: Kendari, Makassar, dan Maumere. Dikerjakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) telah mencapai 57% per September 2016. Berdasarkan data Kementerian BUMN, panjang

jaringan komunikasi berbasis kabel serat optik ini sekitar 1.362 kilometer, dengan kapasitas 200 gigabyte.

Infrastruktur sistem jaringan serat optik ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan perekonomian Indonesia Timur. Dengan hadirnya kehadiran infrastruktur ini bisa membuat seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati layanan internet berkualitas di mana pun.

Ketahanan Energi

Kebijakan Satu Harga BBM dan Memperkuat Ketahanan Energi

Contoh Investasi Strategis

Status: **Baru Dimulai**  **PERTAMINA** Total Panjang Pipa Gas

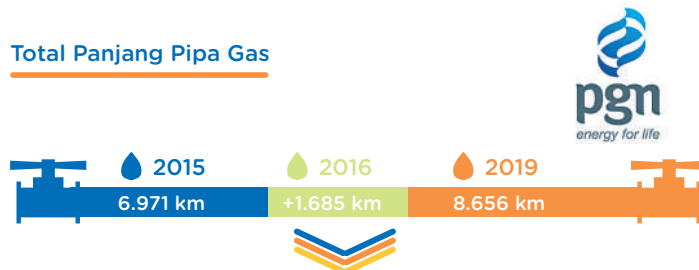
Nama proyek	Kapasitas (ribu bph)	Target Selesai
GRR Tuban	300	2021
RDMP Balikpapan	100	2019
RDMP Cilacap	370	2022
PLBC Cilacap	91	Juni 2018

Status: **Selesai**

Nama proyek	Kapasitas	Peresmian
PLTP Ulubelu Unit 3	55MW	15 Juli 2016

Status: **On Going**

Nama proyek	Kapasitas	Progress (Jun 16)
PLTP Ulubelu Unit 4	220 MW	84,38%
PLTP Lahendong Unit 5	20 MW	85,05%



Distribusi Duri-Dumai Realisasi Juni 2016 100% | Muara Bekasi-Muara Karang Realisasi Juni 2016 84%

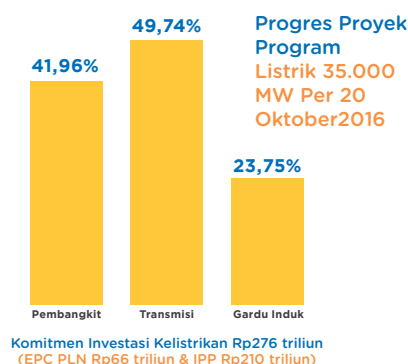
BBM Satu Harga

Pelaksanaan: 18 Oktober 2016
Penggunaan Pesawat Air
Tractor pengangkut BBM
dimulai dari wilayah Papua



Rasio Elektrifikasi

Des 2015	86,2%
Des 2016	88,1%



Ketahanan energi merupakan ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga terjangkau. Mengingat pentingnya kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo memandang perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk mengatasi ketergantungan impor bahan bakar dan juga dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan.

Untuk mewujudkan ketahanan energi sebagai upaya menjadi mandiri, pemerintah melalui BUMN di bidang energi telah dan sedang mengembangkan

proyek ketersediaan energi. Baik di sektor ketenagalistrikan, bahan bakar minyak dan gas, maupun energi terbarukan.

Proyek-proyek tersebut telah masuk dalam skenario jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah. Keterlibatan aktif perusahaan negara dalam pelaksanaan proyek tersebut merupakan wujud dari komitmen "BUMN Hadir untuk Negeri".

Ketahanan Energi



Satu Harga untuk Semua

Presiden Joko Widodo mewujudkan kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga di Papua yang diharapkan dapat mempercepat gerak perekonomian di wilayah provinsi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya Penggunaan Pesawat Air Tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua, pada tanggal 18 Oktober 2016 yang lalu.

Kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antardaerah belum sepenuhnya terhubung akibat keterbatasan infrastruktur transportasi darat. Hal ini mengakibatkan biaya logistik untuk mengangkut BBM menjadi sangat tinggi karena sebagian besar diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara.

Harga BBM Premium berkisar antara Rp25-55 ribu per liter, bahkan pernah mencapai Rp150-200 ribu. Hal tersebut akibat belum adanya moda transportasi dengan peruntukan khusus (*dedicated*). Melihat kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan kebijakan “BBM Satu Harga” sehingga masyarakat Papua dapat menikmati BBM dengan harga sama dengan wilayah lainnya.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara merespons cepat instruksi tersebut dengan beberapa langkah. Pertama, mendatangkan pesawat khusus, Air Tractor, difasilitasi Pelita Air Service anak usaha dari Pertamina, yang merupakan best practise dalam pengiriman BBM via udara sebagai moda khusus yang *dedicated* menjaga ketahanan suplai agar harga terjangkau. Kedua,

melalui pendirian lembaga penyalur Pertamina di 8 Kabupaten Pegunungan dan Pedalaman (Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak).

BBM Satu Harga ini merupakan bagian dari kontribusi Pertamina yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Kini, harga BBM 8 Kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No: 7174 Tahun 2016, berlaku mulai 1 Oktober, untuk setiap liter: Minyak Tanah Rp2.500, Minyak Solar Rp5.150 dan Premium Rp6.450.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pertamina berupaya menggunakan berbagai moda transportasi, baik darat, laut maupun udara guna mendukung kebijakan pemerintah agar masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal bisa mendapatkan BBM dengan harga sama dengan daerah lainnya. Pertamina telah memperlihatkan komitmennya untuk mewujudkan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Pertamina akan menanggung biayanya.

Pemerintah meyakini, jika harga BBM bisa sama di seluruh Indonesia, maka harga kebutuhan hidup lainnya juga bisa menyesuaikan sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat. Selain itu, turunnya harga BBM diharapkan bisa menyokong pembangunan listrik, khususnya di Papua dan Papua Barat, sehingga masyarakat bisa mengejar ketertinggalannya. Pasokan listrik berlebih, harga BBM sama, maka akan terjadi pergerakan ekonomi.

Kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan sebagai perwujudan Sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi untuk Menerangi Seluruh Indonesia

Sejak dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 Mei 2015 di Samas Yogyakarta, PT PLN mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan program 35.000 MW yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi listrik untuk memenuhi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 8,7% per tahun dan peningkatan rasio elektrifikasi dari sebesar 87,40% pada tahun 2015 menjadi sebesar 97,40% pada tahun 2019.

Komitmen untuk mendukung PT PLN menyelesaikan program 35.000 MW telah ditunjukkan oleh Kementerian BUMN sejak tahun 2015, diawali dari kesepakatan "Sinergi Energi untuk Elektrifikasi" yang ditandatangani bersama Direksi PT PLN (Persero) dengan Direksi PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT EMI (Persero) pada tanggal 17 November 2015, yang antara lain berisikan point-point kesepakatan Joint planning PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam rangka penyelesaian program 35.000 MW terkait planning infrastruktur dan sumber energi yang digunakan dan speed up pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Dukungan dari Pemerintah kepada PT PLN semakin meningkat sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang didalamnya mengatur tentang dukungan Pemerintah kepada PT PLN tidak terbatas pada dukungan kemampuan pendanaan, jaminan Pemerintah Pusat, penyediaan energi primer, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penggunaan barang/jasa dalam negeri, serta perizinan dan non perizinan.

Dalam merealisasikan program 35.000 MW, diestimasikan membutuhkan dana investasi yang cukup besar senilai USD 72.942 Juta dengan peruntukan untuk :

1. 291 Pembangkit sebesar 43.157 MW (incl sisa FTP 1 dan FTP 2) senilai USD 53.663 Juta.
2. 732 Transmisi dengan total panjang kabel 46.597 kms senilai USD 10.893 Juta.
3. 1.375 Gardu Induk dengan 108.789 MVA senilai USD 8.386 Juta.

Dukungan Kementerian BUMN atas upaya PLN merealisasikan program kerja tersebut diatas adalah dengan mendukung dan memberikan persetujuan kepada PLN untuk memperbaiki struktur permodalan PLN dengan melakukan revaluasi aset. Hasil dari revaluasi aset membuat nilai aset PLN mengalami peningkatan dari realisasi 2014 sebesar Rp539,521 triliun menjadi Rp1.227,36 triliun pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan rasio keuangan PLN khususnya Debt to Equity Rasio menjadi sangat baik dari sebesar 124,7% pada tahun 2014 menjadi 29,7% pada tahun 2015.

Selain upaya diatas, Kementerian BUMN bekerjasama dengan Kementerian terkait lainnya memberikan dukungan dan persetujuan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2015 senilai Rp5 Triliun yang diperuntukan untuk Pembangunan :
 - a. PLTA Jatigede
 - b. PLTGU Grati
 - c. PLTU Lontar Ekstension
 - d. PLTA Upper Cisokan
 - e. PLTG Gorontalo Peaker
 - f. PLTD Wilayah Perbatasan & Pulau Terluar
 - g. Trafo & Transmisi
2. Tahun 2016 senilai Rp23,5 Triliun yang diperuntukan untuk Pembangunan :
 - a. PLTGU Jawa-2 800 MW / Tanjung Priok
 - b. PLTGU Muara Karang 400-500 MW
 - c. PLTGU Lombok Peaker 150 MW
 - d. Pembangkit Tersebar PLTG/MG dan PLTD Pulau Terdepan
 - e. Pembangkit Tersebar PLTD
 - f. Distribusi Tersebar
 - g. Transmisi & Gardu Induk Termasuk Trafo Tenaga 500 kV, 275 kV, dan 150 kV

Kementerian BUMN, sesuai tugas dan fungsinya secara berkala dan berkelanjutan melakukan monitoring terhadap realisasi pelaksanaan program kerja 35.000 MW yang dijalankan oleh PT PLN. Sampai dengan bulan Desember 2016, progress program 35.000 MW sudah mencapai :

Ketahanan Energi

A. Pembangkit

1. Completion atau beroperasi: 706.5 MW + 5.520 MW
2. Konstruksi: 10.091 MW + 1.942 MW
3. Sudah Kontrak namun belum konstruksi: 8.663 MW
4. Proses pengadaan: 10.410 MW
5. Perencanaan: 5.824 MW

B. Transmisi

1. Completion atau beroperasi: 4.990 kms
2. Konstruksi: 17.169 kms
3. Pra-konstruksi: 24.107 kms

C. Gardu Induk

1. Completion atau beroperasi: 19.978 MVA
2. Konstruksi: 22.991 MVA
3. Pra-konstruksi: 65.510 MVA

Pencapaian Pembangunan Pembangkit Selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016

Rincian capaian keberhasilan yang diraih oleh PT PLN selama kurun waktu tahun 2015 s.d. 2016 dalam rangka mendukung penyelesaian program 35.000 MW adalah sebagai berikut :

PLTG Gorontalo

Sejak digroundbreaking tanggal 19 September 2015, PT PLN berhasil menyelesaikan pembangkit pertama program 35.000 MW yaitu PLTG Gorontalo 100 MW masuk ke dalam sistem interkoneksi 150 kV

Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pembangkit PLTG Gorontalo diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 3 Juni 2016.

GI Lhokseumawe

PT PLN berhasil mengoperasikan Gardu Induk Trafo Mobile 30 MVA untuk menambah daya pasokan listrik sebesar 24 MW yang masuk ke jaringan tegangan menengah 20 kV di Lhokseumawe. GI Trafo Mobile yang juga disebut dengan Town Feeder Transformator (TFT) ini akan digunakan untuk menambah keandalan listrik masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta menambah kualitas layanan dari sisi tegangan. Beroperasinya GI Trafo mobile 30 MVA juga dapat mendukung keperluan regasifikasi PT Pertamina Gas dan melayani PT Perta Arun Gas dalam rangka efisiensi regasifikasi, baik untuk kebutuhan energi listrik maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Tak hanya melayani masyarakat, GI ini juga ditujukan untuk peningkatan dan pengembangan industri yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Industri yang bisa dipasok antara lain coldstorage, tambak udang, dan perhotelan. Hingga saat ini, kapasitas terpasang sementara sebesar 30 MVA, dimana 16 MVA untuk Arun Pertagas dan 14 MVA untuk menambah pasokan pada industri dan masyarakat umum. Terpasangnya GI Trafo Mobile





ini menyusul keberhasilan PLN menyelesaikan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) Arun 184 MW dan Gardu Induk Arun 4 x 60 MVA. Pembangkit yang beroperasi secara komersial pada 21 Desember 2015 ini telah masuk ke jaringan SUTET 150 kV Sistem Kelistrikan Interkoneksi Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). PLTMG yang dimotori 19 mesin ini merupakan PLTMG terbesar di Indonesia, proses konstruksinya tepat waktu, dan zero accident. Dalam pengoperasiannya, PLTMG Arun mendapat pasokan gas dari Papua dalam bentuk cair yang akan diolah lagi menjadi gas oleh PT Perta Arun Gas. Beroperasinya kedua Gardu Induk dan PLTMG Arun ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk memajukan Aceh di bidang ketenagalistrikan, sehingga “Aceh Gemilang di 2020” bisa terwujud.

Marine Vessel Power Plant

MVPP (Marine Vessel Power Plant) Zeynep Sultan mencapai Commercial Operation Date dengan kapasitas maksimal sebesar 120 MW dan terkoneksi dengan sistem interkoneksi 150 kV Sulawesi Utara-Gorontalo untuk menyelesaikan persoalan defisit listrik di sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saat ini Kapal pembangkit listrik (marine vessel power plant/MVPP) dari Turki berdaya 60 Mega Watt (MW) telah tiba di Kupang,

Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (16/12) malam untuk membantu sistem kelistrikan di Pulau Timor. MVPP tersebut akan ditempatkan di kawasan perairan Bolok, Kupang Barat, dan kemudian terkoneksi dengan infrastruktur jaringan yang sudah disiapkan di darat. Pemerintah, dalam hal ini PLN, akan mengontrak kapal pembangkit listrik tersebut selama lima tahun untuk menambah kapasitas pembangkit pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) IPP Bolok yang akan beroperasi sekira Maret 2017 dengan kapasitas 16,5 x 2 MW. Daya tersebut, dikemukakannya, akan diinterkoneksi dengan sistem di Kupang dengan tiga pembangkit utama, yakni PLTU Bolok (13 MW), PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Tenau (47 MW) dan Kuanino (10 MW). Setelah semuanya terinterkoneksi, maka PLN akan masuk ke sistem transmisi di Pulau Timor yang sekarang pasokan listriknya sudah sampai di Soe, Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan akhir Desember ini diupayakan sampai di Kefamenanu, Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat daya listrik yang ada sehingga ke masa depan tidak mengalami kendala pasokan listrik, paling tidak hingga tahun 2019.

Ketahanan Energi

PLTMG Bangkanai

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai berhasil masuk sistem kelistrikan Muereh Teweh (Isolated Area) sebesar 7,7 MW, sejalan dengan program Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun dari daerah pinggiran dan juga melistriki daerah yang selama ini belum menikmati aliran listrik. PT PLN mengoperasikan GI Sei Mangke 60 MVA dan SUTT 150 kV sepanjang 30 kms dan terdiri dari 57 tower yang dilakukan groundbreaking-nya mulai 27 Januari 2015 untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang merupakan salah satu program strategis dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi.

PT PLN juga telah menyalurkan listrik sebesar 20 MW dari PLTMG Bangkanai ke dua ibukota Kabupaten di Provinsi Kalteng, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dan Buntok di Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dapat terwujud setelah selesainya pembangunan transmisi 150 kv sepanjang 43 kms dari GI Bangkanai ke GI Muara Teweh dan selanjutnya ke GI Buntok sepanjang 109 kms.

PLTD Legon Bajak, Karimun Jawa

PT PLN bersama anak perusahaan Indonesia Power berhasil meningkatkan operasi kelistrikan di Karimunjawa. Hal ini dilakukan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Legon Bajak berkapasitas 2 x 2,2 Mega Watt (MW). Mesin

diesel yang terletak di Desa Kemujan Kecamatan Karimun Jawa ini akan menggantikan PLTD 700 kV yang dikelola Pemerintah Daerah.

PLTD Ende

Warga Pulau Ende yang masuk wilayah Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya bisa menikmati layanan listrik sehari penuh atau 24 jam. Setelah 32 tahun, PT PLN berhasil mengoperasikan pembangkit dengan daya mampu 420 kW untuk mengalirkan listrik ke Pulau Ende selama 24 jam. Tercatat pelanggan listrik di Ende saat ini terbanyak adalah segmen Rumah Tangga (RT), yakni sebesar 1.591 pelanggan, Sosial 29 pelanggan, Publik 10 pelanggan dan Bisnis sebanyak empat pelanggan. Menurut daya pelanggan, sebanyak 1.409 pelanggan memakai daya 450 VA, 189 pelanggan 900 VA, 29 pelanggan 1.300 VA, lima pelanggan 2.200 VA dan masing-masing satu pelanggan memakai daya 3.500 VA dan 16.500 VA.

GI Muara Bungo

PLN kembali tambah pasokan daya sebesar 30 Mega Volt Ampere (MVA) untuk didistribusikan kepada pelanggan melalui Trafo Distribusi 60 MVA di Gardu Induk (GI) Muara Bungo, Provinsi Jambi untuk menuntaskan 1.627 daftar tunggu di Area Muara Bungo dan pemasangan baru bagi 12 ribu pelanggan di Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Muara Tebo Provinsi Jambi.



PLTU Cilacap

PT PLN (Persero) kembali berhasil menambah pasokan listrik untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali, melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap Ekspansi yang berlokasi di Desa Karang Kandri Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. PLTU berkapasitas 1 x 660 Mega Watt (MW) ini masuk ke dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali melalui jaringan 500 kV Adipala-Kesugihan.

PLTU Lontar

Sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Presiden Joko Widodo melakukan Ground Breaking proyek PLTU Lontar 1x315MW di desa Lontar, kecamatan kemiri, Tangerang-Banten dengan nilai Kontrak sebesar US\$ 225 Juta, ¥ 18 Milyar dan Rp1,58 Trilyun yang akan memasok 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten yakni subsistem Balaraja, Subsistem Kembangan serta Subsistem Muara Karang-Gandul.

PLTG Gorontalo

Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 MW. Pembangkit ini adalah proyek pembangkit listrik pertama yang telah beroperasi dari program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW. Dengan masuknya PLTG Gorontalo rasio elektrifikasi di Gorontalo meningkat menjadi 84,4%. PLTG Gorontalo ini merupakan hasil dari sinergi BUMN antara PT PLN (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

MPP Jungkat, Kalimantan Barat

Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking empat pembangkit Mobile Power Plant (MPP) berkapasitas total 100 MW di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah Pontianak. MPP Kalbar memiliki nilai kontrak USD75.360.614,18. MPP Kalbar ini nantinya akan memperkuat sistem kelistrikan khatulistiwa dan menambah daya mampu pasokan menjadi 425 MW. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian PLTU Ketapang berkapasitas total 20 MW.

PLMTG Arun

Dalam rangka memenuhi kebutuhan daya listrik di Provinsi Aceh pada khususnya dan Sumatera Bagian Utara pada umumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan PLTMG Arun 184 MW yang berlokasi di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe. PLTMG Arun ini merupakan salah satu pembangkit terbesar di Sumatera dan telah beroperasi sejak 21 Desember 2015. Keberadaan PLTMG Arun mampu mendukung sistem kelistrikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe dan menambah kehandalan pasokan listrik di Lhokseumawe.

SUTT Nias

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur kelistrikan di Pulau Nias, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama untuk SUTT 70 KV Nias-Teluk Dalam di Idanoi, Nias, Sumut. SUTT 70 KV Nias-Teluk Dalam terdiri dari 393 tower. Dengan dibangunnya SUTT ini diharapkan bisa meningkatkan kehandalan pasokan, efisiensi penghantaran daya listrik dan rasio elektrifikasi di Pulau Nias.

Infrastruktur Listrik Papua dan Papua Barat

Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-71, PT PLN secara resmi mengoperasikan dan mengelola infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Yahukimo. Di Kabupaten Deiyai jumlah pelanggan resmi mencapai 155 pelanggan dan di Kabupaten Yahukimo mencapai 237 pelanggan. Sebanyak 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan pelayanan listrik dari PT PLN. Dengan demikian, PT PLN secara penuh mengelola dan mengoperasikan seluruh pembangkit dan jaringan listrik yang ada di 14 Kabupaten. Dari program melistriki 14 kabupaten, PT PLN mendapatkan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 15.795 atau setara dengan peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 1,67%. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Papua Barat diantaranya 2 pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan, keenam infrastruktur kelistrikan tersebut antara lain, PLTA Orya genyem (2x10 MW), PLTMH Prafi (1x1,25 MW), SUTT 70 kv Genyem (174, 6 kms), SUTT 70 kv Holtekamp (43,4 kms), GI Wamena (20 MVA) dan GI Jayapura (20 MVA).

Ketahanan Energi

Pembangunan GRR Tuban

Untuk mendukung ketahanan energi, PT Pertamina (Persero) telah menyepakati kerja sama dengan perusahaan migas asal Rusia, yaitu Rosneft Oil Company untuk membangun kilang terintegrasi di Tuban, Jawa Timur. Kesepakatan penggarapan dengan membentuk perusahaan patungan proyek “Grass Root Refinery” (GRR) Tuban telah ditandatangani pada awal Oktober 2016.

Berdasarkan Joint Venture Agreement (JVA), kepemilikan saham pada perusahaan patungan ditetapkan masing-masing: Rosneft sebesar 45% dan Pertamina memiliki 55% saham. Dua perusahaan tersebut menyepakati kucuran modal awal sebesar US\$400 juta (Rp5,22 triliun).

Kilang Tuban direncanakan bakal mengolah minyak mentah hingga 300.000 barel per hari dengan kompleksitas kilang di atas 9 NCI (Nelson Complexity Index) dan karakteristik produk level Euro 5. Bahan baku akan diperoleh dari minyak mentah sour impor dengan *grade medium* dan *heavy*. Dalam proyek ini juga akan dibangun unit *catalytic cracker* berskala besar serta kompleks petrokimia. GRR Tuban juga didesain untuk dapat menerima VLCC supertanker dengan bobot mati hingga 300 ribu ton.

Pembangunan bakal menelan biaya hingga US\$14 miliar dan ditargetkan rampung pada 2021. Saat ini paripihak sedang melaksanakan *bankable feasibility study* (BFS) proyek. Sedangkan keputusan investasi akhir (FID) proyek tersebut akan dilakukan setelah hasil BFS, desain teknik dasar (BED), dan *front end engineering design* (FEED).

Perluasan Infrastruktur Gas Bumi Nasional

Perusahaan milik negara di bisnis gas bumi, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN, masih terus mengembangkan infrastruktur gas bumi di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi terus berkomitmen memperluas infrastruktur gas bumi nasional di Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2016 yang lalu, PGN akan menambah infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 1.685 kilometer dengan proyek pengerjaan hingga 2019.

Tujuan pembangunan infrastruktur tersebut agar gas bumi khususnya yang diproduksi di dalam negeri, ramah lingkungan, efisien dan aman serta mudah dinikmati oleh masyarakat luas. Penyaluran gas bumi kepada pelanggan berpotensi menciptakan penghematan uang negara sebesar Rp88,03 triliun per tahun.

Kini, proyek pengembangan pipa gas yang sedang dijalankan tersebut tersebar di berbagai daerah. Di antaranya proyek pipa transmisi *open access* Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi *open access* Muara Bekasi-Semarang, pipa distribusi Batam

(Nagoya) WNTS-Pemping, dan pipa distribusi gas bumi di wilayah yang sudah berjalan dan daerah baru lainnya. Semuanya dibangun dengan investasi PGN sendiri tanpa mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Total panjang pipa gas PGN pada 2019 ditarget dapat mencapai 8.656 km. Penambahan infrastruktur gas itu dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatan gas bumi sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Sebelumnya, pada tahun 2015 PGN sudah membangun pipa gas sejauh 6.971 km dan dapat menyalurkan gas bumi mencapai 1.591 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Hingga saat ini total panjang pipa yang dibangun dan dioperasikan PGN sudah mencapai lebih dari 7.200 km. Dengan panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi tersebut, PGN mengoperasikan lebih dari 78% pipa gas bumi hilir di seluruh Indonesia.

PGN terus mendorong upaya diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM ke bahan bakar gas. Saat ini, PGN telah mengoperasikan tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), ke delapan SPBG mitra, dan ke 5 MRU (SPBG Mobile).

Sejak tahun 2016 hingga 2019, PGN juga akan menambah 110.000 sambungan gas rumah tangga. Penambahan 110.000 sambungan gas rumah tangga tersebut dibiayai atas investasi PGN sendiri, tanpa mengandalkan dana dari pemerintah atau APBN. Selain itu, PGN juga punya program Sayang Ibu, yang bertujuan memperbanyak rumah menggunakan energi baik gas bumi. Hal ini merupakan tanggung jawab PGN sebagai BUMN dan National Gas Company di Indonesia, untuk menyebarkan pemanfaatan gas bumi yang efisien, ramah lingkungan, mudah serta aman.

Gencarnya PGN membangun pipa dan memasok gas bumi dari Sumatera sampai Papua memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, tahun 2016 PGN telah menyelesaikan pembangun pipa gas di Batam sepanjang 18,3 km, kemudian di Pasuruan, Jawa Timur PGN menyelesaikan pembangunan pipa gas di ruas Kejayan-Purwosari sepanjang 15 km.

Selain itu, terdapat ruas Jetis-Ploso sepanjang 27 km, dan di Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km. Dengan begitu, pipa gas tersebut memasok gas bumi yang bersih dan efisien ke lebih dari 116.600 pelanggan rumah tangga; 1.900 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.580 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero), telah menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2x20 MW di Kecamatan Tampaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

PLTP Lahendong unit 5 dan 6 merupakan *Total Project* dengan total investasi sebesar US\$ 282,07 juta atau setara dengan Rp3,3 triliun. PLTP ini sejak tahap eksploitasi panas bumi hingga pembangkitan listrik dilakukan langsung oleh PGE. Listrik yang diproduksi akan disalurkan kepada PT PLN (Persero).

Peresmian PLTP Lahendong unit 5 dan 6 dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 27 Desember 2016 yang lalu. Bersamaan dengan ini, dilakukan juga peresmian PLTP Ulubelu Unit 3.

Adanya PLTP Lahendong 5 dan 6 sekaligus menambah kapasitas pembangkit Area Lahendong menjadi 120 MW dan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 240.000 kepala keluarga di Minahasa, Sulawesi Utara. Proyek PLTP Lahendong 5 dan 6 juga turut menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero), telah merampungkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 3 berkapasitas 1x55 MW yang ada di Lembah Rendingan dan Gunung Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

PLTP Ulubelu unit 3 menelan biaya investasi sebesar US\$ 250 juta yang setara dengan Rp2,8 triliun. PLTP ini sejak tahap eksploitasi panas bumi hingga pembangkitan listrik dilakukan langsung oleh PGE. Listrik yang diproduksi akan disalurkan ke PT PLN (Persero).

Ketahanan Energi

Peresmian PLTP Ulubelu Unit 3 dilakukan bersamaan dengan PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2x20 MW di Kecamatan Tampaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 27 Desember 2016 yang lalu.

Dengan beroperasinya PLTP Ulubelu Unit 3 yang memiliki kapasitas 1x55 MW yang sekaligus menambah kapasitas pembangkit Area Ulubelu menjadi 220 MW dan mampu memenuhi kebutuhan listrik sekitar 440.000 kepala keluarga melalui transmisi pembangkit listrik di Lampung. Proyek PLTP ini juga turut menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 4

PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Sejalan dengan program pemerintah, dalam rangka percepatan pembangkitan listrik sebesar 35.000 MW, Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu akan sumbang 220 MW atau setara + 9.570 BOEPD di tahun 2017 dengan selesainya pembangunan total project PLTP Unit 4.

Area Geothermal Ulubelu merupakan Wilayah Kerja Pertambangan Milik PGE yang mengoperasikan pemanfaatan energi panas bumi di wilayah Kabupaten Tanggamus-Lampung. Energi listrik sebesar 220 MW rencananya akan didapat dengan selesai pembangunan PLTP Unit 3 yang diharap mulai commercial on date (COD) pada Agustus 2016, dan akan menyumbang tambahan listrik

Sebesar 55 MW, sementara melalui *total project* PLTP unit 4 diharapkan dapat COD Pada Juni 2017 sehingga akan menambah pemanfaatan energi panas bumi sebesar 55 MW.

Total investasi yang dikucurkan untuk pembangunan PLTP Unit 4 ini senilai USD 147 juta yang didanai oleh Pertamina dan World Bank. Per Juni 2016, progresnya mencapai 84,38%.

Sebelumnya khusus untuk warga Tanggamus, PGE Area Ulubelu telah berkontribusi sebesar 110 MW melalui pengoperasian PLTP Unit 1 dan 2 di tahun 2012. Keduanya, mampu memenuhi kebutuhan listrik sebesar 12,8% dari total kebutuhan listrik di Lampung. Dan apabila PLTP 3 & 4 sudah beroperasi akan memenuhi kebutuhan listrik 25% dari total kebutuhan listrik di Lampung.

Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC)

Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) atau Cilacap Blue Sky Project merupakan proyek mengubah 91.000 barel premium dengan RON 88, dan seluruhnya akan menjadi 91.000 barel *gasoline* dengan standar RON 92 atau Pertamax. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyediakan BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Proyek ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2018. Saat selesai, akan ada penambahan kuota kapasitas BBM jenis Pertamax sebanyak 91.000 barel per hari. Perlu digarisbawahi bahwa penambahan Pertamax ini bukan berarti mengurangi jatah Premium.

Kegiatan PLBC telah memasuki fase konstruksi. Dalam fase ini, pekerjaan yang sedang berjalan meliputi *demolition work*, *site grading* serta *trial excavation* di area Axen, FOC 1 dan area Utilities serta area Temporary Facility. Pekerjaan tersebut meliputi pembersihan lahan dari *scraft*, mengecek kondisi tanah dari bahan-bahan yang sudah tertanam sebelumnya, pemadatan tanah serta penebangan pohon di sekitar area pembangunan PLBC.

Pohon yang ditebang tersebut didata jumlahnya dengan tujuan untuk dilakukan penanaman pohon kembali sesuai jumlah pohon yang ditebang. Batang

pohon yang ditebang disumbangkan di komunitas ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar kilang. Hal ini merupakan komitmen Pertamina terhadap kepedulian dan kelestarian lingkungan. Salah satu pekerjaan *demolition* yang berhasil dilaksanakan adalah melakukan pemindahan N2 Storage di area FOC 1 dengan menggunakan 2 *crane*. Sebelum dilakukan pemindahan, terlebih dahulu dilakukan analisa tentang metode kerja untuk memastikan keselamatan dan keamanan saat pemindahan tersebut.

Di samping itu, telah dilaksanakan penerimaan material tiang pancang perdana di area *Off Site Laydown* 13 RU IV Cilacap berjumlah 320,

dimana pemancangan perdana rencananya akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 2016 di area Axen RU IV Cilacap. Pemancangan ini merupakan tindak lanjut yang sangat baik dalam fase konstruksi PLBC. Persiapan sudah tampak dengan kedatangan *spun pile* dan mesin *piling* yang sudah berada di area Axen.

Proyek Langit Biru Cilacap didukung oleh 310 orang pekerja baik dari Pertamina, Main-Con maupun Sub-Con yang ditempatkan di berbagai area kerja. Hingga akhir Agustus 2016, telah terlaksana jam kerja aman dengan jumlah total Owner/Pertamina 69.030 jam dan Kontraktor 464.837 jam.

RDMP Balikpapan

Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, merupakan proyek revitalisasi Kilang Balikpapan. Pelaksanaan proyek akan dilakukan dua tahap, dengan total investasi sekitar US\$ 4,6 miliar. Setelah proyek RDMP tuntas, produksi Kilang Balikpapan nantinya menjadi 360.000 barel per hari dibanding produksi saat ini sebesar 260.000 barel per hari.

PT Pertamina (Persero) berupaya mempercepat pengembangan proyek tersebut, antara lain dengan segera melakukan proses pengadaan barang yang dengan kategori proses pembuatan dan pengiriman yang lama atau *Long Lead Item* (LLI) senilai US\$1 miliar atau sekitar Rp13,3 triliun. Pengadaan ini sekaligus merupakan tahapan konkret untuk percepatan proyek.

Proses pengadaan akan dimulai pada Oktober 2016 dan ditargetkan tuntas pada kuartal I-2017. Pengadaan ini dalam proses yang terpisah dengan paket *engineering, procurement, and construction* (EPC) yang akan dikerjakan oleh kontraktor EPC.

Dengan demikian, selain dapat dilakukan percepatan proses, pengadaan oleh Pertamina untuk memastikan proyek dapat berjalan secara efisien.

Pertamina menargetkan proses konstruksi akan dimulai pada awal 2017. Adapun *mechanical completion* dan *commissioning* RDMP RU V Balikpapan ditargetkan pada Juli 2019. Dengan demikian diharapkan proyek ini akan dapat dioperasikan mulai September 2019.

Untuk itu, Pertamina akan melakukan *final investment decision* RDMP RU V Balikpapan pada awal Juli 2017 yang segera diikuti dengan konstruksi fisik.

Upaya Pertamina mempercepat proyek-proyek pembangunan kilang bertujuan untuk menjamin pasokan energi nasional dan mengurangi impor BBM.

Akselerasi pembangunan kilang yang dilakukan Pertamina akan berdampak positif bagi pengurangan ketergantungan BBM impor dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Ketahanan Energi

RDMP (*Refinery Development Master Plan*) Cilacap

PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, dalam pembangunan peningkatan kapasitas kilang yang saat ini sudah ada (*Refinery Development Masterplan Program*, RDMP) Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2016 yang lalu. Kerja sama ini merepresentasikan komitmen kedua perusahaan dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur energi khususnya dalam proyek kilang minyak yang sejalan dengan lima pilar strategi Pertamina.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup kepemilikan saham, pengembangan dan pengoperasian kilang Cilacap di Jawa Tengah. Pertamina memiliki 55% saham di RDMP Cilacap, sebagai bentuk ketahanan energi. Sementara, Saudi Aramco mendapatkan 45 persen. Nilai kontrak kerja sama ini sekitar US\$4-5 miliar.

RDMP Cilacap awalnya ditargetkan selesai pada 2022. Tetapi pihak Saudi Aramco berani mematok target RDMP Cilacap rampung 2021. Kemudian disetujui pihak Pertamina. Jika RDMP selesai dibangun, maka akan kapasitas produksi kilang akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari (bph). Bukan hanya itu, kompleksitasnya akan ditingkatkan, jadi jauh lebih modern. *Nelson Complexity Index* yang sekarang 4 bakal menjadi 9,4.

Tahapan-tahapan agar RDMP Cilacap bisa dikebut selesai tahun 2021 adalah dengan melihat *Bankable Feasibility Study* (BFS) dan *Basic Engineering Design* (BED) untuk menilai kelayakan proyek telah dilakukan sejak akhir 2015 dan akan selesai pada Februari 2017.

Bila hasil BED dan BFS menunjukkan bahwa proyek layak dilanjutkan, maka Pertamina dan Saudi Aramco membentuk perusahaan *joint venture*. Pada

Maret 2017, Front End Engineering Design (FEED) atau desain akhir RDMP Cilacap dimulai. FEED dapat dikerjakan dalam setahun sampai Maret 2018.

Ada beberapa proses yang dapat dilakukan secara paralel, dikerjakan pada waktu bersamaan sehingga mempercepat proyek. Sembari melakukan FEED, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) juga dilakukan. AMDAL kemungkinan selesai akhir 2017. Begitu AMDAL selesai, lahan untuk RDMP Cilacap langsung disiapkan (*land preparation*).

Saat melakukan *land preparation* dan FEED di akhir 2017, Pertamina waktu yang sama juga membuka lelang untuk memilih kontraktor EPC yang akan mengerjakan pembangunan RDMP Cilacap. Ketika FEED selesai pada Maret 2018, kontraktor EPC telah dipilih, lahan untuk RDMP Cilacap juga telah siap. Maka RDMP Cilacap bisa langsung konstruksi. Pembangunan diperkirakan memakan waktu 3 tahun sehingga pada 2021 sudah selesai.

Dengan kenaikan kapasitas dan kompleksitas, produksi bensin (*gasoline*) kilang Cilacap akan bertambah 80.000 bph, produksi solar meningkat 60.000 bph, dan avtur bertambah 40.000 bph. Selain itu, kilang Cilacap juga akan menghasilkan banyak produk petrokimia untuk bahan baku berbagai industri. Hal ini tentu ini akan menciptakan *multiplier effect* yang besar.

Selain untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco juga meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kilang minyak di Indonesia untuk berkontribusi dalam peningkatan ketahanan energi.

Inovasi Produk BBM Non Subsidi

Pertalite

Pertalite merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang belum lama ini diproduksi dan dipasarkan oleh Pertamina. Dengan kadar Research Octane Number (RON) yang mencapai 90, Pertalite dihadirkan sebagai varian baru gasoline bagi konsumen pengguna kendaraan bermotor yang menginginkan bahan bakar minyak yang bisa menghasilkan pembakaran yang jauh lebih baik bagi mesin kendaraan.

Kesesuaian oktan 90 PERTALITE dengan perbandingan kompresi kebanyakan kendaraan beroperasi sesuai dengan rancangannya. Perbandingan Air Fuel Ratio yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar menjadikan kinerja mesin lebih optimal dan efisien untuk menempuh jarak lebih jauh karena biaya operasi bahan bakar dalam Rp/Km akan lebih hemat.

Kesesuaian angka Oktan PERTALITE dan Aditif yang dikandungnya dengan spesifikasi mesin akan menghasilkan performa mesin yang jauh lebih baik dibandingkan ketika menggunakan Oktan 88. Hasilnya adalah tarikan lebih enteng, kecepatan yang lebih tinggi serta emisi gas buang yang lebih bersih. Hal ini akan menjadikan kendaraan lebih lincah dalam bermanuver serta lebih ramah lingkungan.

Tak pelak kehadiran Pertalite diprediksi akan menggantikan Premium sebagai BBM primadona masyarakat. Hal ini bisa terlihat dari penjualan pertalite yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada medio Agustus 2015, Pertamina hanya mampu menjual 1.022 kilo liter per harinya, dan pada Agustus 2016 penjualan Pertalite mengalami peningkatan tajam menjadi 16.037 kilo liter per hari. Dengan grafik peningkatan yang tinggi tersebut, Pertalite dinobatkan sebagai produk NPSO terbaru dengan penetrasi terbesar dan tercepat dalam sejarah Pertamina.

Dexlite

Dexlite adalah bahan bakar minyak terbaru dari Pertamina untuk kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Dexlite diluncurkan pada bulan April 2016 sebagai varian baru bagi konsumen yang menginginkan BBM dengan kualitas di atas Solar bersubsidi cetane number minimal 48, tetapi dengan harga yang lebih murah daripada Pertamina Dex yang memiliki cetane number minimal 53.

Dexlite sendiri memiliki cetane number 51, dan kadar sulfur yang lebih rendah 1.000 hingga 1.200. Dengan menggunakan Dexlite membuat konsumsi BBM akan lebih irit jika sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang telah ditetapkan produsen. Selain itu, dengan kandungan sulfur yang lebih rendah, membuat Dexlite lebih ramah lingkungan ketimbang solar biasa yang memiliki kandungan sulfur 3500.

Sejak pertama diluncurkan, perkembangan penjualan Dexlite terus mengalami peningkatan. Pada Agustus 2016, Pertamina tercatat berhasil menjual 315 kilo liter per harinya. Dengan kata lain, Dexlite berhasil muncul sebagai alternative yang lebih baik untuk konsumen Solar PSO.

Pertamax Turbo

Pertamax Turbo adalah bahan bakar terbaru dari Pertamina dengan RON 98 dan Ignition Boost Formula yang dirilis di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam pagelaran pameran otomotif GIIAS di ICE BSD, Tangerang. Varian ini merupakan pengembangan dari Pertamax Plus yang mempunyai nilai RON 95. Lahirnya Pertamax Turbo ini diikuti dengan kerja sama antara Pertamina dan Centro Petroli Roma (CPR) selaku mitra Lamborghini dalam pendistribusian bahan bakar Pertamax Turbo ke sirkuit-sirkuit di seluruh Eropa. Hingga saat ini Pertamax Turbo sudah digunakan di 4 balapan yakni di Monza-Italia, Silverstone - Inggris, Paul Richard-Perancis, dan Spa Francorchamps - Belgia.

Ketahanan Energi

Digunakannya Pertamina Turbo di ajang balap bergengsi di Eropa membuktikan bahwa Pertamina Turbo telah diakui sebagai bahan bakar dengan performa yang sangat baik. Karena selain memiliki keunggulan untuk meningkatkan driveability kendaraan sehingga lincah bermanuver, akselerasi mesin menjadi lebih cepat karena torsi yang dihasilkan lebih tinggi, juga meningkatkan kecepatan maksimal kendaraan, meningkatkan tenaga mesin kendaraan dan menyempurnakan pembakaran bahan bakar pada mesin, serta yang paling penting adalah mengurangi kadar emisi gas buang yang lebih baik.

Saat ini, Pertamina Turbo sudah dijual di SPBU COCO Pertamina dengan fokus awal di area Jabodetabek. Kehadiran Pertamina Turbo ini pun ditanggapi positif oleh masyarakat yang selama ini sudah menggunakan produk RON 95. Sejak diluncurkan pada Agustus 2016, penjualan Pertamina Turbo meningkat 76,28% pada Desember 2016.

Inovasi Produk Non BBM Non Subsidi

Bright Gas

Untuk melayani kebutuhan energi masyarakat modern, Pertamina terus berinovasi pada produksi gas kemasan non subsidi, salah satunya dengan meluncurkan produk Bright Gas.

Menawarkan keamanan dan kenyamanan, Bright Gas menargetkan urban millennial sebagai customer. Sebab, Bright Gas mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk ELPIJI Pertamina lainnya. Salah satu kelebihan Bright Gas adalah tabungnya yang sudah dilengkapi dengan katup pengaman ganda (Double Spindle Valve System) sehingga membuat Bright Gas lebih aman dari kebocoran. Menariknya lagi, tabung Bright Gas hadir dengan dua pilihan warna, yaitu ungu dan merah muda, sehingga keberadaannya akan mempercantik suasana dapur dan menjadikan memasak lebih ceria dan menyenangkan.

Bright Gas hadir dengan tiga macam varian yang berbeda, yaitu 12 kilo gram, 5,5 kilo gram, dan kemasan 220 gram. Penjualan Bright Gas ini pun terus meningkat setiap tahunnya. Dari 36,3 ribu MT pada tahun 2015, meningkat menjadi 71,2 ribu MT pada tahun 2016.

Enduro G-Matic

Pertamina meluncurkan pelumas baru untuk motor matik, Enduro Matic-G. Berbeda dengan pelumas Enduro untuk motor matik yang sudah lebih dulu hadir di pasar, Enduro Matic-G hadir dengan spesifikasi berbeda, yakni dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.

Enduro Matic-G dirancang khusus untuk motor matik 4-Tak berkualitas tinggi yang menggunakan base oil sintetis. Karena spesifikasinya yang kental, pelumas ini sangat cocok untuk motor matik untuk pengendalian di dalam kota yang kerap didera macet dan kondisi jalan statis. Kelebihan lain pelumas Enduro Matic-G adalah tingkat viskositas yang lebih tinggi dibandingkan pelumas lain. Karakter pelumas yang demikian dapat menjaga temperatur mesin terutama di jalan dalam kota yang padat dan kerap macet. Selain itu, Enduro Matic-G juga memiliki tingkatan mutu JASO MB, yang merupakan standar Jepang untuk motor matik bermesin 4-tak.

Enduro Matic-G resmi diluncurkan pada 5 November 2016 di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS). Penjualannya pun terus meningkat sejak pertama diluncurkan. Tercatat hingga Desember 2016, penjualan Enduro Matic-G meningkat sebanyak 64,95%.

Fastron Techno Lambo Series

Pertamina Lubricants meluncurkan varian pelumas baru Fastron Platinum khusus untuk kendaraan supercar. Fastron Platinum memiliki dua varian yakni Fastron platinum SAE 0W-40 untuk kelas premium car dan sport car, serta Fastron Platinum Racing SE 10W-60 untuk kelas sport car dan racing car.

Pertamina telah melakukan joint development bersama Lamborghini untuk pelumas khusus supercar asal Italia ini. Pengujian terhadap pelumas

Fastron dilakukan langsung di Italia. Produk Fastron platinum racing telah lulus uji dan mendapatkan approval khusus dari Lamborghini. Hal itu pun membuat Pertamina terpilih technical partner Automobil Lamborghini untuk kegiatan motorsport Lamborghini, yaitu Lamborghini super trofeo dan Lamborghini GT3.

Melalui produk unggulan Pertamina ini semakin memperkuat eksistensi pelumas Pertamina di arena supercar internasional.

Ekspansi

Lubricants

Untuk meningkatkan overseas presences, Pertamina terus melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan adalah dengan mengakuisisi AMACO, yang merupakan produsen pelumas asal Thailand. Dengan akuisisi ini AMACO pun berubah nama menjadi Pertamina Lubricant Thailand Ltd.

Sebelum diakuisis Pertamina, pabrik tersebut hanya melayani pasar dalam negeri Thailand. Setelah diakuisisi, Pertamina akan melebarkan pasar hingga Negara-negara Indocina seperti Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam dan Bangladesh.

Dalam rangka mencapai ambisi tersebut, Pertamina menambah modal untuk menaikkan produksi dan pemasaran. Selain itu, jajaran manajemen juga diganti dengan sumber daya manusia dari Indonesia. Tak pelak, setelah akuisisi tersebut volume penjualan dan laba yang diraih pabrik tersebut pun meningkat pesat.

Aviation

Pertamina Aviation adalah pemasar dan penyedia bahan bakar penerbangan dengan jaringan global. Pertamina Aviation telah berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar berkualitas dari bandara utama ke remote landasan untuk mendukung pertumbuhan industri. Saat ini Pertamina melayani kegiatan pengisian bahan bakar pesawat udara di seluruh wilayah Indonesia dan Timor Leste.

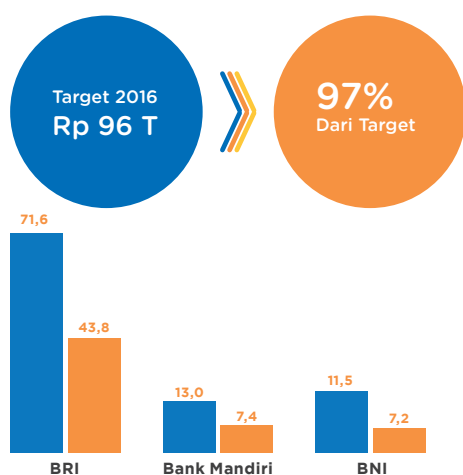
Selain pelayanan avtur dalam negeri, Pertamina juga melayani pengisian avtur di bandara-bandara internasional di luar negeri. Pelayanan tersebut dilakukan melalui konsep Contracting Company Delivery Company (Conco Delco) untuk penerbangan regular di Singapura, Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur, Incheon, Jeddah, Medinah, Penang, Dubai dan Amsterdam, serta melayani penerbangan ad hoc di Kairo, Tunisia, Majuro, Frankfurt dan Guam.

Untuk pengisian Avtur di luar negeri, Pertamina juga mengalami peningkatan. Dari 12 Airport Regular Flights dan 20 Airport ad-hoc flight pada 2014, meningkat menjadi 16 airport regular flights dan 29 airport ad-hoc flight pada tahun 2016.

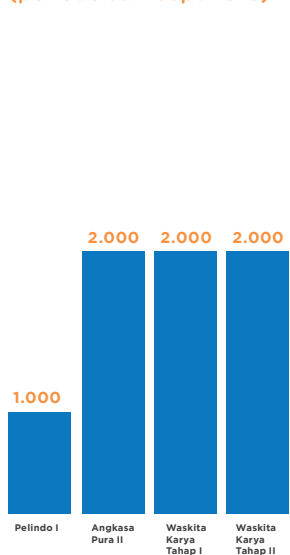
Inklusi Keuangan

Membuka Akses Pendanaan dan Keuangan ke Segmen Terbawah Masyarakat

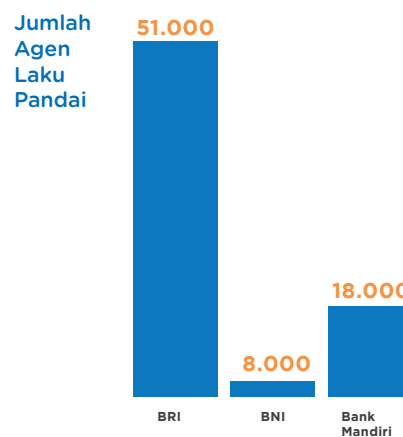
Mulai Januari 2016, pemerintah telah menyalurkan KUR dengan bunga 9% per tahun (bunga dari bank hanya 17,5%, subsidi pemerintah 8,5%) yang dijamin Jamkrindo & Askrindo



Penerbitan Obligasi untuk Sektor Infrastruktur (periode Jan-Sept 2016)



Pelan tapi pasti, skala bisnis laku pandai bank BUMN semakin membesar. Tak hanya dari sisi jumlah agen, bank BUMN juga mendorong pertumbuhan agen di wilayah Indonesia.



Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia pada November 2016. Terdapat 6 pilar dalam SNKI, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang terutama ditujukan kepada masyarakat di lapisan bawah atau "*in the bottom of the pyramid*" untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun

pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2019, keterjangkauan sistem keuangan dapat mencapai 75%, dari 36% pada tahun 2014. Karena itulah, SNKI dibuat guna mendukung penetrasi sektor keuangan.

Kementerian BUMN telah merespons amanat Presiden tersebut dengan menggerakkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlibat secara aktif. Selain itu, Kementerian juga mendukung kemandirian keuangan masyarakat melalui sejumlah program yang telah dijalankan oleh BUMN.



Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberdayakan UMKM, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung. UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

Komitmen pemerintah dalam membantu usaha mikro dan koperasi tersebut dilandasi oleh penerbitan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Sehingga guna mendukung peningkatan akses sumber pembiayaan bagi UMKM diperlukan program kredit berpenjaminan dan selanjutnya menunjuk PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit yang kemudian diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo ditunjukan untuk mensukseskan program KUR tersebut. Hal itu dilaksanakan untuk menggerakkan perekonomian rakyat sesuai dengan Nawacita yaitu membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Inklusi Keuangan

Gambaran pelaksanaan Program KUR sepanjang periode 2007 hingga 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut:



Adapun Program KUR berdasarkan Sektor Ekonomi adalah:

No	Sektor Ekonomi	Plafon KUR 2001-31 Okt 2016		Jumlah UMKM		Jumlah Tenaga Kerja	
		(Rp juta)	%	(Unit)	%	(Orang)	%
1	Adm. Pemerintahan	17.986	0,01	2.451	0,01	7.631	0,02
2	Badan Internasional	1.018	0,00	65	0,00	154	0,00
3	Industri Kecil	6.389.119	2,33	384.275	2,10	561.615	1,63
4	Jasa Kemasyarakatan	5.585.041	2,04	335.425	1,83	489.613	1,43
5	Jasa Kesehatan	268.506	0,10	10.520	0,06	17.089	0,05
6	Jasa Pendidikan	236.827	0,09	8.333	0,05	8.628	0,03
7	Jasa Perorangan	511.475	0,19	34.168	0,19	44.801	0,13
8	Konstruksi	464.858	0,17	21.625	0,12	82.041	0,24
9	Listrik, gas dan air	34.187	0,01	1.186	0,01	2.128	0,01
10	Penyediaan Akomodasi	4.439.192	1,62	149.768	0,82	202.679	0,59
11	Perantara Keuangan	503.207	0,18	1.592	0,01	17.143	0,05
12	Perdagangan *)	193.908.714	70,69	13.174.073	71,95	24.662.953	71,79
13	Perikanan dan Kelautan	2.353.961	0,86	158.884	0,87	224.097	0,65
14	Pertambangan *)	2.849.839	1,04	128.502	0,70	240.546	0,70
15	Pertanian dan Kehutanan **)	49.694.917	18,12	3.475.226	18,98	6.910.162	20,11
16	Tenaga Kerja Indonesia	9.982	0,00	1.081	0,01	2.497	0,01
17	Transportasi	2.183.806	0,80	77.329	0,42	82.184	0,24
18	Usaha Lainnya	869.446	0,32	64.895	0,35	90.057	0,26
19	Usaha Persewaan	3.997.433	1,46	280.876	1,53	710.596	2,07
Total		274.319.513	100,00	18.310.274	100,00	34.356.614	100,00

Keterangan:

*) termasuk sektor jasa & perdagangan untuk KUR Lama dengan Penjamin Jamkrindo

**) termasuk sektor industri pertambangan untuk KUR Lama dengan Penjamin Jamkrindo

***) termasuk sektor agribisnis untuk KUR Lama dengan Penjamin Jamkrindo

Mekaar

Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha super mikro. Melalui program ini, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjalankan program ini sejak awal tahun 2016.

Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Mekaar secara khusus ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini, PNM melakukan survei setiap keluarga yang akan diberikan bantuan modal untuk dididik dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri. Dalam pemberian bantuan itu, nasabah akan dibentuk kelompok.

Mekaar memberikan pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan metode kelompok. Dengan modal dari Mekaar, perempuan prasejahtera dapat memanfaatkan keterampilan dan waktunya untuk menjalankan usaha super mikro.

Hasil usaha kelompok masyarakat yang dibantu tersebut akan meningkatkan pendapatan, pendidikan anak dan kesehatan, tabungan, aset dan kesejahteraan keluarga. Sebab terbukti, perempuan dalam keluarga bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan jika diberi kesempatan dan dukungan modal untuk berusaha (*entrepreneur*).

Inklusi Keuangan



Target Mekaar adalah:

- Perempuan pra-sejahtera (berpenghasilan dibawah US\$ 1,99/hari/kapita)
- Mempunyai usaha produktif (sudah dan akan)

No	Produk dan Ketentuan	Ketentuan
1	Plafon	Rp2 juta - Rp5 juta
2	Jangka Waktu	25 minggu - 50 minggu
3	Grace Period	Di awal pembiayaan dan 2 minggu sebelum Hari Raya Iedul Fitri dan Natal
4	Pertemuan Kolektif Mingguan	Wajib hadir
5	Jumlah Anggota Dalam Kelompok	Minimal 10 anggota
6	Asuransi Jiwa	Gratis
7	Asuransi Kredit	Gratis
8	Agunan	Tidak diperlukan

Piihan memberikan bantuan modal kerja untuk individu anggota masyarakat kurang mampu yang diberikan secara berkelompok ini, antara lain karena sejumlah alasan:

- Bantuan sosial tidak akan mengentaskan kemiskinan
- Bantuan amal akan melanggengkan kemiskinan karena tidak mandiri
- Perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan optimal karena kurang modal

- Akses pinjaman tidak ada, bank umum tidak menjangkau karena ketiadaan agunan.

Program Mekaar setidaknya memiliki dua tujuan utama yang sangat penting, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kaum perempuan dan ikut menyukseskan program keuangan inklusif. Mengacu pada dua target penting tersebut, program Mekaar telah melakukan sejumlah pola kegiatan, yaitu:

- Indoktrinasi usaha untuk disiplin, kerja keras, jujur sebagai dasar pembiayaan dan pemberdayaan usaha.
- Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
- Pembiasaan budaya menabung
- Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Proses Indoktrinasi & Contoh Nasabah

Janji Nasabah

Janji ini diucapkan dengan suara lantang.

“Kami berjanji:

1. Hadir tepat waktu
2. Membayar angsuran Mingguan, sesuai kewajiban
3. Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha
4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami

5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban”

Janji Account Officer

Janji ini juga diucapkan dengan suara lantang.

“Saya berjanji:

1. Hadir tepat waktu dalam pertemuan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
2. Memegang amanah menyalurkan pembiayaan untuk usaha yang sudah disetujui
3. Jujur dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan uang angsuran nasabah
4. Tidak menerima imbalan apapun selain angsuran pembiayaan dari nasabah
5. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam melayani nasabah.”

Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan



Keluarga Pra Sejahtera



Penanaman Disiplin diri dan Bantuan Modal Usaha



Pengembangan Usaha



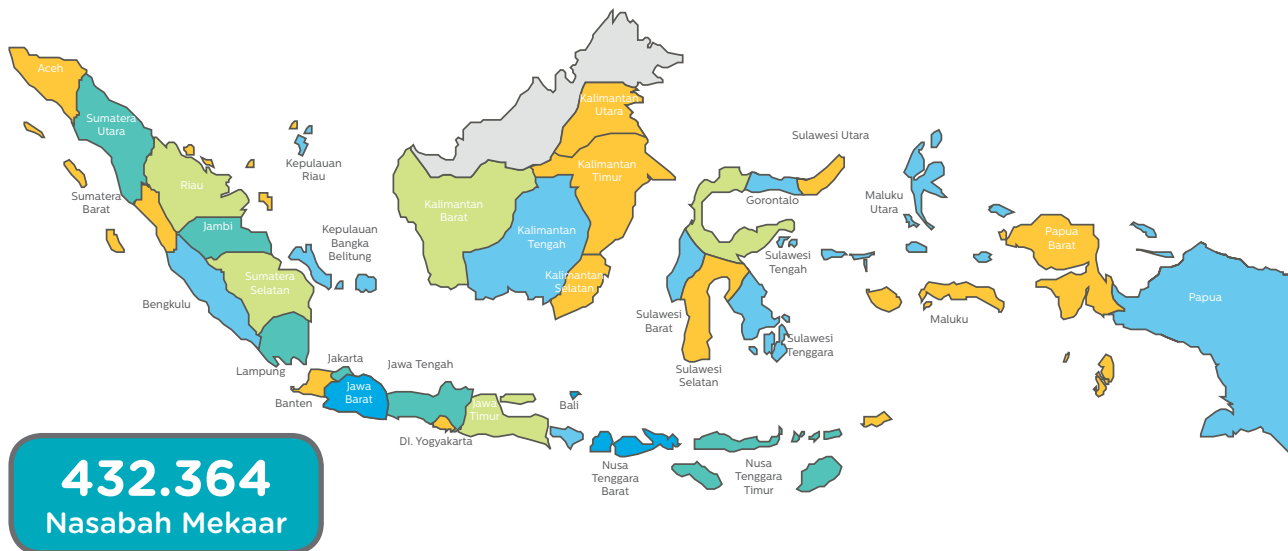
Peningkatan Ekonomi Keluarga

Inklusi Keuangan

Penyebaran Kantor Layanan Desember 2016

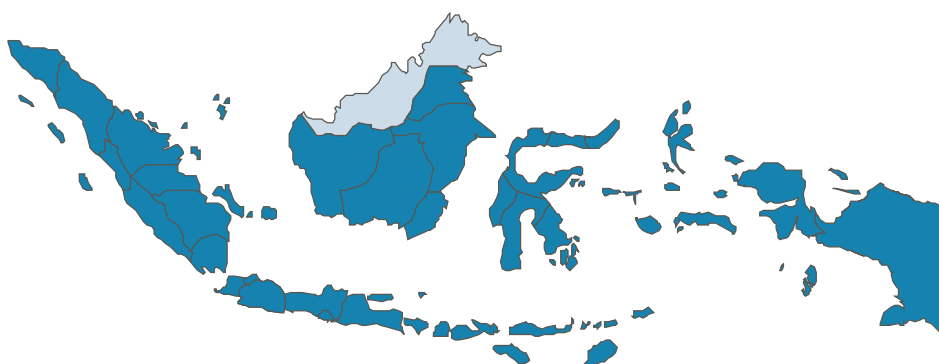
Hingga 31 Desember 2016, Kantor Cabang Mekaar sudah mencapai 372 kantor yang melayani 15 Provinsi, termasuk provinsi Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

372 Kantor Layanan



Rencana Penyebaran Kantor Layanan 2017

Pada tahun 2017, Kantor Cabang Mekaar akan mencapai 1.100 kantor yang melayani 30 Provinsi, termasuk provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Bengkulu, Bali dan Kepulauan Riau.



1.100
Kantor Layanan

400
Kabupaten/Kota

27
Provinsi

> Rp5 triliun
Total Penyaluran

2 juta
Nasabah Mekaar



Benefit Produk Mekaar di tahun 2017

- Mengembangkan usaha super mikro sebanyak 2 juta keluarga prasejahtera dan memberi manfaat kepada 8 juta orang, yang akan meningkatkan perekonomian secara nasional.
- Menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* pada golongan perempuan prasejahtera yang mempunyai kemampuan usaha tetapi tidak mempunyai akses pembiayaan.
- Penyerapan Tenaga Kerja (Perusahaan akan mempekerjakan tambahan 13.700 karyawan untuk pendirian 1.000 cabang yang melayani 2 juta nasabah). Sebagian besar tenaga kerja adalah lulusan SMA sederajat.
- Menghindari pinjaman ke rentenir untuk masyarakat prasejahtera yang memberikan suku bunga sangat tinggi.
- Kontribusi ke penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun dividen.

ATM Bersama HIMBARA

HIMBARA adalah Himpunan Bank Negara, yaitu lembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN. Hingga saat ini, bank-bank tersebut terus mengembangkan sinergi agar kinerja operasional lebih efisien dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat lebih luas dan bermanfaat.

Sebelumnya, Himbara bekerja sama dalam pembayaran jasa tol. Sejak tahun 2016, Himbara secara resmi telah meluncurkan mesin anjungan tunai mandiri bersama bertajuk “Link ATM HIMBARA”.

Pada tahap awal sinergi, sebanyak 50 jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik 4 bank BUMN dikonsolidasikan. Lokasi awal penyebarannya di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sinergi ini tidak hanya memberikan manfaat kepada perbankan karena biaya operasionalnya lebih efisien. Nasabah juga menerima manfaat besar, misalnya dapat menikmati biaya transaksi yang lebih murah.

Hingga Maret 2016, berdasarkan data Bank Indonesia jumlah ATM Himbara ada sebanyak 58.217 unit atau 58,52% dari total keseluruhan ATM perbankan di Indonesia. Sedangkan, *Electronic Data Capture* (EDC) Himbara sampai Maret 2016 ada sebanyak 603.226 unit atau 68,26% dari total keseluruhan EDC seluruh bank di Indonesia. Pada tahun 2017, diharapkan 10 ribu ATM Himbara akan terintegrasi.

Ketahanan Pangan

Meningkatkan Daya Jangkau Rakyat dan Menyangga Ketahanan Pangan



Pengadaan beras dari BULOG ditargetkan
3,9 juta ton atau



Pembangunan Infrastruktur - Rumah Pangan Kita



Pengadaan Beras PSO per 31 Desember 2016



Realisasi pengadaan beras PSO tahun 2016 mencapai 2,9 juta ton sehingga akan memberikan dampak:

1. Stok akhir tahun akan cukup kuat (di atas 1,5 -1,7 juta ton), sehingga tidak diperlukan impor.
2. Stabilisasi harga/inflasi terjaga
3. Kebutuhan Raskin/Rastra sampai dengan awal tahun 2017 tercukupi.

Pada tahun 2016, peringkat ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data Global Food Security Index (GFSI) menunjukkan, ketahanan pangan Indonesia kini (2016) berada di peringkat ke-71 dari 113 negara. Data GFSI telah dirilis The Economist Intelligence Unit, dan pada 2014 dan 2015 angka ini merosot ke posisi 76 dari 113 negara.

Ketahanan pangan Indonesia secara umum diberi nilai 50,6, naik dari tahun sebelumnya 47,9. Peningkatan nilai ini disebut terjadi karena 3 aspek, yakni karena keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan.

Pada poin keterjangkauan, Indonesia di tahun 2016 mendapat nilai 50,3, naik dari sebelumnya 46,8.

Ketersediaan juga meningkat menjadi 54,1 dari sebelumnya 51,2. Sementara kualitas dan keamanan naik tipis ke 42 dari sebelumnya 41,9.

Poin keterjangkauan mengalami kenaikan paling signifikan dibanding dua poin lainnya. Hal ini didorong beberapa program pemerintah, salah satunya adalah Toko Tani Indonesia (TTI) yang mulai diluncurkan pada Agustus 2015 lalu.

Penilaian positif lembaga internasional ini merupakan apresiasi atas upaya pemerintah Indonesia yang terus berinovasi meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Selama ini, dalam merealisasikan proyek tersebut, kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting.

BULOG: Menyangga Ketahanan Pangan

BUMN mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Perum Bulog, BUMN melaksanakan penugasan dalam rangka menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga komoditas pangan.

Perum Bulog menargetkan penyerapan beras dan gabah pada 2016 yang lalu sebesar 3,9 juta ton, terdiri dari pengadaan lewat jalur Public Service Obligation (PSO) sebesar 3,2 juta ton dan jalur komersial sebesar 700 ribu ton. Untuk merealisasikan penyerapan itu, Bulog mengalokasikan dana sekitar Rp30 triliun selain itu juga menggandeng mitra kerja serta Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di daerah sebagai Satgas Pengadaan Gabah.

Target penyerapan beras dan gabah Bulog lebih tinggi dari realisasi 2015 yang hanya sekitar 2,7 juta ton. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan beras di dalam negeri dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar.

Terkait target penyerapan secara komersial, hal ini baru pertama kali dilakukan Bulog, karena tahun sebelumnya hanya menggunakan jalur PSO. Bulog menargetkan penyerapan beras komersial untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di atas harga pokok pemerintah (HPP).

Sementara itu, dari target pengadaan beras sebesar 3,9 juta ton pada Oktober 2016, sebanyak 82% (2,7 juta ton) telah terealisasi, naik sebanyak 132% dari realisasi 2015. Prognosa tahun 2016 diperkirakan mencapai 3 juta ton, sehingga akan memberikan dampak antara lain: pertama, stok akhir tahun akan cukup kuat (di atas 1,5-1,7 juta ton, sehingga tidak diperlukan impor); kedua, stabilisasi harga/inflasi terjaga; ketiga, kebutuhan Raskin/Rastra sampai dengan awal tahun 2017 tercukupi.

Rumah Pangan Kita

Selain pengadaan beras, Perum Bulog juga berkomitmen membangun infrastruktur pangan melalui outlet Rumah Pangan Kita. Hal ini merupakan bagian peran BUMN dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Tujuan membangun RPK adalah untuk mengurangi persoalan akan komoditas pangan, terutama masalah harga. Masalah tingginya harga komoditas pangan strategis selama ini disebabkan masih kurang bagusnya sistem pendistribusian pangan nasional.

Pembangunan 10.000 RPK juga sebagai upaya menguatkan jaringan distribusi Bulog yang selama ini terbilang sangat rendah. Adapun, RPK yang ditargetkan Bulog ini akan melibatkan banyak masyarakat, sebab outlet tersebut akan dibangun di lahan milik masyarakat. Seperti garasi yang tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan, atau ruangan apa pun yang bisa digunakan.

Konsep RPK itu sendiri, merupakan alternatif pasar di mana rumah-rumah menjadi pusat pangan yang nantinya didistribusikan langsung oleh Bulog.

Perum Bulog menargetkan pembangunan Rumah Pangan Kita (RPK) sebanyak 10.000 selama satu tahun yang terhitung sejak Juli 2016. Hingga Desember 2016 telah tersedia sebanyak 6.369 RPK terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Target tahun 2017 minimal adalah 30.000 RPK terkonsentrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya akan dibuat sinergi dengan BUMN Perbankan untuk menambah jumlah titik distribusi RPK, antara lain dengan Bank BNI melalui Agen46 dan Bank BRI melalui agen BRILink. Hingga 21 Januari 2017 telah terealisasi 1.265 outlet RPK, dengan target sinergi untuk tahap awal ini, khususnya untuk mendukung Bantuan Pangan Non Tunai adalah 9.000 RPK.

Selain itu, Bulog juga akan membangun Distribution Center (DC), yang mana sebagai tempat pendukung bagi 10.000 RPK. Setidaknya dalam satu tahun ditargetkan bisa membangun 200 DC. DC ini akan tersebar di beberapa daerah, dan akan merevitalisasi gudang-gudang Bulog yang selama ini kurang dimaksimalkan.

Mengenai komoditas yang akan dijual, akan disesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. Seperti beras, gula, bawang putih, bahkan daging ayam, daging sapi, dan telur ayam jika memang dibutuhkan.

Bagi masyarakat yang berminat untuk membuka RPK, hanya cukup mendatangi kantor-kantor Bulog dan syaratnya memiliki lahan atau ruangan yang cukup untuk membuka gerai.

Perum Bulog juga akan bekerja sama dengan perbankan untuk kredit modal kerja bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.

Ketahanan Pangan



Revitalisasi Pabrik Gula

Dalam rangka mewujudkan program kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, pemerintah mengharapkan peran BUMN Perkebunan untuk meningkatkan kapasitas pabrik gula yang ada, pembangunan pabrik gula baru yang terintegrasi dengan co-generation yang menghasilkan listrik dan program industri hilir bio-ethanol. Untuk mewujudkan hal tersebut, BUMN Perkebunan Gula memperoleh dana Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp3,5 triliun, dana PMN tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai peningkatan kapasitas pabrik gula, pembangunan pabrik gula baru, hilirisasi, peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi pabrik gula.

Selain hal diatas, dalam rangka meningkatkan produksi gula nasional, Perum Bulog pada tahun 2016 telah melakukan akuisisi 70% saham PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) yang sebelumnya merupakan pabrik gula milik swasta, akuisisi saham tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Perum Bulog diberikan penugasan untuk stabilisasi harga jual gula ditingkat konsumen dan tahun 2016 Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk importasi raw sugar sebesar 266 ribu ton, dengan memiliki sendiri pabrik gula diharapkan ditahun mendatang apabila Pemerintah akan menugaskan Perum Bulog, maka akan lebih efisien dalam mengolah raw sugar menjadi gula konsumsi.

Revitalisasi Pabrik Gula Terpadu Glenmore

Untuk menjaga ketersediaan gula nasional, BUMN melakukan pembangunan pabrik gula terpadu Glenmore di Kalirejo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik Gula Terpadu (PGT) Glenmore merupakan pabrik gula termmodern dan terbesar di Indonesia, resmi beroperasi pada tanggal 2 Agustus 2016.

PG Glenmore yang mulai dibangun sejak tahun 2012 menempati lahan seluas 29 hektare. PG ini dikelola oleh PT Industri Gula Glenmore (IGG) yang

merupakan konsorsium PT Perkebunan Nusantara XII dan XI. Bertindak sebagai kontraktor pelaksana Engineering, Procurement, Construction (EPC) adalah konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) dan PT Weltes Energi Nusantara.

Nilai investasi IGG mencapai US\$64.183.628 ditambah Rp673.284.368.290 atau senilai Rp1,5 triliun, dengan pendanaan terbesar berasal dari kredit perbankan nasional.

Pabrik Gula ini juga baru saja melakukan giling tebu perdananya pada awal Agustus 2016 menggunakan teknologi Proses Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK) yang menghasilkan gula berkualitas tinggi dengan kadar ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) atau kadar warna gula di bawah 100. Pada umumnya saat ini pabrik gula masih menggunakan sistem fosfatasi dengan ICUMSA 300-500.

Sistem DRK pada dasarnya merupakan upaya penyempurnaan dari sistem sulfitasi karena menjanjikan output dengan mutu produk yang lebih baik. Namun demikian proses dalam sistem DRK tahapannya lebih panjang sehingga memerlukan tambahan investasi peralatan dan tenaga kerja, dibanding dengan sistem sulfitasi. Apabila teknologi DRK ini dilakukan secara baik dan benar, maka akan diperoleh produk Gula Kristal Putih (GKP) dengan kualitas dan tampilan yang lebih baik, karena warna larutan GKP yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan proses sulfitasi.

Saat ini PG Terpadu Glenmore dapat memproduksi 6.000 ton tebu per hari (TTH) dan ke depannya akan dikembangkan kapasitasnya menjadi 8.000 TTH.

PG Terpadu Glenmore merupakan pabrik yang dapat memasok energinya sendiri karena bahan bakar listriknya berasal dari ampas tebu yang menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) dengan kapasitas 2 x 10 MW.

Dengan konsep nol limbah, limbah dimanfaatkan kembali untuk dapat digunakan bagi keperluan operasional pabrik gula atau dijual kepada industri lainnya, sehingga dapat bernilai ekonomi tinggi. Hasil produk sampingan pabrik gula ini dapat diolah menjadi PLTBM, pupuk organik, pakan ternak, bioethanol dan bahan baku penyedap makanan.

Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional pabrik gula, listrik tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat di sekitar wilayah. Dalam pengelolaan limbah cairnya, PG Terpadu Glenmore menggunakan teknologi *Water Treatment Plan*, sehingga limbah cair yang dihasilkan diproses menjadi air murni kembali.

Melalui komitmen kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, sampai dengan saat ini pembangunan proyek PG Terpadu Glenmore telah berhasil mencatatkan lebih dari 2 juta jam kerja tanpa kecelakaan.

Melalui pembangunan proyek Pabrik Gula Terpadu Glenmore, perusahaan berhasil mengemban kepercayaan klien untuk dapat membangun pabrik dengan sistem modern, teknologi terkini, ramah lingkungan, dan hemat energi.

Pembangunan pabrik gula Glenmore ini memberikan sejumlah *multiplier effect*, antara lain penyerapan 11.800 tenaga kerja, penggunaan 75.000 truk angkutan tebu saat musim giling, peluang usaha tebu rakyat seluas 2.000-3.000 hektar, dan kontribusi pajak senilai Rp40 miliar.

Akuisisi Pabrik Gula PT Gendis Multi Manis

Dalam rangka meningkatkan produksi gula nasional, Perum Bulog pada tahun 2016 telah melakukan akuisisi sebuah Pabrik Gula (PG) yaitu dg mengambil alih 70% saham PT Gendis Multi Manis yang sebelumnya 100% sahamnya dimiliki swasta.

Akuisisi saham tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Perum Bulog telah diberikan penugasan untuk stabilisasi harga jual gula ditingkat konsumen.

Tahun 2016 Perum Bulog telah mendapatkan penugasan untuk importasi raw sugar sebesar 266

ribu ton yg sepenuhnya diproses di Pabrik Rafinasi dan Pabrik Gula milik swasta.

Dengan memiliki Pabrik Gula sendiri diharapkan ditahun mendatang apabila Pemerintah akan menugaskan Perum Bulog, maka akan lebih efisien dalam mengolah raw sugar menjadi gula konsumsi.

Selain itu dengan memiliki Pabrik Gula sendiri dimungkinkan Bulog akan dapat membuat pola pembelian tebu yg lebih menarik yg akhirnya akan meningkatkan produksi tebu oleh petani.

BUMN dan Pemangku Kepentingan





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Sebagai wujud nyata kepedulian BUMN dalam menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri, serta adanya kesadaran bahwa Indonesia merupakan sebuah negeri yang berlimpah kekayaan alam dan dihiasi dengan berbagai keragaman, mulai dari ribuan pulau yang menghiasi khatulistiwa, dengan ragam budaya, bahasa daerah, suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan, dan lain-lainnya, Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian

dari masyarakat bernegara mewujudkan “BUMN Hadir untuk Negeri” dalam bentuk pelaksanaan kegiatan oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 Provinsi seluruh Indonesia, serta menjadi bagian dalam “membangun pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*)” mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*) untuk turut serta “Membangun Kapasitas Nasional (*National Capacity Building*)”.

BUMN maupun pemangku kepentingan diharapkan akan memiliki pandangan yang baik tentang Kementerian BUMN dan seluruh BUMN Indonesia, yang telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa, melalui kerja nyata yang berdampak langsung.

Di sisi lain, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah misalnya dalam program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program lainnya, BUMN diharapkan kontribusinya untuk turut berperan dalam program dimaksud melalui pemanfaatan dana CSR/PKBL perusahaan khususnya untuk program-program yang tidak didanai oleh APBN.

Rangkaian HUT RI



Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai bagian dari masyarakat yang terus mengantisipasi perkembangan zaman merasa perlu untuk selalu berada di tengah-tengah publik. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian BUMN dan BUMN adalah dengan kiprah nyata melalui kegiatan “BUMN Hadir Untuk Negeri”. Selama dua tahun terakhir, Kementerian BUMN menginisiasi pelaksanaan kegiatan “BUMN Hadir Untuk Negeri” dengan difasilitasi oleh seluruh perusahaan BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi akan dikoordinir oleh BUMN PIC dan BUMN Co-PIC serta didampingi oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN. PIC seluruhnya merupakan Direktur Utama BUMN yang berkerjasama dengan Dinas-Dinas terkait di provinsi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Program “BUMN Hadir untuk Negeri” dilakukan melalui rangkaian acara:

1. Pasar Murah
2. Jalan Sehat 5 Km
3. Bedah Rumah Veteran
4. Upacara Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2016
5. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada mantan narapidana
6. Pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada mantan atlet
7. Pembangunan Tempat Penitipan Anak di Pasar Tradisional
8. Pembangunan Sarana Air Bersih
9. Pembangunan MCK
10. Elektrifikasi Rumah Tangga yang belum teraliri listrik
11. Lomba untuk Masyarakat
12. Pemutaran Film untuk Masyarakat

Untuk tahun 2016, program “BUMN Hadir untuk Negeri” dalam rangkaian HUT RI ke-71 dilaksanakan oleh 104 BUMN di 34 Provinsi dengan 34 BUMN PIC serta 70 BUMN Co-PIC, dengan program sebagai berikut:

Pasar Murah

Kegiatan Pasar Murah merupakan sumbangsih langsung BUMN kepada masyarakat yang kurang mampu di provinsi penugasan. BUMN menyediakan paket sembako dengan jumlah sesuai dengan kemampuan masing-masing BUMN. Jumlah paket yang disalurkan dalam rangka HUT RI ke-71 adalah 34.900 paket, dengan nilai paket kurang lebih

sebesar Rp150ribu/paket. Masing-masing paket memuat 10 Kg beras, dua liter minyak goreng dan 2 Kg gula pasir. Masyarakat mendapat potongan harga pembelian paket sembako atau hanya dengan membayar Rp25ribu/paket. Hasil penjualan disumbangkan kepada pengelola rumah ibadah terdekat lokasi.

Jalan Sehat 5 Km

Kegiatan Jalan Sehat 5 Km secara serentak dilaksanakan di 32 provinsi (kecuali Papua dan Bali) pada hari Minggu, 14 Agustus 2016 mulai pukul 06:00 (WIB, WITA, WIT). Sebagai magnet kegiatan yang menyedot banyak orang berkumpul ini, BUMN menyediakan *doorprize* yang menarik minat peserta. Total jumlah *doorprize* mencapai ribuan (10% dari jumlah peserta Jalan Sehat 5 Km), dengan variasi mulai dari kendaraan bermotor, sepeda dengan spesifikasi khusus, hingga alat-alat rumah tangga yang banyak ditunggu oleh para peserta Jalan Sehat 5 Km.

Kemeriahan Jalan Sehat bertambah dengan ragam kuliner yang disiapkan oleh mitra-mitra binaan BUMN setempat. Bagi BUMN yang di wilayah penugasannya belum memiliki binaan, umumnya memilih pedagang dari kelompok usaha mikro maupun pedagang kaki lima yang sebelumnya telah menjalani verifikasi pembuatan produk makanan oleh BUMN PIC dan Co-PIC, agar terjaga kebersihan dan kualitas rasa dari makanan yang akan dihidangkan. Ragam kuliner itu diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Tercatat, peserta kegiatan Jalan Sehat 5 Km “BUMN Hadir untuk Negeri” di seluruh Indonesia pada tahun 2016, sebanyak 111.180 orang.

Bedah Rumah Veteran

Sejak tahun 2015, Kementerian BUMN telah menginisiasi dan mengkoordinasikan “Program Bedah Rumah Veteran” yakni kegiatan perbaikan rumah Veteran di seluruh provinsi sebagai kontribusi BUMN dalam berperan serta memberikan penghormatan dan ucapan terimakasih kepada para Veteran. Sebagai warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah serta berperan aktif dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan

RI, masih banyak veteran yang di hari tuanya mengalami kesulitan, khususnya belum memiliki tempat tinggal yang layak huni. Kegiatan Bedah Rumah Veteran merupakan bentuk kontribusi nyata bagi para veteran serta sebagai bentuk ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan.

Tujuan kegiatan Bedah Rumah Veteran adalah untuk meningkatkan rasa hormat kepada para pahlawan atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Untuk

Rangkaian HUT RI

kegiatan Bedah Rumah Veteran, BUMN PIC dan Co-PIC berkoordinasi dengan Legiun Veteran RI dan Panglima Kodam terkait dengan pemilihan rumah yang akan divedah. Bantuan bedah rumah diberikan dalam bentuk natura yang pembangunannya dapat dilakukan dalam bentuk natura dengan ZENI-TNI,

TNI teritorial atau kontraktor (apabila mengalami kesulitan dalam pembangunan rumahnya).

Dari target 1.700 rumah yang akan diperbaiki, sampai dengan akhir tahun 2016 diproyeksikan telah diselesaikan Bedah Rumah Veteran sebanyak 1.540 rumah.

Upacara Peringatan HUT RI

Upacara Peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2016 dilaksanakan di ibukota provinsi dengan lokasi di kantor BUMN yang paling memadai. Direktur Utama PIC provinsi bertindak sebagai inspektur upacara. Peserta upacara meliputi seluruh pegawai

BUMN di provinsi tersebut, mantan atlet yang menerima pembinaan, siswa yang terpilih dalam program Siswa Mengenal Nusantara (tahun 2015 & 2016) dan guru teladan pendamping program SMN dan veteran penerima bantuan Bedah Rumah.

Pelatihan Narapidana

Guna membantu mantan narapidana untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru dan menguatkan kemandirian ekonominya, maka dirasa perlu untuk melakukan pembinaan tambahan berupa ketrampilan yang dibutuhkan agar bisa diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan narapidana dilakukan untuk narapidana usia produktif yang sudah keluar lembaga pemasyarakatan mulai bulan Agustus 2016.

Jumlah mantan narapidana yang diberi pembinaan sebanyak 205 orang di seluruh Indonesia yang diusulkan oleh Kepala Lapas setempat dan diseleksi oleh BUMN PIC dan Co-PIC. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan terkait pengembangan keahlian/skill sebagai bekal untuk wirausaha (sesuai kebutuhan).





Pelatihan Mantan Atlet Nasional

Kondisi mantan atlet nasional saat ini masih kurang diperhatikan dan tidak seluruhnya memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Kegiatan pembinaan 186 mantan atlet nasional di seluruh Indonesia dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan terkait

pengembangan keahlian/skill. Mantan atlet nasional diberikan bantuan peralatan sebagai modal kerja (bila diperlukan) dan dilakukan pendampingan usaha selama 6 bulan.

Pembangunan Tempat Penitipan Anak (TPA) di Pasar Tradisional

Mengingat masih dijumpai pedagang di pasar yang membawa anaknya yang berusia balita ketika berjualan di pasar sehingga kurang mendapatkan lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang, oleh

karenanya dikoordinasikan kegiatan pembangunan TPA tersebut dengan target 1 (satu) provinsi 1 (satu) TPA. Sampai dengan akhir tahun 2016, proyeksi TPA yang telah selesai dibangun sebanyak 29 TPA.

Rangkaian HUT RI

Penyediaan Sarana Air Bersih

Memperhatikan kondisi pemenuhan kebutuhan air bersih di berbagai daerah di Indonesia yang masih kesulitan air bersih terutama pada musim kemarau, maka diperlukan kegiatan penyediaan sarana air bersih. Kegiatan penyediaan sarana air bersih di 96 lokasi di seluruh Indonesia dilakukan dengan membangun sarana prasarana untuk mendapatkan air bersih berupa pembuatan sumur atau pemberian

sarana pengaliran/penampungan/pengolahan air bersih. Bersamaan dengan penyerahan sarana air bersih, dilakukan pendidikan dan pelatihan mengenai lingkungan kepada masyarakat sekitar. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah titik air bersih yang sudah selesai dibangun sebanyak 137 lokasi.

Program Elektrifikasi

Kegiatan elektrifikasi untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat yang belum teraliri listrik di 412 lokasi di kabupaten di seluruh Indonesia (masing-masing Kabupaten sebanyak 100 rumah tangga) dilakukan dengan penyediaan jaringan

listrik dari pembangkit/gardu/tiang listrik ke rumah tangga, sehingga rumah tangga tersebut menjadi pelanggan PT PLN. Sampai dengan akhir Tahun 2016, diproyeksikan telah dilakukan elektrifikasi pada 11.388 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Penyediaan Sarana MCK

Kegiatan penyediaan sarana MCK di 412 kabupaten seluruh Indonesia (masing-masing 50 unit MCK) dilakukan dengan membangun sarana prasarana untuk mandi, cuci dan kakus termasuk sarana pengaliran/penampungan/pengolahan air

bersih). Bersamaan dengan penyerahan sarana MCK, dilakukan pendidikan/pelatihan mengenai lingkungan kepada masyarakat sekitar. Sampai dengan akhir Tahun 2016, diproyeksikan telah dibangun 4.131 pintu MCK di seluruh Indonesia.





Kegiatan Lomba yang diikuti Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2016 siang hingga sore hari setelah upacara berlangsung. Jenis lomba diserahkan kepada BUMN PIC dan Co-PIC yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jumlah lomba minimal tiga, diupayakan melibatkan banyak orang dalam satu jenis lomba agar kegiatan lomba dapat berlangsung meriah.

Untuk masing-masing lomba diberikan hadiah bagi tiga juara per kategori. Umumnya, BUMN PIC dan Co-PIC melombakan sejumlah pertandingan antara lain Lomba Balap karung, Lomba Tarik Tambang, Lomba Panjat Pinang, Lomba Bakiak, Lomba Makan Kerupuk untuk peserta umum. Sedangkan untuk anak-anak dilaksanakan Lomba Mewarnai Gambar, Lomba Memasukkan Pensil dalam Botol dan Lomba Kelereng dalam Sendok.

Pemutaran Film

Minimnya tayangan film anak-anak yang berkualitas dan berkonten pendidikan, membuat dirasa perlu untuk menyajikan tayangan film anak-anak yang berkualitas dan sarat dengan nilai-nilai edukatif kepada mereka. Atas dasar ini, setelah pelaksanaan kegiatan lomba, dilakukan pemutaran film anak-anak. Film yang diputar adalah 3 film pendek yang dinilai mampu memberikan inspirasi positif dan

nilai-nilai kebaikan universal. Di antara pemutaran tiga film tersebut, disisipkan juga film dokumenter tentang profil BUMN. Pemutaran Film berupa 3 film pendek yang diproduksi oleh National Publishing News Company (NPNC) pada tanggal 17 Agustus 2016 di 34 provinsi dengan jumlah penonton sebanyak 6.820 orang.

Siswa Mengenal Nusantara (SMN)



Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menanamkan rasa bangga sebagai bangsa Nusantara yang memiliki beragam kekayaan. Para peserta kegiatan diharapkan memiliki pemahaman nyata terhadap kekayaan alam dan bangsa serta potensi Indonesia yang luar biasa melalui pertukaran informasi dan pengalaman langsung di lapangan. Para peserta program ini

diharapkan memiliki pandangan yang baik terhadap Kementerian BUMN selaku pengelola BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia yang dalam kegiatan operasionalnya mengambil peran sebagai lokomotif untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui kiprah nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Kegiatan Siswa Mengenal Nusantara ini juga untuk menanamkan nilai-nilai kebijakan dan kebajikan kepada para pesertanya tentang arti keberagaman bangsa dan budaya Indonesia dengan segala perbedaannya yang bermuara pada utuhnya wawasan kebangsaan calon-calon pemimpin masa depan sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan mampu bersaing dalam ranah global.

Sebanyak 679 siswa (60 di antaranya penyandang disabilitas) dari provinsi asal bertolak ke provinsi tujuan PIC dan Co-PIC pada suatu daerah tujuan penugasan. Kegiatan pertukaran yang dilaksanakan pada tanggal 1-15 Agustus 2016 ini mengantarkan para siswa terpilih dari masing-masing provinsi asal

merasakan sensasi menemukan daerah baru yang umumnya berbeda dengan daerah tempat mereka berdomisili. Para siswa bebas mengeksplorasi pemikiran dan kreativitas masing-masing. Mereka berkesempatan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, wilayah-wilayah berpotensi ekonomi, kawasan yang memiliki keindahan panorama alam dengan segala potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih besar lagi, dan yang paling penting adalah mengenal BUMN. Para siswa yang tinggal di rumah-rumah penduduk lokal juga mempelajari karakter masyarakat setempat dan belajar untuk beradaptasi dengan cepat di daerah yang besar kemungkinan baru pertama kali mereka kunjungi.

BUMN Mengajar



Pasang surut gelombang perubahan dunia, menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ke depan untuk terus memajukan peradaban bangsa namun sekaligus tetap melestarikan kekayaan alam maupun keragaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa termasuk insan BUMN berkewajiban ikut menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal itu, Kementerian BUMN menginisiasi program “BUMN Mengajar” yang dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan tema “Indonesia Negeri Kebanggaanku” sebagai kontribusi BUMN dalam berperan serta “Membangun Kapasitas Nasional melalui Generasi Penerus Bangsa”. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kontribusi perwakilan-perwakilan BUMN di provinsi penugasan terhadap kecerdasan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh seluruh BUMN yang memiliki wilayah kerja di 34 provinsi di seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dalam “membangun pemahaman para pemangku kepentingan” mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan kepada generasi muda bangsa Indonesia.

Materi ajar yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain pengenalan akan BUMN, kiprah dan peran BUMN dalam pembangunan Indonesia. Selain itu juga dilakukan pengenalan terhadap profesi yang ada di dalam masing-masing BUMN, pemberian motivasi dan sumbangan berupa peralatan pendidikan yang diperlukan di sekolah tempat kegiatan BUMN Mengajar berlangsung. Sampai dengan akhir tahun 2016, BUMN Mengajar diproyeksikan dilakukan oleh 705 pimpinan kantor cabang di 34 provinsi.

Program Safari Ramadhan



Kegiatan Safari Ramadhan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 24 Juni 2016 oleh 89 BUMN dan anak perusahaan BUMN di 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang terdiri atas kegiatan pasar murah, bantuan rumah ibadah dan santunan kepada anak yatim dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pasar Murah		
	Jumlah Paket	505.930	520.222
	Wilayah Kab./Kota	514	504
	BUMN Penyelenggara	83	89
2.	Bantuan Rumah Ibadah	Rp12,6 miliar	Rp13 miliar
3.	Santunan Anak Yatim		
	Jumlah Santunan (orang)	86.398	105.772
	BUMN Penyelenggara	50	72

Pasar Murah

Jumlah paket yang dijual adalah sebanyak 520.222 dengan total nilai sebesar Rp78,03 miliar. Hasil penjualan paket sembako sebesar Rp13,0 miliar disumbangkan kepada rumah ibadah setempat di seluruh provinsi. Sumbangan berbentuk alat pendukung kegiatan peribadatan maupun sarana dan prasarana peribadatan.

Santunan kepada Anak Yatim

Pemberian santunan kepada anak yatim berupa uang tunai sebesar Rp100.000 per anak. Jumlah santunan yang diberikan adalah sebanyak 105.772 anak dengan total nilai sebesar Rp10,57 miliar.

Program Safari Ramadhan

Total dana yang digunakan dalam kegiatan Safari Ramadhan sebesar Rp88,61 miliar bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan/atau dana Bina Lingkungan (BL).

Kegiatan Safari Ramadhan yang diselenggarakan oleh BUMN berhasil mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang dianugerahkan kepada Kementerian BUMN selaku Pemrakarsa Penjualan Paket Sembako Murah di Lokasi dan Jumlah Terbanyak, dan kepada Gabungan 83 BUMN selaku “Penyelenggara Penjualan Paket

Sembako Murah di Lokasi dan Jumlah Terbanyak”, yang penyerahannya telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan “Bersahabat dengan Alam, BUMN Hadir untuk Negeri” pada tanggal 30 Juli 2016 di Wonosobo.

Kegiatan pasar murah dalam rangka safari Ramadhan dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Juni 2016 dan kegiatan dihadiri oleh Menteri BUMN, Direktur Utama seluruh BUMN dan jajaran Kementerian BUMN di Garut, Provinsi Jawa Barat.

Pembinaan Desa Tertinggal dan Terpencil



Di wilayah Indonesia masih ada desa-desa tertinggal/terpencil maupun yang berbatasan dengan negara lain. Melihat kondisi ini, perlu dilakukan pembinaan untuk meningkatkan keahlian warga desa-desa tersebut. Desa-desa tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan wilayah operasional atau proyek-proyek yang dikerjakan BUMN.

Tahun 2016 ini dipilih 71 desa binaan yang terpencil, berbatasan dan/atau rawan konflik (baik konflik antar warga maupun konflik dengan BUMN). Sampai akhir bulan tahun 2016, diproyeksikan telah dilakukan pembinaan terhadap 52 Desa Tertinggal dari target 71 desa.

Pembinaan Desa Tertinggal dan Terpencil

Brebes, Jawa Tengah

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Brebes merupakan keikutsertaan BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Brebes guna perbaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program yang dilaksanakan adalah, Kampung Bawang Merah dan Pendampingan dan Pengembangan Industri Garam.

Manfaat

- Stabilisasi harga bawang merah nasional
- Peningkatan taraf hidup petani bawang merah
- Peningkatan kompetensi petani dan kualitas produksi komoditas garam
- Dukungan permodalan dari Bank Himbara
- Dukungan ketersediaan pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company
- Dukungan ketersediaan bibit oleh PT Sang Hyang Seri
- Dukungan pembuatan gudang oleh PT Banda Ghara Reksa dan Perum BULOG
- Dukungan *off-taker* hasil panen bawang merah petani oleh Perum BULOG

Progres Pelaksanaan

- Verifikasi data petani telah dilakukan oleh PPL dan Dinas Pertanian setempat.
- Pembagian peran BUMN terkait telah ditetapkan pada meeting tanggal 29 November 2016.
- Telah dilakukan sosialisasi Kartu Tani Bawang Merah kepada petani pilot project sekaligus dilakukan pendistribusian Kartu Tani kepada 499 petani bawang merah di Desa Jagalempeni.

BUMN Pelaksana

- BULOG
- Telkom Indonesia
- Bank Mandiri
- BRI
- BNI
- Pupuk Indonesia
- Sang Hyang Seri
- Jasindo
- Perum Jamkrindo
- Garam

Merauke, Papua

Program ini merupakan keikutsertaan BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Merauke guna perbaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Peningkatan Produksi pangan, Peningkatan Produksi Perikanan.

Manfaat

- Peningkatan produksi padi melalui perluasan *on farm*, revitalisasi sawah, dan pendirian *rice mill*.
- Meningkatkan penyerapan gabah petani melalui *on farm* kemitraan dengan petani seluas 500 hektar.
- Membangun 1 RMU modern berupa *rice mill* dengan kapasitas 35 ton per jam GKG, dengan total produksi beras 175 ton/hari.
- Pengembangan Sistem pemasaran oleh Perum BULOG (kapasitas gudang beras 17.700 ton).

- Peningkatan produksi perikanan melalui penambahan kapasitas rantai dingin perikanan.

Progres Pelaksanaan

- PT Sang Hyang Seri telah membeli lahan seluas 0,5 hektar dan sudah melakukan negosiasi di depan notaris terkait pembelian lahan seluas 10 hektar yang diperlukan untuk benih sumber dan gudang.
- PT PIHC akan melakukan penanaman perdana padi seluas 50 hektar pada awal tahun 2017.
- PT Perinus sudah melakukan rekondisi terhadap KM Mina Jaya

BUMN Pelaksana

- Bulog
- Sang Hyang Seri
- Pupuk Indonesia
- Pelindo IV
- Periknus
- Perindo

Sorong, Papua

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat merupakan keikutsertaan BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan di Sorong guna perbaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program yang dilaksanakan adalah, Program Pengembangan Ekonomi, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Program Peningkatan Infrastruktur dan Pemukiman

Program Pengembangan Ekonomi

- Wirausaha industri kerajinan khas Papua
- Pengembangan wirausaha pengolahan produk lanjutan sagu
- Pengembangan wirausaha pengolahan produk kelautan dan perikanan
- Peningkatan usaha tani sayuran dan hortikultura
- Peningkatan usaha ternak besar (ruminansia)
- Pengembangan usaha pengolahan tanaman berkhasiat (biofarmaka)
- Pengembangan usaha jasa pariwisata dan usaha kuliner
- Pengembangan Rumah Kreatif BUMN
- Peningkatan usaha bengkel las dan kerajinan besi
- Peningkatan usaha ternak unggas (ayam buras petelur dan pedaging)

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Peningkatan/kualifikasi teknik pembelajaran
- Tunjangan kegiatan guru
- Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan vokasional

Krayan, Kalimantan Utara

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di kecamatan Krayan merupakan keikutsertaan BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan di Krayan guna perbaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan bisnis Garam Pegunungan, Pengembangan bisnis Beras Adan Krayan, dan Pengembangan bisnis Gula Bit.

Program Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman

- Revitalisasi pasar tradisional desa
- Bedah rumah tak layak huni
- Perbaikan jalan desa

BUMN Pelaksana

- Hotel Indonesia Natour
- Pegadaian
- BRI
- Telkom
- Perhutani
- Pertani
- Pupuk Indonesia
- Perikanan Indonesia
- Pelindo III
- Bank Mandiri
- Pelindo II
- Jasa Marga
- KAI
- Angkasa Pura I
- PGN
- Inalum
- BTN
- BNI
- Pelni
- Garuda Indonesia
- PAL Indonesia
- RNI
- Antam
- Semen Indonesia

Pengembangan bisnis Garam Pegunungan

Mendorong inisiasi PT Garam untuk bekerjasama dengan CSR Pertamina dalam melakukan pengembangan bisnis garam dengan tujuan

1. Proses pengelolaan tambang garam mulai dari produksi sampai dengan penjualan menjadi lebih modern
2. Target pasar garam Krayan dengan spesifikasi *high grade* dapat dijadikan komoditas ekspor

Pembinaan Desa Tertinggal dan Terpencil



3. Perbaikan pengelolaan tambang garam diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat perbatasan

Pengembangan bisnis Beras Adan Krayan

Akan dikembangkan pengelolaan yang lebih modern di dua sisi yaitu:

1. Pengolahan padi menjadi beras dimana BUMN pertanian akan dilibatkan dalam modernisasi proses tanam baik dari pemupukan sampai dengan proses pengolahan padi menjadi beras.
2. Pengelolaan hasil panen sampai distribusi dimana, manajemen pertanian akan didukung oleh BUMN serta pembentukan Koperasi Petani.

Pengembangan bisnis Gula Bit

- Untuk melihat lebih dalam potensi pengembangan bit gula tropis di wilayah Krayan maka diperlukan beberapa kajian dari

berbagai aspek seperti aspek agronomi maupun pabrikan. Terkait hal tersebut, akan diminta BUMN Perkebunan untuk melakukan kajian.

- Pengembangan industri gula khusus produk gula bit, termasuk pabrikasinya, akan didorong BUMN dengan kemampuan EPC seperti BUMN Karya dan Rekind dalam pengembangan proses produksi gula bit tersebut.

BUMN Pelaksana

- PT Garam
- Pertamina
- BUMN Pertanian
- BUMN Perkebunan
- BUMN Karya

Garut, Jawa Barat

Pembinaan dan keikutsertaan BUMN dalam percepatan pembangunan di Garut bertujuan mendorong Garut sebagai kabupaten penyangga di Jawa Barat, antara lain melalui program:

Meningkatkan kualitas komoditi unggulan

- Kredit bunga ringan petani dan peternak
- Bantuan pupuk dan bibit berkualitas
- Peningkatan produksi bibit domba mandiri
- Bantuan alat dan pendampingan pasca produksi
- Pelatihan dan pendampingan unit usaha

Pengembangan pariwisata

- Amazing Garut Festival
- Pengembangan destinasi wisata alam Garut
- Kualitas infrastruktur pendukung seperti revitalisasi Jalur KA Cibat-Cikajang
- Pelatihan masyarakat sadar wisata

Selain itu telah dilaksanakan program peningkatan pemenuhan fasilitas dasar masyarakat meliputi:

- Elektrifikasi 112 rumah di Kec. Cibat

- Sarana Air Bersih di 10 kecamatan
- Fasilitas MCK sejumlah 40
- Jembatan Lingkungan di Kec. Tarorong Kidul dan Kec. Karangpawitan
- Pengobatan Gratis di hunian pengungsi
- Sarana Air Islamic Center sebagai lokasi penampungan pengungsi

BUMN Pelaksana

- PTPN
- PLN
- Pegadaian
- PGN
- Bank Mandiri
- Jasa Rahardja
- BRI
- Bio Farma
- BNI
- Pertamina

Seram Barat, Maluku

Pembinaan dan keikutsertaan BUMN dalam percepatan pembangunan di Seram bertujuan mendorong Seram Bagian Barat (SBB) sebagai kabupaten penyangga di Maluku, antara lain melalui program:

Akselerasi pembangunan infrastruktur

- Implementasi instrumen *microfinance*
- Perbaikan akses jalan
- Pembangunan pembangkit listrik
- Pembangunan jalur ferry penyeberangan
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan

Peningkatan kualitas infrastruktur

- Aksesibilitas prasarana dan sarana
- Peningkatan kualitas SDM
- Aksesibilitas perbankan
- Perluasan jaringan telekomunikasi dan internet

Peningkatan komoditi unggulan

- Kredit bunga ringan petani, peternak, nelayan
- Bantuan bibit unggul
- Bantuan teknologi pengolahan tanah
- Pelatihan dan pendampingan usaha

Pengembangan destinasi wisata alam

- Pantai Hatuhuran
- Air terjun Waihetu
- Danau Tapala
- Hutan Kayu Putih
- Benteng Wantrow

BUMN Pelaksana

- PLN
- Bank Mandiri
- PNM
- Pelindo 4
- PNRI
- ASDP

Pembinaan Desa Tertinggal dan Terpencil

Wonosobo, Jawa Tengah

Pembinaan dan keikutsertaan BUMN dalam percepatan pembangunan di Wonosobo bertujuan mendorong Wonosobo sebagai kabupaten penyangga di Jawa Tengah, antara lain melalui program:

Pengembangan sektor Agribisnis

- Penyediaan bibit berkualitas dan pupuk
- Prasarana dan sarana pasca panen
- Pengendalian *stock* dan harga
- Perluasan akses pasar dan promosi bersama
- Pendampingan dan penyuluhan

Pengembangan sektor pariwisata

- Pengembangan destinasi dan even wisata
- Peningkatan akses dan infrastruktur
- Pemberdayaan dan pelestarian lingkungan
- Pemasaran dan manajemen

Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam

Pembinaan dan keikutsertaan BUMN dalam percepatan pembangunan di Banda Aceh bertujuan mendorong Banda Aceh sebagai kota penyangga di Nangroe Aceh Darussalam, antara lain melalui program:

Meningkatkan kualitas komoditi unggulan

- Kredit bunga ringan petani dan peternak
- Bantuan pupuk dan bibit berkualitas
- Bantuan alat dan pendampingan pasca produksi
- Pelatihan dan pendampingan unit usaha

Pelatihan dan pendampingan unit usaha difokuskan pada

- Usaha tani dan holtikultura
- Usaha ternak besar
- Jasa pariwisata dan usaha kuliner
- Pengembangan Rumah Kreatif BUMN

BUMN Pelaksana

- Bank Mandiri
- BRI
- Perum Perhutani
- Perum Perikanan Indonesia
- BNI
- Hotel Indonesia Natour
- Pelni
- Garuda Indonesia
- Pelindo III
- PAL Indonesia
- Pelindo II
- Jasa Marga

Indramayu, Jawa Barat

Pembinaan dan keikutsertaan BUMN dalam percepatan pembangunan di Indramayu bertujuan mendorong Indramayu sebagai kabupaten penyangga di Jawa Barat, antara lain melalui 3 program dengan target sebagai berikut:

Peintegrasian Kartu Tani

	2016	2019
Luas lahan	9.000 ha	90.000 ha
Jumlah petani	7.000 orang	180.000 orang
Pemasaran	8 kecamatan	31 kecamatan

Pengembangan Rice Center

	2016	2019
Luas lahan	800 ha	2.000 ha
Jumlah petani	800 orang	20.000 orang
Kapasitas mesin	8.000 ton GKP/tahun	27.500 ton GKP/tahun
Pemasaran	8 kecamatan	31 kecamatan
Off-taker	62 ribu ton/tahun	350 ribu ton/tahun

Budidaya Beras Organik

	2016	2019
Luas lahan	70 ha	200 ha
Jumlah petani	100 orang	1.500 orang
Produksi	360 ton	1.000 ton
Pemasaran	8 kecamatan	31 kecamatan

BUMN Pelaksana

- Pertani
- BRI
- Pupuk Indonesia
- Sang Hyang Seri
- Jasindo
- PNM
- Bulog
- Telkom

Tinjauan Penunjang Kinerja





BUMN Executive Leadership Program (ELP)



Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar pembangunan di Indonesia, menempatkan perusahaan milik negara dalam posisi yang sangat strategis. BUMN mendapat peran sebagai Agen Pembangunan dan Penciptaan Nilai untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tantangan yang dihadapi BUMN Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang hingga tahun 2019 adalah:

1. Menjaga kesinambungan dan memenangkan BUMN dalam era turbulensi bisnis dan persaingan pasar global, setelah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Membangun Sinergi menuju BUMN Super Holding.
3. Memperkuat karakter Pemimpin BUMN untuk memimpin Holding Company di era global

Dalam roadmap 2015-2019, Kementerian BUMN menetapkan 11 Rencana Strategis yang akan dilakukan, yaitu:

1. Agent of Development yang besar, kuat & lincah
2. Kepuasan Pengguna layanan Kementerian BUMN
3. Kepatuhan terhadap Kebijakan Kementerian BUMN
4. Perencanaan & Rumusan kebijakan yang berkualitas & aplikatif

5. Pembinaan BUMN yang optimal
6. Pengendalian & Pengawasan secara efektif
7. SDM yang kompeten & Profesional
8. Organisasi Pengelola Korporasi yang modern
9. Tata Kelola Organisasi yang baik dan bersih
10. Tersedianya informasi yang valid, andal & mudah akses
11. Pelaksanaan Anggaran optimal

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian BUMN diperlukan adanya Sustainable Talent Development Program. Hal itu penting dalam rangka untuk mendorong, membekali, serta menyiapkan kader-kader sumber daya manusia (SDM) unggulan untuk BUMN.

Untuk mempersiapkan dan memperkuat pemimpin BUMN dalam menciptakan bisnis-bisnis baru dan peningkatan nilai perusahaan dengan nilai-nilai: integritas, komitmen nasional yang kuat dan pola pikir global, Kementerian BUMN menyelenggarakan BUMN Executive Leadership Program.

BUMN Executive Leadership didesain untuk memperkuat dimensi personal quality guna mencapai 3 tujuan BUMN ELP: efektifitas kepemimpinan, mengembangkan sinergi dan meningkatkan daya saing dalam kaitannya dengan transformasi BUMN Holding Company berdasarkan Nilai-Nilai BUMN. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bekerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Rencananya, kegiatan BUMN Executive Leadership Program ini akan diselenggarakan pada akhir Januari 2017, dan diikuti oleh seluruh jajaran Direksi BUMN dan eks-BUMN, dengan pembicara dan fasilitator yang terdiri dari pimpinan nasional, para menteri terkait, para Deputy/Eselon I Kementerian BUMN, para akademisi dan konsultan yang ahli di bidangnya.

Misi dan Tujuan BUMN Executive Leadership Program

Misi

Misi BUMN Executive Leadership Program adalah: "Mengaktifkan Pemimpin BUMN Indonesia untuk menciptakan bisnis-bisnis baru dan meningkatkan nilai Perusahaan dengan Integritas, Komitmen nasional yang kuat & pola pikir global"

Tujuan

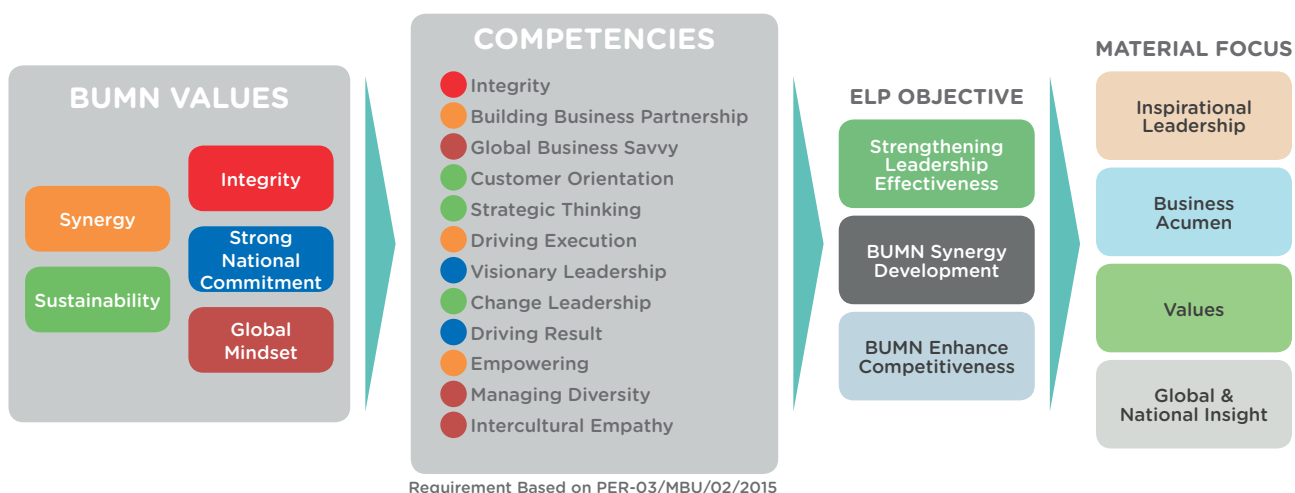
Tujuan diselenggarakannya BUMN Executive Leadership Program, adalah:

1. Memperkuat efektivitas kepemimpinan untuk menyelaraskan strategi perusahaan dengan kepentingan Nasional berdasarkan mandat Roadmap BUMN 2016-2019.
2. Mengembangkan sinergi BUMN Indonesia melalui Transformasi menuju BUMN Holding Company.
3. Meningkatkan daya saing BUMN untuk membangun "BUMN Super Holding" berdasarkan "Nilai-nilai dan Budaya BUMN Indonesia."

BUMN Executive Leadership Program (ELP)

Kerangka Hasil ELP

ELP didesain untuk memperkuat dimensi *personal quality* guna mencapai tiga tujuan BUMN ELP (efektivitas kepemimpinan, mengembangkan sinergi, dan meningkatkan daya saing dalam kaitannya dengan transformasi BUMN Holding Company) berdasarkan Nilai-Nilai BUMN.



Realisasi Tahun 2016

Untuk menyukseskan BUMN Executive Leadership Program, Kementerian BUMN melalui Deputi Infrastruktur Bisnis telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan Menteri BUMN tentang Kurikulum Pengembangan Calon Direksi dan Direksi BUMN
2. Menyusun rekomendasi kebijakan Menteri BUMN tentang Program Pelaksanaan Pengembangan Calon Direksi dan Direksi BUMN

Teknis Pelaksanaan dan Silabus ELP

Pelaksanaan BUMN Executive Leadership Program akan dibagi dalam 3 *batch* dengan masing-masing peserta berjumlah kurang lebih 200 orang. *Batch* 1 akan diikuti oleh seluruh Direktur Utama ditambah Direktur lain selain Direktur Keuangan dan Direktur SDM. Setiap *batch* dilaksanakan selama 3 hari, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Hari Pertama
 - Kegiatan hari pertama meliputi pembahasan *role model* dan *value* serta *business acumen* termasuk penguatan *National* dan *Global Insight*.
- Hari Kedua
 - Diawali dengan *sport activity* pembahasan hari kedua meliputi BUMN Values to Boost Performance dan Focus Group Discussion (*Appreciative Inquiry*).
- Hari Ketiga
 - Diawali dengan *sport activity*, pembahasan hari ketiga meliputi penyusunan/penandatanganan komitmen bersama hasil Focus Group Discussion pada hari kedua, dilanjutkan dengan kegiatan *Spiritual Leadership* dan kegiatan *Balancing Work & Life*.

Kesekretariatan



Salah satu tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi Kesekretariatan di Kementerian BUMN adalah terkait dengan penganggaran. Termasuk di dalamnya, antara lain norma pemanfaatan dan penyerapan anggaran.

Terkait dengan penyerapan anggaran, target yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN pada tahun 2016 adalah 90% dari pagu awal sebesar Rp345 miliar.

Sepanjang tahun 2016, pagu anggaran tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian. Pagu terakhir setelah pemotongan anggaran (*self blocking*) sebesar Rp190,8 miliar.

Berdasarkan pagu terakhir tersebut, maka realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 mencapai 92%. Pencapaian penyerapan tersebut tentu saja sudah di atas target yang telah ditetapkan Kementerian BUMN.

Kesekretariatan

Rincian Penyerapan Anggaran Masing-Masing Unit Kerja Eselon I Kementerian BUMN

(Rp juta)

No	Uraian	Pagu	Self	Pagu	Realisasi Anggaran Berdasarkan					
			Blocking	APBN-P	SP2D		SPM		SPP	
					Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3
	Kementerian BUMN	249.92	59.123	190.8	163.94	85,9%	174.17	91,3%	175.75	92,1%
1	Program Dukungan Manajemen	135.430	20.128	115.3	102.340	88,8%	105.11	91,2%	105.92	91,9%
A	Sekretaris Kementerian BUMN	135.430	20.128	115.3	102.340	88,8%	105.11	91,2%	105.92	91,9%
	Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi	63.462	2.598	60.865	54.135	88,9%	55.790	91,7%	56.059	92,1%
	Biro Hukum	4.240	211	4.029	3.214	79,8%	3.220	79,9%	3.615	89,7%
	Biro Umum dan Humas	64.150	17.057	47.093	42.073	89,3%	43.207	91,7%	43.272	91,9%
	Inspektorat	2.114	102	2.012	1.736	86,3%	1.758	87,4%	1.795	89,2%
	Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri	1.464	160	1.305	1.182	90,6%	1.139	87,3%	1.182	90,6%
2	Program Pembinaan BUMN	114.49	38.996	75.497	61.599	81,6%	69.058	91,5%	69.827	92,5%
B	Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi	2.955	201	2.754	2.541	92,3%	2.566	93,2%	2.680	97,3%
	Asdep BU Agro dan Farmasi I	1.500	135	1.365	1.282	94,0%	1.308	95,8%	1.329	97,4%
	Asdep BU Agro dan Farmasi II	1.455	65	1.389	1.259	90,6%	1.259	90,6%	1.351	97,3%
C	Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	7.521	4.000	3.521	3.196	90,8%	3.205	91,0%	3.322	94,3%
	Asdep BU Energi, Logistik, kawasan dan Pariwisata I	3.671	1.603	2.068	1.863	90,1%	1.863	90,1%	1.916	92,6%
	Asdep BU Energi, Logistik dan Pariwisata II	3.528	2.367	1.161	1.041	89,7%	1.050	90,4%	1.114	95,9%
	Asdep BU Energi, Logistik, kawasan dan Pariwisata III	322	30	292	292	100,0%	292	100,0%	292	100,0%
D	Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media	9.378	1.880	7.498	7.104	94,7%	3.558	95,4%	3.581	96,0%
	Asdep BU Pertambangan, Industri Strategis dan Media I	3.978	247	3.731	3.551	95,2%	3.554	95,3%	3.554	94,3%
	Asdep BU Pertambangan, Industri Strategis dan Media II	5.400	1.633	3.767	3.554	94,3%	3.554	94,3%	3.554	94,3%
E	Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan	8.516	4.488	4.027	3.606	89,5%	3.606	89,5%	3.710	92,1%
	Asdep BU Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I	2.916	1.739	1.177	1.012	86,0%	1.012	86,0%	1.107	94,0%

(Rp juta)

No	Uraian	Pagu	Self	Pagu	Realisasi Anggaran Berdasarkan					
			Blocking	APBN-P	SP2D		SPM		SPP	
					Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
	Asdep BU Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II	3.126	1.627	1.500	1.449	96,6%	1.449	96,6%	1.449	96,6%
	Asdep BU Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III	2.473	1.122	1.351	1.145	84,8%	1.145	84,8%	1.154	85,5%
F	Deputi Bidang Usaha jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan	8.557	5.560	2.996	2.685	89,6%	2.685	89,6%	2.687	89,7%
	Asdep BU Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan I	2.454	1.030	1.424	1.246	87,5%	1.246	87,5%	1.246	87,5%
	Asdep BU Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II	6.103	4.531	1.572	1.439	91,5%	1.439	91,5%	1.442	91,7%
G	Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	37.132	18.117	19.016	17.366	91,3%	17.652	92,8%	17.179	93,2%
	Asdep Restrukturisasi dan PPKNM	18.185	3.200	14.985	13.930	93,0%	14.035	93,7%	14.047	93,7%
	Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN	18.948	14.917	4.031	3.4335	85,2%	3.617	89,7%	3.672	91,1%
H	Deputi Infrastruktur Bisnis	40.434	4.750	35.684	25.101	70,3%	32.232	90,3%	32.575	91,3%
	Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN	4.047	98	3.949	3.614	91,5%	3.630	91,9%	3.636	92,1%
	Asdep Data dan Teknologi Informasi	30.325	3.292	27.033	17.109	63,3%	24.199	89,5%	24.431	90,4%
	Asdep Layanan Hukum	2.772	744	2.028	1.876	92,5%	1.902	93,8%	1.928	95,1%
	Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	3.290	617	2.673	2.501	93,6%	2.501	93,6%	2.580	96,5%
Jumlah		249.92	59.123	190.8	163.94	85,9%	174.17	91,3%	175.75	92,1%

Selain penyerapan yang melebihi target, pada tahun 2016 Laporan Keuangan Kementerian BUMN juga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak ada temuan yang terkait dengan potensi terjadinya kerugian Negara.

Hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri dan sangat membanggakan. Sebab, Kementerian BUMN berhasil mempertahankan predikat WTP sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Opini Wajar Tanpa pengecualian merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Teknologi Informasi



Digitalisasi Proses

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa berupaya meningkatkan proses bisnisnya agar semakin efisien dan efektif, terutama untuk mendukung sinergi di lingkungan perusahaan milik negara atau BUMN. Karena itulah, Kementerian bergerak cepat dengan melakukan perubahan proses bisnis yang sedianya dilakukan secara manual menjadi digital.

Reformasi tersebut dilandasi dengan semangat untuk bertransformasi sehingga kegiatan operasional bisa dilakukan dengan lebih cepat, akuntabel dan transparan. Sejumlah inovasi yang telah dijalankan antara lain;

E-Office

E-Office merupakan wujud digitalisasi proses surat-menyurat, baik di lingkungan internal Kementerian BUMN maupun sebagai media komunikasi eksternal dengan seluruh BUMN. Sistem e-Office ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, efisiensi, dan layanan stakeholder di era digitalisasi guna mendukung sinergi di lingkungan BUMN. Dalam pembangunan sistem ini, Kementerian BUMN dibantu oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak yang telah mengimplementasikan sistem tersebut.

Sistem e-Office ini diluncurkan pada Leadership Forum BUMN 2016 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 27 Oktober 2016. Berbagai keuntungan diperoleh dengan menggunakan sistem e-Office ini. Di antaranya *paperless*, *real time* serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, karena akses yang digunakan dapat berupa Personal Computer (PC) maupun perangkat komunikasi mobile.

Mengingat proses dilakukan secara elektronik, maka seluruh kegiatan dapat dipantau dan ditelusuri secara runut untuk mendukung prinsip akuntabilitas

dan transparansi. Selain itu, seluruh informasi yang terkandung di dalam surat akan aman dari pihak yang tidak terkait karena hanya bisa diakses oleh pengirim dan penerima yang dituju.

Sistem e-Office yang direncanakan berjalan mulai 2 Januari 2017 ini terdiri dari sejumlah modul, antara lain: Surat Masuk, Disposisi, Surat Keluar dan Fungsi Tambahan. Modul Surat Masuk meliputi fasilitas *scan* dan *upload* Surat Masuk eksternal, cetak resi untuk penerimaan dokumen eksternal, serta *monitoring* dan *tracking* dokumen.

Sementara fitur Disposisi meliputi fasilitas disposisi baik surat internal maupun eksternal. Sedangkan Surat Keluar meliputi fasilitas Nota Dinas untuk komunikasi internal, Surat Dinas untuk komunikasi eksternal, Surat Bersama, Memorandum, Surat Undangan dan Surat Undangan Komite.

Untuk modul Fungsi Tambahan berguna mengakomodasi fungsi-fungsi lain. Sebagai contoh, fasilitas untuk Sekretaris (*monitoring* dan *print*) serta Delegasi yang digunakan untuk pendelegasian kewenangan surat-menyurat jika pejabat terkait berhalangan karena sakit atau cuti.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada tanggal 25 November 2016 di Yogyakarta. Inovasi ini merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Peluncuran *website* JDIH ini merupakan bagian dari keinginan mewujudkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penyediaan akses informasi hukum merupakan tugas dari pemerintah pusat dan daerah. Karena itulah, *website* JDIH Kementerian BUMN hadir untuk menyediakan akses informasi hukum bagi semua warga negara yang kini merupakan sebuah

kebutuhan sebagai dampak dalam mewujudkan supremasi hukum.

Kementerian BUMN berharap kehadiran *website* ini dapat meningkatkan dan menyempurnakan program pengelolaan dan distribusi/sosialisasi/penyediaan data hukum dan peraturan perundang-undangan Kementerian BUMN yang *up to date*, akurat, mudah, dan terintegrasi. *Website* tersebut dapat dibuka di alamat: <http://jdi.h.bumn.go.id/>

Program tersebut diharapkan dapat mendukung seluruh para pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan regulasi BUMN dalam mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang terpercaya. Keterbukaan informasi yang antara lain memuat proses pengambilan keputusan BUMN, baik di tingkat operasional maupun pembinaan, pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kinerja BUMN.

Teknologi Informasi

Dalam mengembangkan *website* ini, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sejak bulan

Februari 2016. Website JDIH Kementerian BUMN juga akan terintegrasi dengan JDIHN sebagai bagian dari upaya penyediaan data peraturan perundang-undangan nasional yang terpadu.

Peta Digital

Aplikasi Peta Digital merupakan pusat data penyebaran aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dibangun sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan pemantauan aset BUMN yang lebih efektif. Aset yang dipetakan dalam aplikasi ini berupa aset tanah maupun bangunan. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan terjadi integrasi data aset, sehingga mampu memberikan gambaran persebaran aset daerah di seluruh wilayah dengan cepat dan menarik.

Pembangunan Peta Digital yang dilakukan oleh Kementerian BUMN digunakan untuk kepentingan monitoring, registrasi aset, pemetaan lokasi dan penampilan informasi terhadap sektor-sektor yang berada di bawah Kementerian BUMN. Pembangunan Peta Digital ini juga terintegrasi dengan fungsi portal

aset internal Kementrian BUMN yang menggunakan *platform* pemetaan Google Maps API Premiere sebagai integrator utama.

Adapun manfaat yang diberikan dari aplikasi ini adalah:

- Tersedianya data persebaran aset BUMN dalam bentuk peta digital dan interaktif.
- Tersedianya data base yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan aset dalam bentuk peta digital.
- Tersedianya rincian data (berupa gambar, video, dan sebagainya) dari setiap aset BUMN, baik data mutasi maupun data kondisi aset.
- Tersedianya data aset pada setiap SKPD berupa gedung/bangunan dalam bentuk peta digital.
- Tersedianya data aset berupa tanah milik BUMN dalam bentuk peta digital.

Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha



Mewujudkan BUMN sebagai *Agent of Development*

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kehadiran BUMN antara lain ditujukan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kendati demikian, sebagai entitas bisnis BUMN juga dituntut memperoleh keuntungan dari aktivitas usahanya.

Dalam perjalanannya, persaingan bisnis serta pengaruh kondisi eksternal BUMN sangat mempengaruhi kinerja usaha. Dengan demikian, upaya BUMN untuk terus berbenah dalam rangka merespons situasi yang terus berkembang menjadi sangat diperlukan.

Selain itu, pemerintah sebagai pemilik BUMN juga memiliki mimpi atau harapan besar untuk mewujudkan BUMN sebagai sebuah entitas bisnis yang besar, kuat dan lincah. Dengan demikian, mampu memberikan kontribusi besar bagi kemaslahatan negara dan rakyat.

Karena itulah, peran Kementerian BUMN dengan tugasnya sebagai penyelenggara urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sangat penting. Untuk mewujudkannya, antara lain yang dilakukan adalah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Holding BUMN dan Penyehatan BUMN.

Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Holding BUMN

Kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini bisnisnya terpisah-pisah membuat struktur permodalan BUMN menjadi tidak kompetitif. Akibatnya, kegiatan pembangunan BUMN sangat bergantung dari suntikan modal dari pemerintah melalui APBN. Oleh karena itu, pembentukan Holding BUMN sangatlah penting. Hal tersebut juga sesuai dengan visi BUMN sebagai Agent of Development. Sebab, dengan pembentukan holding (induk usaha) maka BUMN dapat bersaing secara lebih kompetitif dalam menghadapi pasar global. Selain itu, pembentukan *holding* juga akan meningkatkan nilai perusahaan dalam memperkuat struktur permodalan, peningkatan aset, serta efisiensi usaha.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kementerian BUMN sudah melakukan kajian komprehensif yang meliputi kajian hukum, kajian keuangan, kajian keekonomian, kajian teknis, dan kajian mengenai pengaruh *holding* terhadap pencapaian tujuan didirikannya BUMN.

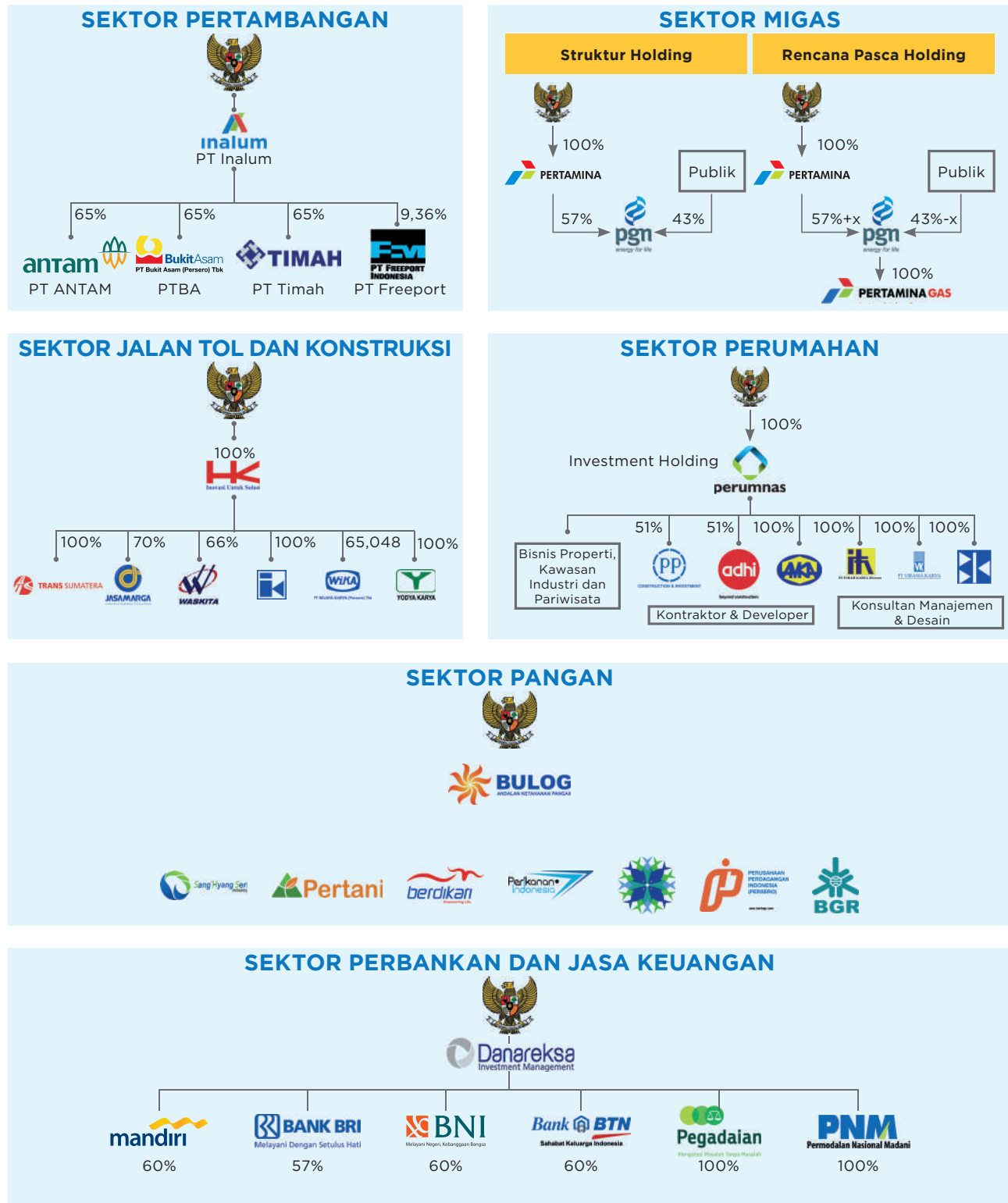
Sesuai dengan Roadmap 2015-2019, Kementerian BUMN berencana membentuk 15 Holding BUMN hingga tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk BUMN yang besar, lincah, dan kuat. Pembentukan *holding* tersebut merepresentasikan 15 sektor bisnis yang dikelola oleh BUMN. Pada tahun 2016 direncanakan akan dibentuk 6 Holding BUMN.

Pertama adalah Holding BUMN jasa keuangan, dengan PT Danareksa (persero) sebagai induk usaha. Holding ini akan membawahkan empat bank BUMN, PT Pegadaian, PT Nasional Madani (PNM), serta perusahaan *switching* dan perusahaan pengelola aset yang nantinya akan dibentuk untuk mengelola operasional teknologi informasi (TI) serta mengelola aset bermasalah bank-bank BUMN.

Kedua adalah Holding BUMN Pertambangan dengan induk perusahaan PT Inalum. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk. Ketiga, holding BUMN Energi dengan induk perusahaan PT Pertamina, dengan anak usaha PT PGN dan PT Pertagas. Keempat, Holding BUMN Perumahan dengan induk perusahaan PT Perumnas serta anak perusahaan, antara lain PT Pembangunan Perumahan dan PT Adhi Karya.

Kelima, Holding BUMN Infrastruktur, terutama jalan tol dengan induk usaha adalah PT Hutama Karya. Keenam adalah Holding BUMN Pangan dengan induk perusahaan Perum Bulog, dengan anak perusahaan antara lain PT Sang Hyang Sri dan Pertani.

Struktur 6 Holding BUMN Tahun 2016



Struktur Holding di atas masih merupakan kajian awal.

Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Pembentukan Holding BUMN ini dipercaya akan mendatangkan banyak keuntungan. Secara umum, keuntungan dilakukannya konsolidasi BUMN dalam bentuk *holding* dapat dilihat dari 3 aspek penting sebagai berikut:

1. Aspek Keuangan

- Memperbaiki struktur permodalan. Neraca *holding* mengkonsolidasikan Aset, Hutang dan Modal keseluruhan yang lebih besar dan kapasitas *leverage* yang lebih meningkat lagi.
- Menurunkan *cost of capital* karena kredit rating secara umum menjadi lebih baik.
- Menciptakan kemandirian keuangan untuk pendanaan yang cukup tanpa bergantung kepada APBN

2. Aspek Operasional

- Penyelarasan model bisnis untuk lebih berdaya saing di tingkat regional dan global. *Holding sectoral* memungkinkan integrasi mata rantai Usaha dari hulu ke hilir yg terputus-putus sebelum ada *holding*.
- Mencegah duplikasi, meningkatkan efisiensi operasional BUMN
- Menciptakan sinergi baik secara internal maupun lintas sectoral, baik secara lintas BUMN maupun BUMN-Swasta.

3. Aspek Strategis Pengelolaan Portofolio Sektor

- Konsolidasi menciptakan skala keekonomian yang memungkinkan implementasi proyek-proyek seperti infrastruktur.
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat secara *integrated* dan sejalan dengan rencana strategis dan kebijakan BUMN ke depan.

- Sektoral akan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya (modal, teknologi, dan manusia) untuk Pengembangan BUMN yang merupakan kompetensi inti masing-masing sektor.

Namun, hingga akhir tahun 2016 rencana pembentukan Holding BUMN belum memberikan progres yang berarti. Dari 6 *holding* yang ditargetkan rampung pada 2016, tak ada satu pun yang terealisasi. Hal tersebut ditengarai karena masih banyak hal yang menghambat kelancaran program *holding* BUMN. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- Regulasi Pendukung
Belum ditetapkannya Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas yang akan dijadikan payung hukum pembentukan Holding BUMN.
- Persepsi dan Dukungan Key Stakeholder
 - DPR khususnya Komisi VI masih menganggap bahwa Holding BUMN masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal ini akan diselesaikan dalam tahun 2017.
 - Sekneg masih mempermasalahkan Holding BUMN dikaitkan dengan adanya Panja Aset di Komisi VI DPR-RI.

Oleh karena itu, sebagai organ pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap BUMN, Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi secara intens dengan instansi-instansi terkait agar program pembentukan Holding BUMN ini dapat segera terlaksana.

Penyehatan BUMN

BUMN merupakan salah satu penunjang perekonomian Indonesia masih dirasakan penting. Disamping sebagai sumber pendapatan negara dalam bentuk laba yang dihasilkan, keberadaan BUMN sangat diperlukan dalam merintis sektor-sektor penting yang masih belum dapat menarik minat swasta. Oleh karena itu, BUMN dituntut untuk menyehatkan usahanya terutama dalam hal perolehan laba.

Namun pada kenyataannya, banyak BUMN yang kondisinya masih memprihatinkan. Bahkan bisa dibilang mati suri karena sudah tak beroperasi lagi. Hal tersebut tentu saja tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki BUMN yang kondisinya kurang sehat.

Pada tahun 2016, setidaknya terdapat 4 BUMN restrukturisasi yang direncanakan untuk diprivatisasi yang termuat dalam Program Tahunan Privatisasi (PTP), yaitu:

- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- PT Kertas Leces (Persero)
- PT Industri Gelas (Persero)
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Berbagai upaya restrukturisasi untuk menyelamatkan keempat BUMN tersebut telah dilakukan, termasuk melalui restrukturisasi dan/atau revitalisasi oleh PT PPA, namun belum membuahkan hasil. Hal tersebut terutama karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, baik keuangan maupun operasional. Permasalahan operasional pada umumnya karena kondisi alat operasinya yang sudah tua sehingga diperlukan investasi yang cukup besar, tidak adanya jaminan kontinuitas

bahan baku, dan pasar yang sangat terbatas. Dari aspek keuangan terutama karena beban hutang yang sangat besar dan ekuitas negatif, sehingga perusahaan tidak memiliki akses pendanaan dari perbankan (tidak *bankable*).

Memperhatikan kondisi keuangan, operasional dan upaya-upaya restrukturisasi yang telah dilakukan, maka penanganan keempat BUMN dimaksud, saat ini difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan karyawan dalam rangka *stop bleeding*. Selanjutnya akan dilakukan privatisasi dengan metode penjualan saham langsung kepada investor strategis yang berminat dengan menjual seluruh saham milik Negara pada masing-masing BUMN dan/atau dengan menerbitkan dan menjual saham baru, sehingga nantinya kepemilikan saham pada masing-masing BUMN tersebut seluruhnya atau sebagian besar (mayoritas) oleh investor strategis.

Penugasan Khusus

Dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas Pemerintah, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur serta dalam rangka menindaklanjuti PMN tunai sesuai APBN 2016, direncanakan terdapat 4 (empat) BUMN Tbk yang akan menerbitkan saham baru (*rights issue*) di luar Program Tahunan Privatisasi (PTP) Tahun 2016.

Keempat BUMN Terbuka yang akan melaksanakan *rights issue* di luar PTP tahun 2016 tersebut merupakan tindak lanjut diberikannya PMN dalam APBN-P tahun 2016 kepada BUMN Tbk dimaksud yaitu:

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Rencana tersebut, dilakukan melalui penerbitan saham baru (*rights issue*) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui program privatisasi sebagaimana diatur dalam UU BUMN, sehingga kepemilikan Pemerintah pada 4 BUMN Tbk tersebut tidak berubah dan tidak akan terdilusi.

Program Prioritas 2017





Program Prioritas 2017



Program yang disusun oleh Kementerian BUMN melalui Kedeputan senantiasa mengacu pada Roadmap BUMN yang telah disusun, sebagai sebuah mimpi di masa mendatang. Pemerintah telah memiliki cita-cita luhur seperti tertuang dalam Nawacita, pedoman awal penyusunan *roadmap*, yang harus direspons dengan baik oleh Kementerian BUMN melalui arah pengembangan perusahaan milik negara.

Kementerian BUMN berharap agar ke depan, BUMN menjadi agen pembangunan untuk ikut merealisasikan program strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena itulah, sejumlah program strategis tahun 2017 telah disiapkan. Beberapa di antaranya adalah:

Kemandirian BUMN

Sejalan dengan upaya pemerintah mendorong kemandirian BUMN, terutama dari sisi pendanaan, maka pada tahun 2017 sejumlah BUMN akan melakukan penawaran saham perdana ke publik (*Initial Public Offering/IPO*) atau penerbitan saham baru bagi BUMN yang sudah *go public (right issue)*. Daftar Anak Perusahaan BUMN yang akan melaksanakan IPO dan *Rights Issue* Tahun 2017:

1.	PT Krakatau Daya Listrik
2.	PT KHI Pipe Industries
3.	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
4.	PT Tugu Pratama Indonesia
5.	PT Patrajasa
6.	PT PLN Batam
7.	PT Belawan International Container Terminal
8.	PT PN IV
9.	PT GMF AeroAsia
10.	PT Semen Padang
11.	PT Semen Tonasa
12.	PT Adhi Persada Property
13.	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
14.	PT Utama Karya Realtindo
15.	PT Indonesia Kendaraan Terminal
16.	PT Jasa Armada Indonesia
17.	PT Pelabuhan Tanjung Priok
18.	PT Pembangunan Perumahan Energi
19.	PT Pembangunan Perumahan Peralatan
20.	PT Pembangunan Perumahan Pracetak
21.	PT Waskita Beton Precast (telah selesai)
22.	PT Wijaya Karya Gedung
23.	PT Wijaya Karya Realty
24.	PT Elnusa, Tbk
25.	PT BRI Agro Niaga, Tbk

KARTU TANI

Progres Kartu Tani Bawang Merah luasan lahan tahun 2017 ditargetkan sekitar 88.187 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan yang ditanami bawang merah, terutama yang terluas di Kecamatan Wanasari dan Kecamatan Larangan. Hingga saat ini, jumlah petani secara total tidak terdata secara pasti mengingat petani bawang merah tidak selamanya menanam bawang merah, tetapi juga komoditas lain (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan iklim/kondisi cuaca.

REVITALISASI PABRIK GULA

Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pabrik gula BUMN. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan rendemen dan meminimalisasi kehilangan dari tebu yang digiling akibat pengolahan. Revitalisasi dilakukan melalui perampingan jumlah pabrik gula dari 46 menjadi 32 dengan kapasitas pabrik gula beroperasi 151.225 TCD (utilisasi pabrik 95% dari kapasitas terpasang).

PENGGAJABUNGAN BANK SYARIAH

Melalui penggabungan bank syariah anak usaha BUMN pada tahun 2017, diharapkan mampu meningkatkan *market share* dari 2,5% menjadi 15% pada tahun 2019. Merger menjadi penting untuk memperkuat daya saing bank syariah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor keuangan pada 2020.

HOLDING

BUMN

ASURANSI

Terbentuknya Holding BUMN Asuransi Kerugian/Umum pada tahun 2017, akan meningkatkan *market share* dari 17% menjadi 40%. Konsolidasi ini penting agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, karena selama ini masing-masing menggarap segmen yang sama korporasi dan ritel. Melalui penggabungan, akan ada pembagian tugas yang jelas sehingga mampu menghadapi persaingan saat tiba masanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor keuangan direalisasikan.

Program Prioritas 2017

HOLDING BUMN PANGAN

Rencana dengan tingkat urgensi dan prioritas tertinggi adalah melanjutkan proses pembentukan Holding BUMN Pangan, yang dipimpin oleh BULOG. Program ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan ketahanan pangan. Kehadiran *holding* ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan, kualitas pangan, ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga.

HOLDING BUMN FARMASI

Dalam rangka penguatan BUMN Farmasi untuk mengurangi ketergantungan Bahan Baku Obat Impor, maka pada tahun 2017 setelah Pembentukan Holding BUMN di 6 sektor terwujud, akan dilanjutkan dengan Pembentukan Holding Farmasi. Enam sektor dimaksud adalah yaitu: Pertambangan, Migas, Jasa Keuangan, Jalan Tol, Perumahan, dan Konstruksi dan Rekayasa.

SOSIALISASI PERATURAN BARU

Kementerian BUMN akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan terbatas kepada para pemangku kepentingan. Peraturan ini mulai diundangkan pada 30 Desember 2016.

PENYUSUNAN ROADMAP ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN

Penyusunan struktur organisasi Kementerian BUMN diperlukan guna mendukung implementasi *Roadmap* BUMN 2016-2019.

TRANSFORMASI BUMN MARITIM INDONESIA

Pada tahun 2017, Kementerian BUMN juga akan melakukan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor maritim. Konsolidasi BUMN Maritim sebagai agen pengembangan dapat menghasilkan sinergi antara pelabuhan, pelayaran, perusahaan logistik dan kawasan industri sehingga dapat mewujudkan tujuan transformasi dan mengembangkan pelayanan end-to-end.

Transformasi tersebut dilakukan dengan kerangka umum:

1. Membangun “intermodal information platform” sehingga dapat memantau arus logistik antar BUMN Maritim.
2. Mengembangkan jaringan Pendidikan Logistik dan Maritim Indonesia (PMLI) untuk mendidik dan meningkatkan kualitas keahlian dan jumlah sumber daya sekaligus membangun pusat layanan bersama bagi keseluruhan BUMN Maritim.
3. Memiliki organisasi *holding* yang efisien yang mampu mendorong penciptaan nilai melalui *operation excellence*, pengelolaan sumber daya yang terintegrasi, administrasi dan pengelolaan yang handal, daya beli yang besar dan kemampuan investasi yang memadai.

Pelabuhan & Pelayaran

BUMN Pelabuhan akan diarahkan untuk menjadi simpul utama dalam mendorong konektivitas antarmoda transportasi. Revitalisasi menyeluruh di sisi pelabuhan dalam rangka peningkatan dan standarisasi kualitas pelayanan, khususnya untuk peti kemas, pada gilirannya akan mendorong efisiensi pengoperasian armada, baik oleh angkutan laut milik BUMN maupun swasta, sebagai jaringan inti angkutan barang di Indonesia.

Perbaikan *inland accessibility* akan memperlancar arus barang dari dan ke sentra-sentra industri. Dengan mengarahkan sebagian BUMN Kawasan Industri menjadi Pusat Logistik Maritim, diharapkan *lead-time* maupun rantai logistik dapat dikurangi secara signifikan.

Sedangkan BUMN Pelayaran akan diarahkan menjadi bagian dari jaringan inti angkutan laut Indonesia. Transformasi layanan *short-sea shipping*, penyeberangan, RoRo, dan perintis diharapkan menjadi faktor utama pendorong konektivitas antar moda khususnya di kawasan Indonesia Timur, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi

bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dengan meningkatnya kelancaran arus barang, diharapkan disparitas harga dengan daerah lain dapat ditekan dan industri kecil dan menengah dapat tumbuh. Sedangkan meningkatnya lalu-lintas orang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Rencana transformasi tersebut akan dilakukan melalui kebijakan:

1. Revitalisasi secara menyeluruh fasilitas, peralatan, sistem informasi, kemampuan pengelolaan, organisasi, akses laut dan darat kepada semua pelabuhan komersial yang saat ini telah dioperasikan oleh BUMN Kepelabuhanan dengan fokus kepada layanan petikemas.
2. Mendorong konektivitas antar moda transportasi untuk menjadikan jaringan kepelabuhanan yang handal dengan armada angkutan laut milik BUMN maupun swasta sebagai jaringan inti angkutan barang di Indonesia.
3. Transformasi layanan *short-sea shipping*, penyeberangan, & RoRo dan operasionalisasi layanan angkutan perintis yang merupakan sistem pendukung penting bagi terciptanya jaringan transportasi berbasis angkutan maritim yang handal.

Logistik & Kawasan Industri

BUMN Logistik dan Kawasan Industri akan dilakukan modernisasi model bisnis bagi badan usaha di sektor tersebut. Kawasan Industri akan diarahkan untuk menjadi pusat logistik maritim, baik di wilayah dekat pelabuhan maupun *hinterland*.

BUMN Logistik dan Kawasan Industri juga diharapkan membantu pengembangan infrastruktur pendukung industri dan logistik di kawasan perkotaan, kawasan pertumbuhan tinggi dan area perbatasan/perintis. Perhatian khusus juga akan diberikan kepada industri yang berpotensi untuk di relokasi dari Jawa ke pusat pertumbuhan ekonomi tinggi di luar Pulau Jawa karena sudah semakin terbatasnya daya dukung lingkungan di Pulau Jawa saat ini.

Rencana transformasi tersebut akan dilakukan melalui kebijakan:

1. Restrukturisasi/Modernisasi model bisnis Kawasan Industri.
2. Membantu pengembangan infrastruktur pendukung industri dan logistik di: (a). Kawasan perkotaan/urban, (b). Kawasan pertumbuhan tinggi, misalnya Bantaeng (Sulsel), Bitung (Sulut), Buli (Malut), (c). Kawasan Perintis/Perbatasan, misalnya daerah perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Kupang-NTT.
3. Memberikan perhatian khusus kepada potensi relokasi industri dari pulau Jawa ke lokasi pusat pertumbuhan ekonomi tinggi di luar Jawa. Beberapa sektor yang potensial adalah *low value industry* dan komoditas dengan karakter volume dan berat yang signifikan.
4. Mengembangkan BUMN *kawasan industri sebagai Maritime Logistic Hub* baik di dekat wilayah pelabuhan maupun di dalam wilayah *hinterland* dalam upaya membangun infrastruktur rantai pasok yang diperlukan untuk mendukung pengembangan wilayah maupun dukungan logistik perkotaan dan pedesaan.

PEMBENTUKAN HOLDING BUMN INDUSTRI BERAT DAN PERKAPALAN

Selama ini fungsi BUMN sebagai Agen Pembangunan, khususnya BUMN Klaster Industri Berat dan Perkapalan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, fasilitas produksi yang dimiliki sebagian besar sudah tua, masih terbatasnya pasokan bahan baku dari lokal, kesulitan likuiditas akibat akumulasi rugi dalam beberapa tahun serta kemampuan SDM rendah dan terlambat regenerasi SDM.

Ke depan BUMN Industri Berat dan Perkapalan akan didorong oleh Pemerintah guna mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memwujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sesuai dengan Road Map BUMN Tahun 2015 - 2019 BUMN Industri Berat dan Perkapalan akan dilakukan konsolidasi melalui pembentukan *Holding Company*.

Program Prioritas 2017

Sebagai persiapan Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan melalui pembentukan Holding Company, maka pada tahun 2016 telah dilakukan pembentukan Komite Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan dan Kajian Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan oleh konsultan independen.

Dari hasil pelaksanaan tugas Komite Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan serta Kajian Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan oleh konsultan independen.

KONSOLIDASI BUMN PERTAHANAN STRATEGIS DAN TEKNOLOGI TINGGI (NATIONAL DEFENCE AND HI-TECH INDUSTRY/"NDHI")

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan BUMN diantaranya mengintegrasikan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki baik BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi maupun BUMN Industri Berat dan Perkapalan, Menteri BUMN melalui keputusan no. SK-253/MBU/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 telah membentuk Komite Konsolidasi BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi.

Untuk mendukung percepatan sinergi dan efisiensi pada BUMN, Kementerian BUMN akan melakukan restrukturisasi BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi dengan pembentukan Holding Company sebagai BUMN Holding Pertahanan Strategis.

Terkait mekanisme dan tahapan pembentukan Holding Company tersebut yang meliputi PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) masih menunggu hasil usulan dan rekomendasi dari pihak independen/konsultan.

Tujuan yang akan dicapai dengan restrukturisasi dan konsolidasi tersebut antara lain:

- A. Restrukturisasi dan konsolidasi seluruh BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi pada tahun 2019.
- B. Perbaikan *revenue structure* melalui peningkatan porsi penjualan ekspor dan porsi pendapatan non alutsista.
- C. Meningkatkan peran dan kontribusi BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi dalam pemenuhan kebutuhan TNI minimal 35%.
- D. Mengintegrasikan industri pendukung yang berdaya saing di bidang elektroteknika, telekomunikasi, *energetic material*, dan industri nuklir.

TAMBAHAN UNTUK PROGRAM STRATEGIS 2017 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Perbaikan tata kelola Migas dan Ekspansi jaringan gas sebanyak 56.000 sambungan.
- Pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN dengan PT Pertamedika sebagai induk perusahaan.
- Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, Optimalisasi Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Pengembangan destinasi baru sebagai *revenue stream* sekaligus mendorong transformasi Perusahaan menjadi pengembang destinasi pariwisata kelas dunia, serta pengembangan XPLORIN, sebuah platform digital BUMN Pariwisata.
- Pelaksanaan rencana strategis yang dimandatkan adalah Pengembangan Sinergi Hotel Indonesia Group.
- Kerjasama logistik terintegrasi sebagai tindak lanjut penugasan Menteri BUMN yang menunjuk PT Banda Ghara Reksa sebagai agregator ekosistem logistic yaitu:
 - Men-support BUMN trading untuk mendorong UKM meningkatkan produktivitas komoditas carica, bawang merah, kentang dan cabai serta komoditas cangkul. Efektivitas program ini dengan asumsi adanya kejelasan program dari BUMN trading, jadwal trading dan skala

- ekonomi/volume trading.
- Mengintegrasikan aktivitas logistik pada BUMN dan anak perusahaan melalui pengembangan sistem teknologi informasi berbasis Big Data. Dengan terintegrasinya aktivitas tersebut, maka cost logistic akan menurun. BGR membutuhkan dukungan dari Kementerian BUMN untuk mendapatkan data aktivitas logistik BUMN dan anak perusahaan BUMN.
 - Penyediaan jasa depo container dan keagenan pelayaran dalam rangka mendukung Pelabuhan Bitung sebagai Hub Port Internasional.
 - Menjalin sinergi BUMN untuk mengenalkan SARINAH sebagai Windows of Indonesia sekaligus memperkenalkan produk-produk UKM ke mancanegara.

Statistik Kinerja BUMN 2016





Laporan Keuangan

 PERHUTANI Perum Perhutani	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	4.493	3.716	4,014
LIABILITAS (Rp miliar)	2.143	2.198	2,099
EKUITAS (Rp miliar)	2.351	1.518	1,915
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	4.111	3.689	4,460
EBITDA (Rp miliar)	451	(463)	181
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	273	(357)	134
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.941	4.145	4,361
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	342	47	85
Setoran Pajak (Rp miliar)	561	465	422
Jumlah SDM (orang)	21.471	21.961	21,862

 Perikanan Indonesia Perum Perikanan Indonesia	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	453	561	1,399
LIABILITAS (Rp miliar)	60	146	911
EKUITAS (Rp miliar)	392	415	488
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	225	223	1,146
EBITDA (Rp miliar)	21	38	178
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	16	22	70
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	210	219	1,013
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	22	98	934
Setoran Pajak (Rp miliar)	4	8	23
Jumlah SDM (orang)	302	305	930

 RNI PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	6.832	10.499	9,015
LIABILITAS (Rp miliar)	5.622	5.391	6,623
EKUITAS (Rp miliar)	1.211	5.107	2,392
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	5.633	5.063	6,313
EBITDA (Rp miliar)	577	632	693
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	69	247	97
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	5.289	4.844	5,925
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	219	618	1,646
Setoran Pajak (Rp miliar)	320	303	342
Jumlah SDM (orang)	13.691	13.208	13,845

 PT Perikanan Nusantara (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	546	552	936
LIABILITAS (Rp miliar)	107	109	467
EKUITAS (Rp miliar)	439	444	469
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	139	114	289
EBITDA (Rp miliar)	22	14	20
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	21	5	20
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	136	121	271
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	26	5	568
Setoran Pajak (Rp miliar)	0	5	2
Jumlah SDM (orang)	316	304	424

 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	109.720	111.963	122.469
LIABILITAS (Rp miliar)	55.409	60.841	70.540
EKUITAS (Rp miliar)	54.311	51.122	51.929
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	36.212	33.897	46.732
EBITDA (Rp miliar)	4.937	4.537	7.576
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(613)	(1.387)	658
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	35.613	31.566	45.576
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	9.946	7.675	13.403
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.916	2.180	2.850
Jumlah SDM (orang)	273.009	133.325	126.893

 Perum Bulog	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	29.832	34.883	37.046
LIABILITAS (Rp miliar)	22.143	23.565	24.646
EKUITAS (Rp miliar)	7.689	11.318	12.400
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	32.298	34.761	51.436
EBITDA (Rp miliar)	3.327	2.935	3.320
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.216	913	1.101
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	31.030	32.492	48.116
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	115	439	2.053
Setoran Pajak (Rp miliar)	152	998	367
Jumlah SDM (orang)	4.266	4.693	7.661

Laporan Keuangan

 JASA TIRTA I Perum Jasa Tirta I	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	466	625	619
LIABILITAS (Rp miliar)	71	119	67
EKUITAS (Rp miliar)	395	506	553
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	359	533	531
EBITDA (Rp miliar)	113	172	160
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	76	121	108
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	274	338	394
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	42	48	96
Setoran Pajak (Rp miliar)	41	45	49
Jumlah SDM (orang)	463	423	925

 JASA TIRTA II Perum Jasa Tirta II	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	775	941	998
LIABILITAS (Rp miliar)	262	266	245
EKUITAS (Rp miliar)	514	675	753
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	631	744	848
EBITDA (Rp miliar)	132	270	297
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	55	171	174
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	459	519	616
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	66	50	174
Setoran Pajak (Rp miliar)	53	117	103
Jumlah SDM (orang)	1.107	994	1.090

 PUPUK INDONESIA PT Pupuk Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	93.194	127.097	102.079
LIABILITAS (Rp miliar)	64.447	66.190	68.866
EKUITAS (Rp miliar)	28.747	60.907	33.213
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	66.223	64.164	66.357
EBITDA (Rp miliar)	8.132	9.830	9.766
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	3.395	3.526	2.047
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	58.849	56.643	59.900
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	8.615	7.057	5.718
Setoran Pajak (Rp miliar)	7.826	5.504	3.641
Jumlah SDM (orang)	13.798	10.439	9.916

 PT Biofarma (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.681	5.922	8.293
LIABILITAS (Rp miliar)	637	620	2.223
EKUITAS (Rp miliar)	5.044	5.302	6.070
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.346	2.316	2.940
EBITDA (Rp miliar)	1.035	833	1.167
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	671	501	747
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.510	1.656	1.934
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	545	543	1.461
Setoran Pajak (Rp miliar)	378	301	449
Jumlah SDM (orang)	1.557	1.171	1.402

 PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	3.236	4.613
LIABILITAS (Rp miliar)	1.374	2.341
EKUITAS (Rp miliar)	1.862	2.271
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	4.860	5.812
EBITDA (Rp miliar)	470	441
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	253	272
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	4.551	5.427
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	261	519
Setoran Pajak (Rp miliar)	138	299
Jumlah SDM (orang)	8.056	8.496
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	44,8	44,8

 PT PP Berdikari (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	603	553	1.052
LIABILITAS (Rp miliar)	609	666	628
EKUITAS (Rp miliar)	(5)	(113)	424
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	451	230	897
EBITDA (Rp miliar)	(114)	(19)	59
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(128)	(80)	20
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	532	297	922
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	2	31
Setoran Pajak (Rp miliar)	19	6	14
Jumlah SDM (orang)	19.991	314	773

Laporan Keuangan

 PT Sang Hyang Seri (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	862	860	871
LIABILITAS (Rp miliar)	1.981	2.057	2.021
EKUITAS (Rp miliar)	(1.118)	(1.197)	(1.150)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	154	355	1.052
EBITDA (Rp miliar)	(83)	10	0
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(181)	(62)	7
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	235	398	1.018
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	0	163
Setoran Pajak (Rp miliar)	5	17	0
Jumlah SDM (orang)	706	648	720

 PT Pertani (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.241	1.635	1.789
LIABILITAS (Rp miliar)	1.230	1.118	1.127
EKUITAS (Rp miliar)	11	516	661
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.161	1.281	5.137
EBITDA (Rp miliar)	(110)	23	258
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(115)	6	183
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.232	1.298	4.783
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	0	115
Setoran Pajak (Rp miliar)	9	19	56
Jumlah SDM (orang)	1.009	735	683

 PT Garam (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	767	845	862
LIABILITAS (Rp miliar)	152	165	129
EKUITAS (Rp miliar)	615	679	733
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	165	245	443
EBITDA (Rp miliar)	33	71	66
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	4	54	57
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	141	203	383
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	10	29	82
Setoran Pajak (Rp miliar)	13	19	18
Jumlah SDM (orang)	582	527	861

 PT IndoFarma (Persero) Tbk	Realisasi	
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	1.534	1.382
LIABILITAS (Rp miliar)	941	806
EKUITAS (Rp miliar)	593	576
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.622	1.675
EBITDA (Rp miliar)	71	57
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	7	(17)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.559	1.629
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	16	40
Setoran Pajak (Rp miliar)	15	22
Jumlah SDM (orang)	955	1.758
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	-	-

 PT Pertamina (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	627.933	634.625	707.339
LIABILITAS (Rp miliar)	359.272	338.031	382.938
EKUITAS (Rp miliar)	268.661	296.594	324.401
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	559.286	485.529	566.479
EBITDA (Rp miliar)	68.696	100.641	98.785
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	19.313	42.085	40.625
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	506.774	403.111	497.698
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	48.432	74.490	88.739
Setoran Pajak (Rp miliar)	71.119	68.650	66.058
Jumlah SDM (orang)	26.258	27.227	27.258

 PT TWC BP dan RB (Persero)	Realisasi		Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	358	438	524
LIABILITAS (Rp miliar)	85	99	65
EKUITAS (Rp miliar)	273	339	459
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	262	295	402
EBITDA (Rp miliar)	58	92	139
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	50	75	140
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	197	210	263
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	27	71	189
Setoran Pajak (Rp miliar)	18	32	33
Jumlah SDM (orang)	1.325	637	308

Laporan Keuangan

 PT. EMI (Persero) Energi Management Indonesia PT Energy Management Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	67	56	38
LIABILITAS (Rp miliar)	32	35	8
EKUITAS (Rp miliar)	35	21	30
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	12	14	38
EBITDA (Rp miliar)	63	(6)	8
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	61	(13)	7
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	22	28	100
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	-	0
Setoran Pajak (Rp miliar)	17	-	1
Jumlah SDM (orang)	42	46	46

 Inna Hotel Group PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.277	9.728	9.743
LIABILITAS (Rp miliar)	1.265	1.241	1.281
EKUITAS (Rp miliar)	13	8.487	8.463
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	409	539	685
EBITDA (Rp miliar)	25	54	139
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(114)	(89)	(35)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	489	573	659
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	115	16	151
Setoran Pajak (Rp miliar)	59	6	86
Jumlah SDM (orang)	2.278	2.262	2.403

 itdc Creating Destinations PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.454	1.574	2.125
LIABILITAS (Rp miliar)	132	201	626
EKUITAS (Rp miliar)	1.322	1.373	1.499
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	207	218	268
EBITDA (Rp miliar)	118	123	93
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	96	81	53
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	117	143	183
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	26	123	907
Setoran Pajak (Rp miliar)	41	-	71
Jumlah SDM (orang)	142	196	232

 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	89.599	91.824
LIABILITAS (Rp miliar)	47.899	49.229
EKUITAS (Rp miliar)	41.700	42.595
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	41.097	39.053
EBITDA (Rp miliar)	12.982	10.744
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	5.394	4.106
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	34.719	33.792
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	16.632	9.045
Setoran Pajak (Rp miliar)	5.012	283
Jumlah SDM (orang)	1.479	2.242
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	2.000	1.261

 PT Sarinah (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	341	338	376
LIABILITAS (Rp miliar)	135	123	141
EKUITAS (Rp miliar)	206	215	235
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	297	309	409
EBITDA (Rp miliar)	26	21	29
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	17	11	17
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	286	297	400
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	6	46	53
Setoran Pajak (Rp miliar)	63	47	48
Jumlah SDM (orang)	525	334	395

 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.170	3.487	3.024
LIABILITAS (Rp miliar)	1.409	1.344	330
EKUITAS (Rp miliar)	1.760	2.143	2.694
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.766	2.773	3.050
EBITDA (Rp miliar)	71	449	140
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	311	442	586
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.721	2.762	2.995
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4	9	217
Setoran Pajak (Rp miliar)	248	673	378
Jumlah SDM (orang)	630	618	685

Laporan Keuangan

 PT Bhandha Ghara Rekso (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	769	948	1.135
LIABILITAS (Rp miliar)	394	530	646
EKUITAS (Rp miliar)	375	418	489
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	918	1.013	1.381
EBITDA (Rp miliar)	101	72	140
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	60	50	81
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	830	925	1.272
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	197	65	43
Setoran Pajak (Rp miliar)	110	5	112
Jumlah SDM (orang)	1.165	1.424	1.550

 PT Pos Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.183	5.189	7.179
LIABILITAS (Rp miliar)	4.280	4.135	5.852
EKUITAS (Rp miliar)	903	1.054	1.327
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	4.569	4.454	6.289
EBITDA (Rp miliar)	19	474	673
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	30	203	306
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	4.555	4.587	10.057
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	26	202	1.075
Setoran Pajak (Rp miliar)	256	239	253
Jumlah SDM (orang)	18.934	23.902	28.173

 PT PLN (Persero) <i>Electricity for a Better Life</i> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.227.356	1.274.576	1.339.462
LIABILITAS (Rp miliar)	379.136	393.779	439.929
EKUITAS (Rp miliar)	848.219	880.798	899.533
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	217.347	222.822	326.588
EBITDA (Rp miliar)	49.056	59.530	69.665
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	15.585	10.549	15.625
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	246.262	247.166	289.723
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	45.279	59.448	121.522
Setoran Pajak (Rp miliar)	11.133	1.930	3.935
Jumlah SDM (orang)	41.330	51.627	136.966

 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.729	1.845	1.972
LIABILITAS (Rp miliar)	602	585	597
EKUITAS (Rp miliar)	1.128	1.259	1.376
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	502	639	686
EBITDA (Rp miliar)	108	174	221
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	57	138	163
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	397	476	465
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	81	0	1.244
Setoran Pajak (Rp miliar)	208	121	152
Jumlah SDM (orang)	598	560	609

 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	147	229	247
LIABILITAS (Rp miliar)	27	65	50
EKUITAS (Rp miliar)	120	163	196
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	36	88	113
EBITDA (Rp miliar)	19	50	64
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	11	46	51
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	23	40	56
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	13	0	30
Setoran Pajak (Rp miliar)	10	14	15
Jumlah SDM (orang)	56	59	61

 PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	332	376	441
LIABILITAS (Rp miliar)	33	45	38
EKUITAS (Rp miliar)	299	332	403
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	113	98	124
EBITDA (Rp miliar)	36	48	60
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	34	36	47
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	85	60	69
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	18	0	25
Setoran Pajak (Rp miliar)	9	10	25
Jumlah SDM (orang)	121	137	145

Laporan Keuangan

 PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	116	138	167
LIABILITAS (Rp miliar)	13	24	48
EKUITAS (Rp miliar)	104	114	120
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	26	34	54
EBITDA (Rp miliar)	11	19	22
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	7	14	11
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	20	23	39
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	9	7	48
Setoran Pajak (Rp miliar)	10	8	-
Jumlah SDM (orang)	34	37	38

 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	342	393	373
LIABILITAS (Rp miliar)	178	222	201
EKUITAS (Rp miliar)	165	170	172
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	172	201	232
EBITDA (Rp miliar)	22	14	19
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	5	5	6
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	169	176	211
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	2	15
Setoran Pajak (Rp miliar)	4	6	2
Jumlah SDM (orang)	314	497	524

 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.868	3.639	5.418
LIABILITAS (Rp miliar)	1.903	1.606	2.895
EKUITAS (Rp miliar)	1.965	2.033	2.523
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.022	2.410	4.038
EBITDA (Rp miliar)	667	593	891
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	324	161	467
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	2.546	2.108	3.425
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	649	282	1.337
Setoran Pajak (Rp miliar)	176	184	432
Jumlah SDM (orang)	3.725	2.978	2.411

 PFN PERUM PRODUKSI FILM NEGARA	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	31	33	34
LIABILITAS (Rp miliar)	15	18	13
EKUITAS (Rp miliar)	16	15	21
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2	6	28
EBITDA (Rp miliar)	(3)	1	5
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(1)	(1)	5
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	4	9	25
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	-	0
Setoran Pajak (Rp miliar)	0	1	4
Jumlah SDM (orang)	26	28	40

 ANTARANEWS KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	147	172	177
LIABILITAS (Rp miliar)	114	135	124
EKUITAS (Rp miliar)	32	37	53
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	279	284	318
EBITDA (Rp miliar)	13	13	12
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	13	9	12
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	264	271	308
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	8	10	21
Setoran Pajak (Rp miliar)	21	6	3
Jumlah SDM (orang)	972	1.007	1.007

 SEMI INDONESIA PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	38.153	44.227
LIABILITAS (Rp miliar)	10.712	13.653
EKUITAS (Rp miliar)	27.441	30.574
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	26.948	26.134
EBITDA (Rp miliar)	7.390	6.963
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	4.525	4.535
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	21.049	21.161
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	5.592	5.656
Setoran Pajak (Rp miliar)	3.478	1.243
Jumlah SDM (orang)	7.032	6.828
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	1.136	922

Laporan Keuangan

 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	3.269	4.369
LIABILITAS (Rp miliar)	319	1.248
EKUITAS (Rp miliar)	2.949	3.121
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.461	1.523
EBITDA (Rp miliar)	414	420
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	354	259
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.138	1.202
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	843	2.349
Setoran Pajak (Rp miliar)	183	207
Jumlah SDM (orang)	595	574
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	63	68

 PT Semen Kupang (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	614	611	613
LIABILITAS (Rp miliar)	618	608	600
EKUITAS (Rp miliar)	(4)	3	14
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	16	16	19
EBITDA (Rp miliar)	11	9	9
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	8	6	9
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	5	7	7
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	-	1
Setoran Pajak (Rp miliar)	1	1	1
Jumlah SDM (orang)	16	15	312

 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	16.894	18.577
LIABILITAS (Rp miliar)	7.606	8.024
EKUITAS (Rp miliar)	9.288	10.552
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	13.734	14.059
EBITDA (Rp miliar)	2.789	2.772
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	2.037	2.024
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	11.319	11.464
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1.535	1.122
Setoran Pajak (Rp miliar)	590	1.740
Jumlah SDM (orang)	9.016	2.586
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	486	434

 PT Timah (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	9.280	9.549
LIABILITAS (Rp miliar)	3.909	3.895
EKUITAS (Rp miliar)	5.371	5.654
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	6.874	6.968
EBITDA (Rp miliar)	748	1.047
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	102	252
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.793	6.471
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	649	535
Setoran Pajak (Rp miliar)	319	-
Jumlah SDM (orang)	6.234	4.724
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	124	20

 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	30.357	29.982
LIABILITAS (Rp miliar)	12.040	11.573
EKUITAS (Rp miliar)	18.317	18.409
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	10.532	9.106
EBITDA (Rp miliar)	2	556
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(1.441)	65
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	11.233	9.098
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.029	2.266
Setoran Pajak (Rp miliar)	329	344
Jumlah SDM (orang)	2.724	3.202
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	-	-

 PT Balai Pustaka (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	122	102	136
LIABILITAS (Rp miliar)	133	130	145
EKUITAS (Rp miliar)	(12)	(28)	(9)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	19	23	79
EBITDA (Rp miliar)	-	2	8
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(11)	(6)	2
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	28	29	75
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	2	-	2
Jumlah SDM (orang)	101	78	84

Laporan Keuangan

 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	166.173	179.611
LIABILITAS (Rp miliar)	72.745	74.067
EKUITAS (Rp miliar)	93.428	105.544
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	102.470	116.333
EBITDA (Rp miliar)	51.415	59.498
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	23.317	29.172
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	69.589	75.367
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	26.401	29.199
Setoran Pajak (Rp miliar)	21.056	14.000
Jumlah SDM (orang)	16.142	23.876
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	4.616	5.883

 PT PAL Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	6.661	5.819	7.524
LIABILITAS (Rp miliar)	5.642	5.210	6.049
EKUITAS (Rp miliar)	1.018	609	1.475
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	944	683	1.524
EBITDA (Rp miliar)	(99)	11	213
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(187)	(395)	83
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	901	727	1.419
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	49	-	321
Setoran Pajak (Rp miliar)	50	-	26
Jumlah SDM (orang)	1.836	1.673	1.587

 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	726	718	789
LIABILITAS (Rp miliar)	353	329	206
EKUITAS (Rp miliar)	373	389	583
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	114	164	250
EBITDA (Rp miliar)	23	19	34
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	11	16	20
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	100	151	220
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	19	0	184
Setoran Pajak (Rp miliar)	4	0	7
Jumlah SDM (orang)	585	227	594

 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	2.239	2.028	2.080
LIABILITAS (Rp miliar)	3.612	3.509	3.439
EKUITAS (Rp miliar)	(1.373)	(1.481)	(1.358)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	326	367	760
EBITDA (Rp miliar)	(192)	26	46
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(213)	(130)	13
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	580	555	758
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	8	4	754
Setoran Pajak (Rp miliar)	15	13	41
Jumlah SDM (orang)	1.510	1.371	1.153

 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	618	581	588
LIABILITAS (Rp miliar)	869	844	813
EKUITAS (Rp miliar)	(251)	(263)	(225)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	167	131	189
EBITDA (Rp miliar)	3	(28)	5
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(45)	(82)	5
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	172	165	165
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	16	26	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	15	6	1
Jumlah SDM (orang)	483	469	466

 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	15.642	21.813	22.756
LIABILITAS (Rp miliar)	1.033	1.219	574
EKUITAS (Rp miliar)	14.609	20.595	22.182
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	6.570	5.771	5.810
EBITDA (Rp miliar)	1.515	1.568	1.585
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.059	884	914
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	5.309	4.653	4.654
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	381	1.117	1.973
Setoran Pajak (Rp miliar)	255	773	306
Jumlah SDM (orang)	2.030	2.022	2.220

Laporan Keuangan

 KRAKATAU STEEL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	51.071	52.894
LIABILITAS (Rp miliar)	26.404	28.176
EKUITAS (Rp miliar)	24.667	24.718
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	17.702	17.894
EBITDA (Rp miliar)	(1.231)	1.374
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(4.373)	(2.405)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	20.167	18.180
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.559	2.074
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.388	2.560
Jumlah SDM (orang)	4.775	7.157
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	-	9.564

 PT Boma Bisma Indra (Persero) PT Boma Bisma Indra (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	541	590	606
LIABILITAS (Rp miliar)	346	358	369
EKUITAS (Rp miliar)	195	231	237
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	219	179	275
EBITDA (Rp miliar)	(18)	6	17
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(33)	(10)	3
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	236	176	264
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	316	46	19
Setoran Pajak (Rp miliar)	10	13	12
Jumlah SDM (orang)	633	605	643

 INUKI PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	20	40	55
LIABILITAS (Rp miliar)	19	39	45
EKUITAS (Rp miliar)	0	1	10
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	20	21	69
EBITDA (Rp miliar)	(1)	1	8
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	0	1	9
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	21	25	60
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	13	7
Setoran Pajak (Rp miliar)	3	2	3
Jumlah SDM (orang)	52	55	93

 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.870	1.367	1.902
LIABILITAS (Rp miliar)	1.345	1.176	1.591
EKUITAS (Rp miliar)	524	191	311
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	421	681	1.741
EBITDA (Rp miliar)	(138)	(212)	111
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(283)	(316)	4
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	530	900	2.951
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	6	16
Setoran Pajak (Rp miliar)	87	63	85
Jumlah SDM (orang)	658	590	569

 PT Barata Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.315	2.078	1.978
LIABILITAS (Rp miliar)	993	1.127	972
EKUITAS (Rp miliar)	322	951	1.006
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	650	703	1.182
EBITDA (Rp miliar)	56	68	102
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	13	20	44
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	615	653	1.079
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4	6	34
Setoran Pajak (Rp miliar)	54	50	126
Jumlah SDM (orang)	1.418	1.115	1.469

 PT Dahana (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.306	1.254	1.573
LIABILITAS (Rp miliar)	704	576	825
EKUITAS (Rp miliar)	602	679	748
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.376	1.372	1.538
EBITDA (Rp miliar)	178	137	189
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	89	82	99
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.227	1.241	1.411
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	28	5	321
Setoran Pajak (Rp miliar)	128	161	117
Jumlah SDM (orang)	912	932	826

Laporan Keuangan

 PT LEN Industri (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.159	3.866	4.256
LIABILITAS (Rp miliar)	2.584	3.265	3.551
EKUITAS (Rp miliar)	575	602	705
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.240	2.325	2.776
EBITDA (Rp miliar)	94	207	223
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	37	5	59
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	2.150	2.299	2.627
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	213	123	1.058
Setoran Pajak (Rp miliar)	415	308	535
Jumlah SDM (orang)	610	602	750

 PT Pindad (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	4.072	4.167	4.492
LIABILITAS (Rp miliar)	2.799	2.908	3.020
EKUITAS (Rp miliar)	1.273	1.259	1.472
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.949	2.025	3.278
EBITDA (Rp miliar)	193	147	162
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	4	46	114
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.815	1.965	2.801
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	174	59	913
Setoran Pajak (Rp miliar)	84	100	535
Jumlah SDM (orang)	3.103	2.511	2.585

 PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	10.888	11.506	11.977
LIABILITAS (Rp miliar)	6.528	7.549	7.685
EKUITAS (Rp miliar)	4.361	3.957	4.293
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.574	4.224	5.916
EBITDA (Rp miliar)	309	(204)	425
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	49	(269)	83
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.538	4.300	5.633
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	151	65	647
Setoran Pajak (Rp miliar)	6	2	63
Jumlah SDM (orang)	4.309	4.643	4.785

 PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	16.761	20.095
LIABILITAS (Rp miliar)	11.599	14.653
EKUITAS (Rp miliar)	5.162	5.443
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	9.390	11.133
EBITDA (Rp miliar)	883	926
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	465	315
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	8.810	10.405
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	224	371
Setoran Pajak (Rp miliar)	281	879
Jumlah SDM (orang)	1.766	1.794
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	33	48

 PT Amarta Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	612	577	742
LIABILITAS (Rp miliar)	408	404	480
EKUITAS (Rp miliar)	204	173	262
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	368	122	1.050
EBITDA (Rp miliar)	43	(174)	103
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	21	(138)	50
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	326	242	957
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	-	20
Setoran Pajak (Rp miliar)	30	33	161
Jumlah SDM (orang)	134	129	159

 PT Brantas Abipraya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	2.279	2.976	3.900
LIABILITAS (Rp miliar)	1.607	2.145	2.957
EKUITAS (Rp miliar)	672	831	943
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.197	3.477	6.398
EBITDA (Rp miliar)	357	402	553
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	132	178	256
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	2.910	3.115	5.865
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	237	238	732
Setoran Pajak (Rp miliar)	88	801	1.036
Jumlah SDM (orang)	627	462	724

Laporan Keuangan

 JASAMARGA JABANGA KUSTAS LAYANAN PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	36.725	53.500
LIABILITAS (Rp miliar)	24.356	37.161
EKUITAS (Rp miliar)	12.369	16.339
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	9.848	16.661
EBITDA (Rp miliar)	4.285	5.229
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.319	1.803
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.614	12.754
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4.158	9.577
Setoran Pajak (Rp miliar)	941	1.157
Jumlah SDM (orang)	9.011	9.376
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	344	205

 WASKITA PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	30.309	61.425
LIABILITAS (Rp miliar)	20.605	44.652
EKUITAS (Rp miliar)	9.704	16.773
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	14.164	23.788
EBITDA (Rp miliar)	1.590	3.344
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.048	1.813
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	12.749	20.609
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	5.845	24.589
Setoran Pajak (Rp miliar)	489	2.120
Jumlah SDM (orang)	1.311	1.509
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	68	138

 WIKA PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	19.602	31.097
LIABILITAS (Rp miliar)	14.164	18.598
EKUITAS (Rp miliar)	5.438	12.499
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	13.909	16.048
EBITDA (Rp miliar)	1.467	2.362
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	703	1.147
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	12.395	13.969
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	700	1.202
Setoran Pajak (Rp miliar)	864	2.196
Jumlah SDM (orang)	1.930	2.187
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	80	81

 PT Hutama Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	12.337	24.012	33.768
LIABILITAS (Rp miliar)	7.081	16.466	24.827
EKUITAS (Rp miliar)	5.256	7.546	8.941
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	6.478	9.017	19.006
EBITDA (Rp miliar)	608	579	1.688
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	251	302	1.174
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.109	8.031	17.306
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	548	4.411	11.409
Setoran Pajak (Rp miliar)	884	791	1.346
Jumlah SDM (orang)	1.238	1.368	1.328

 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	19.129	31.233
LIABILITAS (Rp miliar)	14.010	20.437
EKUITAS (Rp miliar)	5.119	10.796
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	14.217	16.459
EBITDA (Rp miliar)	1.581	2.071
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	846	1.151
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	12.620	14.491
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4.159	1.668
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.888	2.480
Jumlah SDM (orang)	1.795	1.896
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	54	76

 perumnas Perum Perumnas	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.502	6.567	8.183
LIABILITAS (Rp miliar)	3.264	3.720	5.101
EKUITAS (Rp miliar)	2.238	2.847	3.082
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.372	1.263	3.039
EBITDA (Rp miliar)	298	264	553
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	122	93	256
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.105	1.069	2.493
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	113	151	779
Setoran Pajak (Rp miliar)	192	163	274
Jumlah SDM (orang)	1.054	1.030	1.505

Laporan Keuangan

 PT Industri Kereta Api (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	2.336	3.319	2.868
LIABILITAS (Rp miliar)	1.976	1.920	1.396
EKUITAS (Rp miliar)	360	1.399	1.472
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.244	1.881	2.659
EBITDA (Rp miliar)	151	60	307
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	28	45	72
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.125	1.700	2.406
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	12	61	597
Setoran Pajak (Rp miliar)	95	14	54
Jumlah SDM (orang)	1.084	1.309	1.174

 PT PDI Pulau Batam (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	86	86	107
LIABILITAS (Rp miliar)	38	33	46
EKUITAS (Rp miliar)	48	53	61
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	73	69	85
EBITDA (Rp miliar)	15	53	17
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	4	5	5
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	69	64	79
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	8	10	25
Setoran Pajak (Rp miliar)	4	4	5
Jumlah SDM (orang)	265	249	241

 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.492	7.301	7.967
LIABILITAS (Rp miliar)	1.852	3.000	3.117
EKUITAS (Rp miliar)	3.640	4.301	4.851
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.341	2.409	2.757
EBITDA (Rp miliar)	1.167	1.194	1.365
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	700	733	719
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.449	1.411	1.589
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	727	1.777	2.675
Setoran Pajak (Rp miliar)	488	576	953
Jumlah SDM (orang)	1.249	1.141	1.413

 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	42.589	43.472	51.025
LIABILITAS (Rp miliar)	31.641	31.560	32.085
EKUITAS (Rp miliar)	10.947	11.912	18.940
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	8.141	10.318	10.977
EBITDA (Rp miliar)	2.491	3.739	3.593
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.355	1.537	1.729
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.092	7.804	8.264
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4.241	2.215	8.141
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.391	754	1.059
Jumlah SDM (orang)	4.361	2.734	9.666

 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	18.971	22.182	28.441
LIABILITAS (Rp miliar)	11.265	12.536	17.078
EKUITAS (Rp miliar)	7.705	9.645	11.363
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	8.265	8.785	9.839
EBITDA (Rp miliar)	2.621	2.949	3.665
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.163	1.512	1.656
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.036	6.701	5.499
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	4.072	3.903	4.686
Setoran Pajak (Rp miliar)	374	1.410	1.676
Jumlah SDM (orang)	4.405	4.114	4.453

 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	7.160	7.504	8.438
LIABILITAS (Rp miliar)	1.882	1.987	2.524
EKUITAS (Rp miliar)	5.278	5.517	5.914
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.010	2.018	2.428
EBITDA (Rp miliar)	756	777	880
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	377	330	649
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.498	1.642	1.714
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	594	997	1.641
Setoran Pajak (Rp miliar)	148	491	443
Jumlah SDM (orang)	3.028	2.414	2.528

Laporan Keuangan

 PT Indah Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	164	341	466
LIABILITAS (Rp miliar)	49	214	296
EKUITAS (Rp miliar)	114	127	169
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	50	93	391
EBITDA (Rp miliar)	10	24	66
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	8	14	32
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	40	75	333
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	38	63
Setoran Pajak (Rp miliar)	18	13	55
Jumlah SDM (orang)	283	364	821

 PT Bina Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	77	81	107
LIABILITAS (Rp miliar)	59	57	74
EKUITAS (Rp miliar)	19	25	33
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	52	62	115
EBITDA (Rp miliar)	4	9	12
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1	6	9
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	51	60	103
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	36	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	8	6	18
Jumlah SDM (orang)	225	253	253

 Perum Damri	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.347	1.317	1.619
LIABILITAS (Rp miliar)	628	525	688
EKUITAS (Rp miliar)	720	792	932
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.183	1.173	1.305
EBITDA (Rp miliar)	223	205	275
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	3	41	50
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.129	1.142	976
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	300	374	358
Setoran Pajak (Rp miliar)	26	10	15
Jumlah SDM (orang)	5.784	5.782	6.331

 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	149	176	901
LIABILITAS (Rp miliar)	311	157	134
EKUITAS (Rp miliar)	(162)	19	767
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	60	210	521
EBITDA (Rp miliar)	7	32	84
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	0	10	59
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	63	196	501
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	4	793
Setoran Pajak (Rp miliar)	59	1	2
Jumlah SDM (orang)	1.340	1.642	2.303

 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	4.316	4.903	5.436
LIABILITAS (Rp miliar)	895	1.061	858
EKUITAS (Rp miliar)	3.421	3.842	4.578
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.352	2.523	2.889
EBITDA (Rp miliar)	932	727	532
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	629	419	197
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.663	2.049	2.714
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	668	1.580	1.579
Setoran Pajak (Rp miliar)	324	294	220
Jumlah SDM (orang)	3.880	4.670	5.275

 PT Angkasa Pura I (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	16.722	23.667	26.595
LIABILITAS (Rp miliar)	5.693	11.669	13.512
EKUITAS (Rp miliar)	11.029	11.997	13.083
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	5.250	6.138	7.616
EBITDA (Rp miliar)	2.013	2.234	2.823
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	842	1.160	1.173
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.956	4.489	5.725
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.056	4.720	8.382
Setoran Pajak (Rp miliar)	864	1.533	883
Jumlah SDM (orang)	8.677	8.278	17.952

Laporan Keuangan

 PT Angkasa Pura II (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	20.271	27.991	33.151
LIABILITAS (Rp miliar)	4.035	8.064	12.242
EKUITAS (Rp miliar)	16.236	19.928	20.909
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	5.644	6.646	8.247
EBITDA (Rp miliar)	2.909	3.048	1.691
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.687	1.940	1.691
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.578	4.575	5.877
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	5.041	15.520	9.263
Setoran Pajak (Rp miliar)	461	1.222	575
Jumlah SDM (orang)	8.145	9.405	9.722

 PT Virama Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	115	226	151
LIABILITAS (Rp miliar)	58	113	55
EKUITAS (Rp miliar)	57	112	96
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	221	258	298
EBITDA (Rp miliar)	31	33	38
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	15	(23)	20
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	188	222	257
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	1	5
Setoran Pajak (Rp miliar)	21	33	37
Jumlah SDM (orang)	830	1.489	1.405

 PT Yodya Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	173	273	481
LIABILITAS (Rp miliar)	109	189	378
EKUITAS (Rp miliar)	65	83	104
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	220	254	292
EBITDA (Rp miliar)	28	34	37
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	18	22	21
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	193	217	251
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	4	2
Setoran Pajak (Rp miliar)	24	28	48
Jumlah SDM (orang)	1.274	1.255	1.299

 PT Indra Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	74	71	90
LIABILITAS (Rp miliar)	78	78	68
EKUITAS (Rp miliar)	(4)	(7)	22
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	89	87	153
EBITDA (Rp miliar)	7	6	16
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	2	(4)	10
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	85	85	141
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	0	1	1
Setoran Pajak (Rp miliar)	9	6	3
Jumlah SDM (orang)	315	306	450

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	508.595	603.032
LIABILITAS (Rp miliar)	430.157	513.778
EKUITAS (Rp miliar)	78.438	89.254
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	49.078	55.073
EBITDA (Rp miliar)	12.195	15.169
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	9.141	11.410
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	37.666	40.843
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.669	1.887
Setoran Pajak (Rp miliar)	7.657	5.474
Jumlah SDM (orang)	27.036	28.390
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	1.617	1.371

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	910.063	1.038.706
LIABILITAS (Rp miliar)	790.572	885.336
EKUITAS (Rp miliar)	119.492	153.370
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	99.771	99.709
EBITDA (Rp miliar)	24.700	19.990
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	21.152	14.650
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	73.432	81.097
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.179	1.386
Setoran Pajak (Rp miliar)	10.491	11.038
Jumlah SDM (orang)	36.737	38.940
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	2.981	3.660

Laporan Keuangan

 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	878.426	1.003.644
LIABILITAS (Rp miliar)	765.299	856.832
EKUITAS (Rp miliar)	113.127	146.813
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	97.843	112.066
EBITDA (Rp miliar)	33.054	35.189
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	25.411	26.228
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	67.330	78.101
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3.417	3.672
Setoran Pajak (Rp miliar)	8.555	13.522
Jumlah SDM (orang)	129.769	93.333
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	4.127	4.363

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	171.808	214.168
LIABILITAS (Rp miliar)	157.947	195.038
EKUITAS (Rp miliar)	13.860	19.131
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	16.073	18.422
EBITDA (Rp miliar)	2.730	3.572
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.851	2.619
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	13.539	15.069
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	263	286
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.951	1.949
Jumlah SDM (orang)	9.042	8.561
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	134	222

 Perum Jaminan Kredit Indonesia	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	11.643	13.408	15.321
LIABILITAS (Rp miliar)	2.167	3.109	2.870
EKUITAS (Rp miliar)	9.476	10.300	12.451
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.877	2.176	2.531
EBITDA (Rp miliar)	791	954	993
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	625	692	895
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.393	1.529	1.930
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	34	58	217
Setoran Pajak (Rp miliar)	166	143	99
Jumlah SDM (orang)	909	1.090	1.551

 PT ASABRI (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	32.313	36.595	41.758
LIABILITAS (Rp miliar)	30.497	34.994	39.195
EKUITAS (Rp miliar)	1.816	1.601	2.562
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	4.156	5.036	4.400
EBITDA (Rp miliar)	347	589	325
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	347	538	324
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.822	4.617	2.676
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	21	44	38
Setoran Pajak (Rp miliar)	100	27	20
Jumlah SDM (orang)	523	510	569

 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	11.394	12.076	12.669
LIABILITAS (Rp miliar)	9.047	9.376	9.637
EKUITAS (Rp miliar)	2.347	2.700	3.033
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.200	2.465	2.425
EBITDA (Rp miliar)	492	493	507
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	401	366	413
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.750	1.948	426
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	43	24	92
Setoran Pajak (Rp miliar)	168	213	223
Jumlah SDM (orang)	1.060	1.758	1.040

 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	25.571	38.618	44.559
LIABILITAS (Rp miliar)	22.209	33.206	37.689
EKUITAS (Rp miliar)	3.362	5.412	6.870
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	11.070	21.123	23.524
EBITDA (Rp miliar)	1.117	1.415	1.990
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.066	1.723	1.968
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	10.003	19.330	21.445
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	56	79	131
Setoran Pajak (Rp miliar)	328	173	111
Jumlah SDM (orang)	1.120	1.135	1.381

Laporan Keuangan

 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	13.057	15.250	18.155
LIABILITAS (Rp miliar)	5.186	6.620	9.124
EKUITAS (Rp miliar)	7.871	8.630	9.031
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	5.023	6.524	7.488
EBITDA (Rp miliar)	1.099	1.026	1.063
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.002	908	966
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.978	5.473	7.295
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	80	73	182
Setoran Pajak (Rp miliar)	196	316	177
Jumlah SDM (orang)	1.189	848	1.752

 PT Jasa Raharja (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	11.666	13.123	14.194
LIABILITAS (Rp miliar)	3.449	3.658	3.737
EKUITAS (Rp miliar)	8.217	9.465	10.457
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	6.255	6.619	7.114
EBITDA (Rp miliar)	2.998	2.975	3.140
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	2.322	2.377	2.498
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.329	3.645	4.027
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	90	178	193
Setoran Pajak (Rp miliar)	850	814	981
Jumlah SDM (orang)	2.125	2.646	2.654

 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	6.542	7.103	8.831
LIABILITAS (Rp miliar)	5.356	4.752	5.277
EKUITAS (Rp miliar)	1.186	2.351	3.554
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.004	3.809	5.165
EBITDA (Rp miliar)	228	417	609
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	210	266	408
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	2.729	3.459	4.567
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	37	27	40
Setoran Pajak (Rp miliar)	38	34	53
Jumlah SDM (orang)	694	667	677

 PT Taspen (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	172.561	198.619	229.727
LIABILITAS (Rp miliar)	163.181	187.317	215.764
EKUITAS (Rp miliar)	9.380	11.303	13.963
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	15.769	14.585	16.942
EBITDA (Rp miliar)	654	417	901
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	578	247	685
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	15.342	14.700	16.103
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	140	79	195
Setoran Pajak (Rp miliar)	52	415	154
Jumlah SDM (orang)	1.838	1.887	1.929

 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Realisasi	Realisasi
	2015	2016
ASET (Rp miliar)	45.662	50.218
LIABILITAS (Rp miliar)	32.546	36.649
EKUITAS (Rp miliar)	13.115	13.569
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	51.090	51.417
EBITDA (Rp miliar)	4.607	3501
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.044	125
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	49.976	50.512
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1.291	2.131
Setoran Pajak (Rp miliar)	2.668	3.209
Jumlah SDM (orang)	8.248	7.740
Setoran Dividen Bagian Pemerintah (Rp miliar)	-	-

 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.893	6.211	6.727
LIABILITAS (Rp miliar)	1.205	746	904
EKUITAS (Rp miliar)	4.688	5.465	5.824
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.869	4.202	5.781
EBITDA (Rp miliar)	414	512	731
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	99	248	306
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.761	3.967	11.150
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	105	68	1.337
Setoran Pajak (Rp miliar)	130	156	138
Jumlah SDM (orang)	4.806	4.498	4.720

Laporan Keuangan

 PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	22.393	25.133	32.795
LIABILITAS (Rp miliar)	13.306	15.420	20.183
EKUITAS (Rp miliar)	9.087	9.713	12.613
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	13.939	14.463	19.490
EBITDA (Rp miliar)	3.322	2.564	3.769
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.397	1.018	1.844
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	11.268	12.560	15.018
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	2.519	2.304	7.543
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.743	1.792	878
Jumlah SDM (orang)	28.652	28.849	30.000

 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.687	4.043	4.473
LIABILITAS (Rp miliar)	2.710	3.028	3.351
EKUITAS (Rp miliar)	976	1.015	1.122
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	727	799	795
EBITDA (Rp miliar)	202	207	267
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	120	130	120
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	651	666	648
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	38	19	92
Setoran Pajak (Rp miliar)	165	186	157
Jumlah SDM (orang)	349	429	460

 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	689	772	767
LIABILITAS (Rp miliar)	182	212	151
EKUITAS (Rp miliar)	508	560	615
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	707	738	792
EBITDA (Rp miliar)	78	103	89
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	81	68	100
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	613	645	692
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	48	57	124
Setoran Pajak (Rp miliar)	219	149	92
Jumlah SDM (orang)	1.070	1.110	1.155

 PT Danareksa (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.719	3.607	3.540
LIABILITAS (Rp miliar)	2.470	2.237	2.162
EKUITAS (Rp miliar)	1.250	1.371	1.377
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	602	637	621
EBITDA (Rp miliar)	120	134	121
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	79	116	115
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	498	492	506
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	8	3	24
Setoran Pajak (Rp miliar)	34	149	143
Jumlah SDM (orang)	403	435	479

 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.198	1.450	1.397
LIABILITAS (Rp miliar)	919	1.167	1.098
EKUITAS (Rp miliar)	279	282	299
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	43	45	72
EBITDA (Rp miliar)	38	27	34
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	10	12	16
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	60	57	63
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	9	9	18
Setoran Pajak (Rp miliar)	11	15	15
Jumlah SDM (orang)	53	52	56

 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	6.006	7.756	9.502
LIABILITAS (Rp miliar)	4.278	5.958	7.649
EKUITAS (Rp miliar)	1.728	1.798	1.853
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	1.182	1.292	2.130
EBITDA (Rp miliar)	11	142	17
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	66	77	77
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.188	1.397	1.998
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	49	82	160
Setoran Pajak (Rp miliar)	91	100	52
Jumlah SDM (orang)	6.989	14.345	19.919

Laporan Keuangan

	Realisasi	Realisasi	Target
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	3.538	2.846	2.276
LIABILITAS (Rp miliar)	7.232	7.100	6.709
EKUITAS (Rp miliar)	(3.695)	(4.254)	(4.433)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	218	224	198
EBITDA (Rp miliar)	-	(53)	5
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(559)	(560)	5
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.115	956	193
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	1
Setoran Pajak (Rp miliar)	23	15	2
Jumlah SDM (orang)	36	60	49

	Realisasi	Realisasi	Target
PT Pegadaian (Persero)	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	39.158	46.874	53.127
LIABILITAS (Rp miliar)	26.625	30.397	34.586
EKUITAS (Rp miliar)	12.533	16.477	18.541
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	8.897	9.708	11.232
EBITDA (Rp miliar)	5.291	3.333	6.493
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	1.938	2.210	2.505
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	6.324	6.708	5.058
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	620	739	923
Setoran Pajak (Rp miliar)	1.122	1.202	1.670
Jumlah SDM (orang)	12.252	12.949	13.561

	Realisasi	Realisasi	Target
PT Sucofindo (Persero)	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	2.786	2.785	3.300
LIABILITAS (Rp miliar)	757	671	903
EKUITAS (Rp miliar)	2.029	2.114	2.397
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.154	2.007	2.564
EBITDA (Rp miliar)	307	292	335
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	184	148	220
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	1.886	1.788	2.311
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	63	136	230
Setoran Pajak (Rp miliar)	346	342	104
Jumlah SDM (orang)	2.680	4.281	4.926

 PT Surveyor Indonesia (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.108	1.137	1.252
LIABILITAS (Rp miliar)	240	202	246
EKUITAS (Rp miliar)	868	936	1.006
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	998	994	1.109
EBITDA (Rp miliar)	140	151	173
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	91	90	106
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	863	875	1.108
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	76	76	114
Setoran Pajak (Rp miliar)	164	138	192
Jumlah SDM (orang)	1.577	1.696	1.950

 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	5.365	6.230	6.500
LIABILITAS (Rp miliar)	418	522	919
EKUITAS (Rp miliar)	4.947	5.708	5.581
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2.330	2.311	2.613
EBITDA (Rp miliar)	453	507	506
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	223	233	253
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	2.178	2.188	2.371
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	210	365	1.933
Setoran Pajak (Rp miliar)	63	83	75
Jumlah SDM (orang)	4.122	4.211	4.498

 PT Djakarta Lloyd (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	832	742	1.002
LIABILITAS (Rp miliar)	489	369	490
EKUITAS (Rp miliar)	343	373	512
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	377	393	671
EBITDA (Rp miliar)	43	44	128
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	22	30	120
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	380	367	610
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	-	264
Setoran Pajak (Rp miliar)	35	-	9
Jumlah SDM (orang)	63	81	99

Laporan Keuangan

 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-Owned Asset Management Company	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	7.300	7.890	8.918
LIABILITAS (Rp miliar)	3.436	3.739	4.550
EKUITAS (Rp miliar)	3.865	4.151	4.369
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	3.970	5.064	6.315
EBITDA (Rp miliar)	355	545	670
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	171	281	300
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	3.609	4.586	5.840
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	65	140	2.157
Setoran Pajak (Rp miliar)	142	177	233
Jumlah SDM (orang)	169	177	185

 PT Iglas (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	268	214	261
LIABILITAS (Rp miliar)	979	1.026	1.058
EKUITAS (Rp miliar)	(712)	(812)	(798)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	83	5	2
EBITDA (Rp miliar)	(168)	(2)	(9)
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(174)	(53)	(43)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	180	12	13
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	0	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	4	2	4
Jumlah SDM (orang)	55	28	28

 PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	605	610	603
LIABILITAS (Rp miliar)	399	462	432
EKUITAS (Rp miliar)	206	148	171
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	38	0	47
EBITDA (Rp miliar)	(22)	33	57
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(22)	(53)	57
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	89	59	63
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	27
Setoran Pajak (Rp miliar)	-	-	26
Jumlah SDM (orang)	65	52	325

 PT Istaka Karya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	396	417	1.131
LIABILITAS (Rp miliar)	276	267	909
EKUITAS (Rp miliar)	120	149	222
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	184	221	1.140
EBITDA (Rp miliar)	22	37	97
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	16	29	66
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	163	221	1.055
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	39
Setoran Pajak (Rp miliar)	20	-	23
Jumlah SDM (orang)	99	82	102

 PT Primissima (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	79	93	84
LIABILITAS (Rp miliar)	96	90	80
EKUITAS (Rp miliar)	(17)	3	4
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	110	99	110
EBITDA (Rp miliar)	(12)	(19)	3
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(12)	12	3
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	113	99	110
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	-	5
Setoran Pajak (Rp miliar)	-	-	7
Jumlah SDM (orang)	807	807	805

 PT Survai Udara Penas (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	53	49	77
LIABILITAS (Rp miliar)	150	164	189
EKUITAS (Rp miliar)	(97)	(115)	(112)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2	4	75
EBITDA (Rp miliar)	(12)	(7)	14
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(13)	(19)	2
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	10	16	61
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	3	-	6
Setoran Pajak (Rp miliar)	1	-	0
Jumlah SDM (orang)	30	-	22

Laporan Keuangan

 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	140	115	137
LIABILITAS (Rp miliar)	129	103	120
EKUITAS (Rp miliar)	11	12	17
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	315	279	328
EBITDA (Rp miliar)	5	1	9
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	2	1	5
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	311	276	321
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	5	-	8
Setoran Pajak (Rp miliar)	9	11	28
Jumlah SDM (orang)	221	200	188

 PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	669	-	755
LIABILITAS (Rp miliar)	1.442	-	1.672
EKUITAS (Rp miliar)	(773)	-	(917)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	2	-	248
EBITDA (Rp miliar)	(40)	-	6
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(113)	-	(65)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	31	-	260
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	0	-	1
Jumlah SDM (orang)	-	85	85

 PT Kertas Leces (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	980	-	1.118
LIABILITAS (Rp miliar)	1.353	-	1.335
EKUITAS (Rp miliar)	(372)	-	(217)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	6	-	0
EBITDA (Rp miliar)	608	-	(18)
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	457	-	(18)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	46	-	-
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	-	-	-
Setoran Pajak (Rp miliar)	17	-	-
Jumlah SDM (orang)	50	-	-

 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Realisasi	Realisasi	Target
	2015	2016	2017
ASET (Rp miliar)	1.322	-	1.278
LIABILITAS (Rp miliar)	9.919	-	10.632
EKUITAS (Rp miliar)	(8.597)	-	(9.354)
Pendapatan Usaha (Rp miliar)	43	-	149
EBITDA (Rp miliar)	(1.488)	-	220
Laba Tahun Berjalan (Rp miliar)	(2.476)	-	(339)
Beban Operasional/Opex (Rp miliar)	637	-	275
Belanja Modal/Capex (Rp miliar)	1	-	1
Setoran Pajak (Rp miliar)	-	-	0
Jumlah SDM (orang)	1.532	114	114

Daftar Nama dan Alamat Situs BUMN

No.	BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi				
1.	Perum Bulog		Perdagangan Besar dan Eceran	http://www.bulog.co.id
2.	Perum Jasa Tirta I		Pengadaan Air, Sampah, dan Daur Ulang	http://jasatirta1.co.id
3.	Perum Jasa Tirta II		Pengadaan Air, Sampah, dan Daur Ulang	http://jasatirta2.co.id
4.	Perum Perhutani		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://www.perhutani.co.id
5.	Perum Perikanan Indonesia		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://www.perumperindo.co.id
6.	PT Berdikari		Perdagangan Besar dan Eceran	http://berdikari-persero.com
7.	PT Biofarma		Industri Pengolahan	http://biofarma.co.id
8.	PT Garam		Industri Pengolahan	-
9.	PT Indofarma		Industri Pengolahan	http://indofarma.co.id
10.	PT Kimia Farma		Industri Pengolahan	http://kimiafarma.co.id
11.	PT Perikanan Nusantara		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-
12.	PT Perkebunan Nusantara III		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://ptpn3.co.id
13.	PT Pertani		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://pertani.co.id
14.	PT Pupuk Indonesia		Industri Pengolahan	http://pupuk-indonesia.co.id
15.	PT Rajawali Nusantara		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://rni.co.id
16.	PT Sang Hyang Seri		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	http://sanghyangseri.co.id
Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata				
17.	PT Bhandha Ghara Rekso		Trasportasi dan Pergudangan	http://bgrindonesia.com
18.	PT Energy Management		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://energyservices.co.id
19.	PT Hotel Indonesia		Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	http://innagroups.com
20.	PT Pengembangan Pariwisata		Real Estate	http://itdc.co.id
21.	PT Pertamina		Pertambangan dan Penggalian	http://pertamina.co.id
22.	PT Perusahaan Gas Negara		Pengadaan Gas, Uap dan Udara Dingin	http://pgn.co.id
23.	PT Perusahaan Listrik		Pengadaan Gas, Uap dan Udara Dingin	http://pln.co.id

No.	BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
24.	PT Perusahaan Perdagangan		Perdagangan Besar dan Eceran	http://tradingindonesia.com
25.	PT Pos Indonesia		Transportasi dan Pergudangan	http://posindonesia.com
26.	PT Sarinah		Perdagangan Besar dan Eceran	http://sarinah.co.id
27.	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko		Real Estate	http://borobudurwisata.com
Bidang Usaha Industri Pertambangan, Industri Strategis, dan Media				
28.	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara		Informasi dan Telekomunikasi	http://www.antaranews.com
29.	Perum Percetakan Negara		Industri Pengolahan	http://pnri.co.id
30.	Perum Percetakan Uang		Percetakan Uang Industri Pengolahan	http://www.peruri.co.id
31.	Perum Produksi Film Negara		Informasi dan Telekomunikasi	-
32.	PT Aneka Tambang		Pertambangan dan Penggalian	http://antam.com
33.	PT Balai Pustaka		Industri Pengolahan	http://balaipustaka.co.id
34.	PT Barata Indonesia		Industri Pengolahan	http://barata.co.id
35.	PT Boma Bisma Indra		Industri Pengolahan	http://ptbbi.co.id
36.	PT Dahana		Industri Pengolahan	http://dahana.com
37.	PT Dirgantara Indonesia		Industri Pengolahan	http://indonesian-aerospace.com
38.	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari		Industri Pengolahan	http://dkb.co.id
39.	PT Dok dan Perkapalan Surabaya		Industri Pengolahan	http://dok-sby.co.id
40.	PT Indonesia Asahan Aluminium		Pertambangan dan Penggalian	http://inalum.co.id
41.	PT Industri Kapal Indonesia		Industri Pengolahan	http://ikishipyard.com
42.	PT Industri Nuklir Indonesia		Industri Pengolahan	http://batantek.com
43.	PT Industri Telekomunikasi Indonesia		Industri Pengolahan	http://inti.co.id
44.	PT Krakatausteel		Industri Pengolahan	http://krakatausteel.com
45.	PT Len Industri		Industri Pengolahan	http://len.co.id
46.	PT PAL Indonesia		Industri Pengolahan	http://pal.co.id

Daftar Nama dan Alamat Situs BUMN

No.	BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
47.	PT Pindad		Industri Pengolahan	http://pindad.com
48.	PT Semen Baturaja		Industri Pengolahan	http://semenbaturaja.co.id
49.	PT Semen Indonesia		Industri Pengolahan	http://semenindonesia.com
50.	PT Semen Kupang		Industri Pengolahan	-
51.	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam		Pertambangan dan Penggalian	http://ptba.co.id
52.	PT Telekomunikasi Indonesia		Informasi dan Telekomunikasi	http://telkom.co.id
53.	PT Timah		Pertambangan dan Penggalian	http://timah.com
Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
54.	Perum Damri		Trasnportasi dan Pergudangan	http://asabri.co.id
55.	Perum Perumnas		Konstruksi	http://perumnas.co.id
56.	Perusahaan Pengangkutan Jakarta		Trasnportasi dan Pergudangan	http://perumppd.blogspot.com
57.	PT Adhi Karya		Konstruksi	http://adhi.co.id
58.	PT Amarta Karya		Konstruksi	http://amartakarya.co.id
59.	PT ASDP Indonesia Ferry		Trasnportasi dan Pergudangan	http://indonesiaferry.co.id
60.	PT Bina Karya		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	-
61.	PT Brantas Abipraya		Konstruksi	http://brantas-abipraya.com
62.	PT Utama Karya		Konstruksi	http://www.hutamakarya.com
63.	PT Indah Karya		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	-
64.	PT Indra Karya		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://indrakarya.co.id
65.	PT Jasa Marga		Trasnportasi dan Pergudangan	http://jasamarga.com
66.	PT Kawasan Berikat Nusantara		Trasnportasi dan Pergudangan	http://kbn.co.id
67.	PT Kawasan Industri Makassar		Trasnportasi dan Pergudangan	http://ptkima-makassar.co.id
68.	PT Kawasan Industri Medan		Trasnportasi dan Pergudangan	http://kim.co.id
69.	PT Kawasan Industri Wijayakusuma		Trasnportasi dan Pergudangan	http://kiw.co.id
70.	PT Pelabuhan Indonesia		Trasnportasi dan Pergudangan	http://inaport1.co.id

No.	BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
71.	PT Pelabuhan Indonesia II		Trasportasi dan Pergudangan	http://indonesiaport.co.id
72.	PT Pelabuhan Indonesia III		Trasportasi dan Pergudangan	http://pp3.co.id
73.	PT Pelabuhan Indonesia IV		Trasportasi dan Pergudangan	http://inaport4.co.id
74.	PT Pelayaran Nasional Indonesia		Trasportasi dan Pergudangan	http://pelni.co.id
75.	PT Pembangunan Perumahan		Konstruksi	http://pt-pp.com
76.	PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam		Trasportasi dan Pergudangan	http://perserobatam.com
77.	PT Virama Karya		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://viramakarya.co.id
78.	PT Waskita Karya		Konstruksi	http://waskita.co.id
79.	PT Wijaya Karya		Konstruksi	http://wika.co.id
80.	PT Yodya Karya		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://yoka.co.id
Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan				
81.	Perum Jaminan Kredit		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://www.jamkrindo.com
82.	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi		Trasportasi dan Pergudangan	http://airnavindonesia.com
83.	PT Angkasa Pura I		Trasportasi dan Pergudangan	http://angkasapura1.co.id
84.	PT Angkasa Pura II		Trasportasi dan Pergudangan	http://angkasapura2.co.id
85.	PT Asuransi ABRI		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://asabri.co.id
86.	PT Asuransi Jasa Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jasindo.co.id
87.	PT Asuransi Jiwasraya		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jiwasraya.co.id
88.	PT Asuransi Kredit Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://askrindo.co.id
89.	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bahana.co.id
90.	PT Bank Mandiri		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bankmandiri.co.id
91.	PT Bank Negara Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bni.co.id
92.	PT Bank Rakyat Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://bri.co.id
93.	PT Bank Tabungan Negara		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://btn.co.id
94.	PT Biro Klasifikasi Indonesia		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://klasifikasiindonesia.com
95.	PT Danareksa		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://danareksa.com

Daftar Nama dan Alamat Situs BUMN

No.	BUMN	Logo	Sektor	Alamat Situs
96.	PT Garuda Indonesia		Trasnportasi dan Pergudangan	http://garuda-indonesia.com
97.	PT Industri Kereta Api		Industri Pengolahan	http://inka.web.id
98.	PT Jasa Raharja		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://jasaraharja.co.id
99.	PT Kereta Api Indonesia		Trasnportasi dan Pergudangan	http://kereta-api.co.id
100.	PT Kliring Berjangka Indonesia		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://ptkbi.com
101.	PT Pegadaian		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pegadaian.co.id
102.	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pannmf.co.id
103.	PT Permodalan Nasional Madani		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://pnm.co.id
104.	PT Reasuransi		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://asei.co.id
105.	PT Sucofindo		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://sucofindo.co.id
106.	PT Surveyor Indonesia		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://ptsi.co.id
107.	PT Taspen		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://taspen.com
108.	PT Djakarta Lloyd		Trasnportasi dan Pergudangan	http://djakartalloyd.co.id
109.	PT Industri Gelas		Industri Pengolahan	http://iglas.co.id
110.	PT Industri Sandang Nusantara		Industri Pengolahan	-
111.	PT Istaka Karya		Konstruksi	-
112.	PT Kertas Kraft Aceh		Industri Pengolahan	http://kka.co.id
113.	PT Kertas Leces		Industri Pengolahan	http://kertasleces.co.id
114.	PT Merpati Nusantara		Trasnportasi dan Pergudangan	http://merpati.co.id
115.	PT Perusahaan Pengelola Aset		Jasa Keuangan dan Asuransi	http://ptppa.com
116.	PT Primisima		Industri Pengolahan	-
117.	PT Survei Udara Penas		Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	http://penas.co.id
118.	PT Varna Tirta Prakasya		Trasnportasi dan Pergudangan	http://vtp.co.id